



LAPORAN KINERJA BPPSDMP TAHUN 2023



**Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian
2023**



KATA PENGANTAR



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/OT.010/8/2015 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Badan PPSDMP) sebagai salah satu unit Eselon I di Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan

pengembangan SDM pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh Badan PPSDMP meliputi : Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan penyuluhan pertanian; Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian; Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pertanian; Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.

Laporan Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama periode jabatan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan kinerja Badan PPSDMP Tahun 2023.

Jakarta, 13 Februari 2024
Kepala Badan PPSDMP



Prof. Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. 1964062311989031002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja atau Lakin Badan PPSDMP tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan PPSDMP tahun 2020- 2024 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Lakin Badan PPSDMP tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan PPSDMP selama tahun 2023.

Lakin ini memuat pencapaian kinerja program/kegiatan Badan PPSDMP tahun 2023 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan PPSDMP tahun 2020-2024, Visi Badan PPSDMP adalah : **“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern”**. Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang telah ditetapkan Badan PPSDMP adalah: Memantapkan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern; Memantapkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif; Memantapkan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan Memantapkan reformasi birokrasi.

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi: 1. Persentase petani yang menerapkan teknologi; 2. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya; 3. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya 4. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian bekerja di bidang pertanian; 5. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP; 6. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP.

Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2023 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **100,26%**; b) Persentase SDM pertanian yang



meningkat kapasitasnya sebesar **104,68%**; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu **104,18%**; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar **100,28%**; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu **102,79%**; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu **100,13%**.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah Rp. **1.101.296.884.474,-** dari pagu sebesar Rp. **1.114.893.522.000,-** Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2023 adalah **98,78%**. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 104.360.399.532,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 381.907.360.872,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 348.611.995.629,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 268.417.128.441,-.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, serta menyempurnakan kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis, sehingga diharapkan di masa yang akan datang semua capaian kinerja sasaran strategis dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Badan PPSDMP tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	5
C. Organisasi dan Tata Kerja Badan PPSDMP.....	6
D. Sumber Daya Manusia Badan PPSDMP Tahun 2023..	7
E. Dukungan Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2023.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Perjanjian Kinerja tahun 2023.....	24
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan.....	25
B. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Th 2023.....	25
1 Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP 2023.....	26
2 Perbandingan Realisasi Kinerja Badan PPSDMP 4 (empat) tahun 2020–2023.....	43
3 Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar Nasional.....	45
4 Perbandingan realisasi capaian kinerja Badan PPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)	47
5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	48
6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya..	69
C. Realisasi Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2023	70
BAB IV. PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Langkah Dimasa mendatang yang akan dilaksanakan organisasi untuk meningkatkan kinerja.....	81
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2023.....	7
Tabel 2. Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023	8
Tabel 3. Pagu Anggaran Badan PPSDMP Tahun 2023.....	8
Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP.....	12
Tabel 5. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi.....	20
Tabel 6. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024.....	22
Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2023.....	24
Tabel 8. Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2023.....	26
Tabel 9. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Bulan Maret 2023.....	33
Tabel 10. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di Bidang Pertanian.....	34
Tabel 11. Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2020 - 2023.....	44
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja BP2SDM KLHK tahun 2022.....	46
Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2020 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024).....	48
Tabel 14. Hasil Pemenuhan Capaian Reformasi Birokrasi General Lingkup BPPSDMP	61
Tabel 15. Capaian Pemenuhan Rencana Aksi Tematik Lingkup BPPSDMP Tahun 2023.....	64
Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2023	71
Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2023	72
Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2023	72
Tabel 19. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2023.....	73
Tabel 20. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2023.....	73



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Screen shot Aplikasi EPIK	32
Gambar 2. Transformasi Kelembagaan Petani.....	37
Gambar 3. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2023.....	43
Gambar 7. Persentase realisasi anggaran per kegiatan lingkup BPPSDMP tahun 2023	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor pertanian. Pertanian berperan penting dalam kehidupan manusia karena fungsinya sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak, dan energi. Peran pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berpengaruh dan bergantung pada sistem penyangga kehidupan lain. Tren saat ini terjadi peningkatan konsumsi pangan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan ancaman wabah penyakit. Kondisi pandemi Covid-19 membuat sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Hal ini akan menimbulkan tekanan yang lebih besar pada sektor pertanian untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yang aman dan berkualitas bagi 273 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan baik secara lokal maupun global melalui pembangunan pertanian berskala ekonomi.

Peningkatan skala ekonomi dan penerapan inovasi teknologi pertanian merupakan langkah utama pembangunan pertanian nasional yang harus segera ditempuh agar sektor pertanian dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat rata-rata 5,7-6,0% per tahun, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM. Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, kestabilan tren menurun tingkat inflasi tetap dijaga dengan target sebesar 2,7% pada tahun 2024 melalui program pertanian yang berbasis skala ekonomi dan menggunakan inovasi teknologi pertanian, sehingga biaya produksi dapat menjadi lebih murah dan harga pokok produksi komoditas pertanian nasional menjadi lebih kompetitif.



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020- 2024 yakni: Kementerian Pertanian yang andal, profesional, inovatif dan berintegritas dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2 Presiden, yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu kunci mencapai sasaran pembangunan pertanian jangka menengah 2020-2024 adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) sebagai salah satu unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian diberi mandat untuk menyiapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing. Untuk mencapai hal tersebut, BPPSDMP menetapkan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan SDM Pertanian tahun 2020-2024.

BPPSDMP memiliki potensi sekaligus permasalahan yang ada mengenai pengembangan SDM pertanian. Potensi dan permasalahan tersebut dijabarkan pada kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BPPSDMP, serta peluang dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi oleh BPPSDMP. Adapun peluang dan permasalahan tersebut adalah: 1. **Kekuatan** (*Strength*) yaitu a). Tersedianya Kelembagaan Penyuluhan, Pendidikan, dan Pelatihan Pertanian; b). Tersedia tenaga Penyuluh, Widyaiswara, Dosen dan Guru; dan c). Adanya regulasi terkait penyuluhan pertanian, pelatihan pertanian, serta Pendidikan pertanian. 2. **Kelemahan** (*Weakness*) yaitu a). Jumlah petani yang mengadopsi teknologi terapan masih rendah; b). Tingkat pendidikan petani masih rendah; c). Kapasitas kelembagaan petani masih rendah; d). Minat generasi muda di bidang pertanian cenderung mengalami penurunan; e). Jumlah SDM pertanian yang kompeten masih rendah; f). Link and match antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja belum optimal; g). Distribusi dan pemasaran produk pertanian. 3. **Peluang** (*Opportunity*) yaitu a).



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Peningkatan volume ekspor komoditas pangan strategis; b). Tanaman sebagai bahan baku pangan, industri, dan energi; c). Akses petani milenial terhadap pembiayaan, kapabilitas kelembagaan dan inovasi teknologi; d). Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian; e). Bonus Demografi; f). Industri 4.0, 4. **Tantangan** (*Threat*) yaitu a). Produktivitas dan daya saing komoditas pertanian belum optimal; b). Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi; c). Kondisi perekonomian global; d). Perubahan iklim secara ekstrim, kerusakan lingkungan, dan bencana alam; e). Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian di Era Tatanan Baru; f). Mempersiapkan SDM di Era VUCA.

Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024 sebagai penjabaran dari strategi utama untuk mencapai sasaran umum kebijakan BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, yaitu: (1) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani); (2) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; dan (3) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Peningkatan kualitas SDM Pertanian Indonesia haruslah menjadi fokus utama dari ketiga pilar BPPSDMP yakni penyuluhan, pendidikan dan pelatihan untuk mendukung penyediaan pangan, kesejahteraan petani, dan peningkatan ekspor komoditas pertanian. SDM pertanian merupakan penggerak utama pembangunan pertanian, sehingga BPPSDMP sebagai unit kerja Eselon I di Kementerian Pertanian memiliki mandat untuk menyiapkan SDM pertanian yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha. Penyuluhan, pelatihan, dan pendidikan secara umum harus mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Dalam perjalanannya melaksanakan tugas pengembangan SDM Pertanian BPPSDMP menghadapi isu strategis, antara lain: 1) Rendahnya penerapan dan pemanfaatan inovasi dan teknologi pertanian oleh petani di lapangan; 2) rendahnya kapasitas SDM pertanian; 3) rendahnya kompetensi SDM pertanian di bidang pertanian; 4) rendahnya minat generasi muda terhadap



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

sector pertanian; 5) rendahnya kelembagaan petani; 6) belum *link and match* antara kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan ketersediaan tenaga kerja; 7) dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang untuk menjadi pemerintah kelas dunia belum optimal.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, BPPSDMP didukung oleh kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia yang cukup memadai dan ketenagaan baik tenaga fungsional umum maupun tenaga fungsional khusus, serta didukung administrasi manajemen dan teknis lainnya.

BPPSDMP menyelenggarakan dua fungsi yaitu ekonomi dan pendidikan. Program pada fungsi ekonomi yaitu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi, Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP, sedangkan program fungsi pendidikan adalah Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi.

Mengacu pada strategi Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima.

BPPSDMP terdiri atas Pusat Penyuluhan Pertanian, Pusat Pendidikan Pertanian, Pusat Pelatihan Pertanian, dan Sekretariat BPPSDMP. Selain itu, BPPSDMP didukung pula oleh Unit Pelaksana Teknis, Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan), Politeknik Enjinering Pertanian Indonesia (PEPI), Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP).

Pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh BPPSDMP. Kinerja BPPSDMP tidak



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

terlepas oleh dukungan, kontribusi, dan kebermanfaatannya dari *stakeholder* BPPSDMP, yang antara lain Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian, termasuk BPPSDMP.

Tugas BPPSDMP berdasarkan peraturan tersebut adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian. Adapun fungsi yang diselenggarakan oleh BPPSDMP meliputi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
2. pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
6. pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.



C. Organisasi dan Tata Kerja BPPSDMP

Pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP di Pusat, didukung oleh empat unit kerja Eselon II Pusat dan 20 UPT yaitu :

1. Pusat Penyuluhan Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian;
3. Pusat Pendidikan Pertanian
4. Sekretariat BPPSDMP.
5. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan Sumatera Utara;
6. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Bogor Jawa Barat;
7. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta - Magelang Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang Jawa Timur;
9. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Gowa Sulawesi Selatan;
10. Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Manokwari Papua Barat;
11. Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia (PEPI) Tangerang Banten;
12. Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi Jawa Barat;
13. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang Jawa Barat;
14. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara Jawa Barat;
15. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Jawa Timur;
16. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Jawa Timur;
17. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang Kalimantan Selatan;
18. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku Sulawesi Selatan;
19. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Nusa Tenggara Timur;
20. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi;
21. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung;
22. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-



- PPN) Sembawa Sumatera Selatan;
23. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Banjarbaru Kalimantan Selatan;
24. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri (SMK-PPN) Kupang Nusa Tenggara Timur.

D. Sumber Daya Manusia BPPSDMP Tahun 2023

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2023 BPPSDMP didukung oleh 1.812 orang aparat yang terdiri atas 1.054 orang aparat laki-laki dan 758 aparat perempuan.

Komposisi pegawai BPPSDMP pada tahun 2023 berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Rincian menurut golongan terdiri : golongan I yaitu 11 orang; golongan II yaitu 218 orang; golongan III yaitu 1.230 orang, dan golongan IV yaitu 353 orang. Persentase pegawai BPPSDMP tertinggi adalah pada golongan III yaitu 68%, sedangkan yang terendah adalah pada golongan I yaitu 1%. Komposisi pegawai BPPSDMP tahun 2023 pada berdasarkan golongan pada tabel 1.

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	11	0,61
2	Golongan II	218	12,03
3	Golongan III	1230	67,88
4	Golongan IV	353	19,48
		1812	100,00

Tabel 1. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Golongan Tahun 2023

2. Rincian menurut pendidikan terdiri : S3 (Doktor) sebanyak 142 orang, S2 (magister) yaitu 675 orang, S1 (sarjana) yaitu 444 orang, D4 yaitu 126 orang, D3 yaitu 92 orang, D2 yaitu 1 orang, D1 yaitu 1 orang, SLTA yaitu 268 orang, SLTP yaitu 33 orang dan SD yaitu 30 orang. Komposisi



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

pegawai BPPSDMP tahun 2023 pada berdasarkan tingkat pendidikan pada Tabel 2.

No	Pendidikan	Jumlah	Peresentase
1	S3	142	7,84
2	S2	675	37,25
3	S1	444	24,50
4	D4	126	6,95
5	D3	92	5,08
6	D2	1	0,06
7	D1	1	0,06
8	SLTA	268	14,79
9	SLTP	33	1,82
10	SD	30	1,66
		1812	100

Tabel 2. Komposisi Pegawai BPPSDMP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

E. Dukungan Anggaran BPPSDMP Tahun 2023

Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah RP. **1.114.893.522.000,00**;
Rincian Pagu anggaran BPPSDMP tahun 2023 terdiri dari anggaran pada table 3:

Tabel 3. Pagu Anggaran BPPSDMP Tahun 2023

No	Kegiatan	PAGU (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	387.752.821.000	34,78
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	108.148.320.000	9,70
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	348.890.878.000	31,29
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	270.103.503.000	24,23
	TOTAL	1.114.893.522.000	100,00

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

Persentase pagu anggaran BPPSDMP tahun 2023 mulai dari yang tertinggi yaitu Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian 34,78%, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 31,29%, Dukungan manajemen dan dukungan Teknis Lainnya 24,23% dan terendah adalah Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 9,70%.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 sesuai dengan Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 226/Kpts/RC.020/I/10/2021. Tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor : 278/Kpts/RC.020/I/11/2020 tentang Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024.

1. Visi

BPPSDMP telah menetapkan visi pada Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang Profesional, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berjiwa Wirausaha dalam Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern.

Adapun pokok-pokok visi BPPSDMP adalah SDM pertanian yang Profesional; SDM Pertanian yang Mandiri; SDM Pertanian yang Berdaya Saing; SDM pertanian yang berjiwa wirausaha mendukung Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.

SDM pertanian yang profesional adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kompetensi, sesuai dengan profesi yang ditekuni, mempunyai pengetahuan, sikap, keterampilan, motivasi dan atribut lain yang diperlukan agar dapat berhasil dalam pekerjaannya. **SDM pertanian yang mandiri** adalah sumber daya manusia pertanian yang selalu bersikap dan berperilaku yang lebih mengandalkan inisiatif, kemampuan dan tanggung jawab pada diri sendiri secara konsekuen dan menghindari dari sikap ketergantungan pada orang lain. **SDM pertanian yang berdaya saing** adalah sumber daya manusia pertanian yang memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan atau kemampuan untuk meraih kesuksesan. **SDM Pertanian yang Berjiwa Wirausaha** adalah sumber daya manusia



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

yang memiliki jiwa dan semangat *entrepreneurship*, bekerja di sektor pertanian dari hulu dan/atau hilir, serta mampu membuka lapangan pekerjaan dan akses pasar di sektor pertanian. **Pertanian Maju** dapat diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. **Pertanian Mandiri** dapat diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain. **Pertanian Modern** diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0. Untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern tidak lepas dari peran SDM pertanian yang profesional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha.

2. Misi

BPPSDMP menetapkan Misi (strategi utama), yaitu:

- a. Menyelenggarakan sistem penyuluhan pertanian terpadu dan modern;
- b. Menyelenggarakan pendidikan vokasi pertanian yang kompetitif;
- c. Menyelenggarakan sistem pelatihan vokasi pertanian berbasis kompetensi dan daya saing; dan
- d. Menyelenggarakan reformasi birokrasi.



3. Tujuan

Indikator Kinerja dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

- a. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen) ;
- b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen) ;
- c. Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang) ;

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a. Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
 - b. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (th. 2020) sampai dengan 22 % (th. 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (th 2020) sampai dengan nilai 34,25 (th. 2024).



5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (th. 2020) sampai dengan 90,80 (th. 2024).

4. Sasaran Program BPPSDMP

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) BPPSDMP

No	Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	85
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2.	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	85
		3.	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	85
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4.	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	21
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5.	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	34
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,60



5. Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan SDM pertanian tahun 2020-2024 adalah:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pertanian;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
- d. Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

6. Strategi

Mengacu pada strategi dan cara bertindak Kementerian Pertanian, strategi yang didelegasikan kepada Badan PPSDMP adalah: Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian, dan Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima. Rincian strategi dan langkah operasional diuraikan sebagai berikut :

a. Strategi dalam Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Teknologi dan inovasi pertanian menjadi faktor utama peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, sampai saat ini kelembagaan penelitian dan pengembangan pertanian telah menghasilkan berbagai teknologi dan inovasi yang perlu didiseminasikan kepada petani melalui:

- 1) Pengawasan dan pendampingan diseminasi teknologi di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- 2) Penderasan diseminasi inovasi teknologi tepat guna di BPP Kostratani
- 3) Pengawasan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi tepat guna
- 4) Diseminasi pemanfaatan pertanian presisi di BPP



- 5) Penguatan BPP berbasis teknologi informasi
- 6) Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawalan dan pendampingan diseminasi inovasi teknologi.

b. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang andal dan profesional menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun pertanian berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pelatihan teknis dan vokasi, standardisasi dan sertifikasi profesi pertanian; dengan langkah operasional sebagai berikut:
 - Pengembangan kurikulum berbasis SKKNI/SKK;
 - Penguatan sistem sertifikasi kompetensi;
 - Penerapan sistem pelatihan berbasis kompetensi dan minat atau talenta;
 - Pelatihan peningkatan literasi bagi petani menuju era pertanian digital dan presisi;
 - Peningkatan kapasitas SDM secara masif, melalui pelatihan dan bimtek dengan metode *online* dan *offline* berbasis NIK;
 - Peningkatan profesionalisme dan kompetensi Widyaiswara dan tenaga pelatihan;
 - Pengembangan lembaga pelatihan pertanian sebagai pusat pelatihan dengan taraf internasional;
 - Standardisasi mutu pelayanan pelatihan dengan penerapan ISO;
 - Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan pertanian untuk menghasilkan mutu SDM sesuai standar yang ditentukan;
 - Peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi profesi pertanian;



- Penguatan jejaring dan kerjasama pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri.
 - Pelatihan literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian bagi petani
 - Peningkatan kapasitas pemuda tani melalui P4S
 - Pelatihan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pelatihan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- 2) Regenerasi dan penumbuhan minat generasi muda pertanian dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan wirausahawan muda pertanian;
 - Pendampingan mahasiswa, siswa, alumni, pemuda tani di Kawasan pertanian;
 - Penumbuhan kelompok usaha bersama (KUB) yang dikelola oleh pemuda tani;
 - Permagangan bagi pemuda tani dalam bidang pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama antar pengusaha pertanian milenial.
 - Pendampingan bagi petani milenial dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian
 - Peningkatan branding bagi petani melalui pengukuhan Duta Petani Milenial/Andalan (DPM/DPA)
 - Peningkatan resonansi petani milenial melalui jejaring usaha petani milenial;
- 3) Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penyeberluasan informasi pertanian melalui media elektronik, media cetak dan e-learning;
 - Pengembangan *database* kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan yang terintegrasi;



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

- Pengembangan *database* petani berbasis Nomor Induk Kependudukan;
 - Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi Balai Penyuluhan Pertanian;
 - Pengawasan dan pendampingan pada petani dalam literasi keuangan dan akses KUR serta asuransi pertanian.
 - Pengawasan dan pendampingan petani dalam menerapkan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
 - Pengawasan dan pendampingan mendukung Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
- 4) Penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Transformasi pendidikan menengah pertanian menjadi lembaga pendidikan vokasi yang profesional, mandiri dan berdaya saing;
 - Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan untuk menghasilkan lulusan yang menjadi wirausaha pertanian dan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri;
 - Pengembangan kurikulum yang *link and match* dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri;
 - Permagangan bagi lulusan pendidikan vokasi pertanian;
 - Pengembangan jejaring kerjasama pendidikan vokasi pertanian;
- 5) Penguatan kelembagaan petani berbasis korporasi dengan langkah operasional sebagai berikut:
- Penumbuhan dan pengembangan poktan dan gapoktan;
 - Penumbuhan dan pengembangan KEP/BUMP/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) melalui jejaring dan kemitraan usaha;
 - Penumbuhan dan pengembangan korporasi petani;
 - Insentif kinerja Penyuluh Pertanian dalam pengawasan dan pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

- Pengawasan dan pendampingan bagi petani di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
- Pendampingan bagi petani milenial di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP;
- Pelatihan bagi SDM di kawasan pertanian berbasis korporasi dan *food estate*/KSPP

6) Komando Strategis Pembangunan Pertanian;

Kolaborasi Strategis Pembangunan Pertanian adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi untuk menyelaraskan kebijakan dengan semua pemangku kepentingan sehingga tercipta kesamaan arah atau satu komando. Gerakan pembaharuan pembangunan pertanian ini bertujuan mensinergikan semua pemangku kepentingan *stakeholder* pertanian dengan strategi kolaborasi berupa gerakan satu komando secara berjenjang mulai dari pusat hingga ke kecamatan. Secara operasional, gerakan secara masif dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang dilengkapi dengan perangkat dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai instrumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran tersebut meliputi: a) Pusat data dan informasi pertanian, yang mencakup data statistik pertanian dan sumber daya manusia pertanian; b) Pusat gerakan pembangunan pertanian dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mensinergikan program strategis pembangunan pertanian dan pangan; c) Pusat pembelajaran sebagai wadah dan wahana untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, melalui proses belajar mengajar, dalam bentuk bimbingan teknis, percontohan (Sekolah Lapangan/Demplot/ Demfarm/Demarea); d) Pusat konsultasi agribisnis antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan instansi/lembaga lain; dan e) Pusat pengembangan jejaring kemitraan



sebagai tempat pengembangan kemitraan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak lain.

Salah satu tujuan gerakan komando strategis di kecamatan yaitu terjaminnya pemutakhiran dan arus data pembangunan pertanian dari kecamatan sampai pusat. Hal ini sangat penting dalam rangka mendukung program Satu Data Indonesia. Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan Satu Data Pertanian dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yang dikelola secara terbuka dan *real time*. *Dashboard* besar satu data sebagai sarana komunikasi dan informasi di tingkat nasional dibangun oleh Kementerian Pertanian sebagai pusat komando dan pengendali yang mempercepat pengambilan keputusan dibidang pembangunan pertanian dan pangan.

7) Pengarusutamaan Gender (PUG)

PUG merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber modal serta merasakan hasil dari pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. RPJMN 2020-2024 telah menetapkan indikator yang digunakan untuk melihat implementasi PUG yaitu: (a) Indeks Pembangunan Gender (IPG); (b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan (c) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Untuk mengoptimalkan implementasi PUG, Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan PUG ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan pertanian.

Strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian terkait pengarusutamaan gender yaitu : (a) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pertanian; (b) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan



pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (c) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (d) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai dasar untuk melakukan pemetaan dalam rangka mengevaluasi perwujudan kesetaraan dan keadilan gender serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (e) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Selain strategi dan kebijakan PUG dalam aspek perencanaan dan penganggaran, penandaan (*tagging*) anggaran kegiatan yang berbasis gender juga diterapkan dalam kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, pengembangan inovasi teknologi pertanian, pelatihan teknis budidaya, kajian gender dalam implementasi asuransi pertanian.

c. Strategi mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah yang Berorientasi pada Layanan Prima

- 1) Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui upaya-upaya sebagai berikut:
 - Penerapan manajemen talenta ASN;
 - Peningkatan sistem merit ASN;
 - Penyederhanaan eselonisasi;
 - Penataan jabatan fungsional;
- 2) Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui:
 - Penataan kelembagaan instansi pemerintah;
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi.



- 3) Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Perluasan implementasi sistem integritas;
 - Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi;
 - Reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.
- 4) Transformasi pelayanan publik, melalui: – Pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*);
 - Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik;
 - Penguatan ekosistem inovasi;
 - Penguatan pelayanan terpadu.

7. Program

Pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi I, BPPSDMP mengampu 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian (Fungsi Ekonomi); dan
- b. Program Pendidikan Pertanian (Fungsi Pendidikan).

Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) maka Program yang diampu BPPSDMP direvisi pada Rencana Strategis BPPSDMP Tahun 2020-2024 Revisi II menjadi yaitu:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan
- b. Program Dukungan Manajemen;



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Aksi BPPSDMP meliputi: (a). Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian; (b). Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial; (c). Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendidikan Vokasi mendukung program utama Kementerian Pertanian.

Sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP mengemban dua fungsi program yaitu fungsi ekonomi dan fungsi Pendidikan, yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. Struktur Program dan Kegiatan Berdasarkan Fungsi

Program	Kegiatan	Fungsi
Kegiatan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Ekonomi	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Ekonomi
	Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	Pendidikan
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Ekonomi

8. Kegiatan Utama BPPSDMP

Kegiatan Utama BPPSDMP meliputi :

- a. Pelatihan teknis mendukung program prioritas
- b. Sertifikasi Profesi bidang Pertanian
- c. Insentif Kinerja Penyuluh PNS dan THL-TBPP
- d. Sarana Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian
- e. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan Korporasi Petani
- f. Pengembangan kerjasama dalam negeri dan luar negeri : *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)*, Pemberdayaan Masyarakat melalui Program READSI, Program Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, *Youth Enterpreunership and Employment Support Service (YESS)*, Pemantapan sistem perencanaan dan kerjasama, Penguatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

akuntabel, Peningkatan kualitas layanan organisasi, hukum, kepegawaian, TU dan Rumah Tangga, Penguatan sistem evaluasi pelaporan dan kehumasan, Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, Peningkatan Kualitas Pemuda Tani.

- g. Program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan program PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri).

1. Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020-2024

Target Kinerja dan anggaran BPPSDMP Tahun 2020-2024 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Target kinerja dan anggaran BPPSDMP 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Sasaran Program/ Sasaran	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI PERTANIAN								993.176	985.265	754.176	1.884.286	2.261.143	BPPSDMP
SP1	Termanfaatkannya teknologi pertanian												
	IKSP1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SP2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia												
	IKSP2	Persentase sumber daya manusia pertanian yang	%	60	75	80	85	90					
	IKSP3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di	%	65	75	80	85	90					
SP3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional												
	IKSP4	Persentase kelembagaan petani	%	18	19	20	21	22					
Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian								489.612	479.693	298.663	800.607	960.728	Pusat Penyuluhan Pertanian
SK1	Pemanfaatan teknologi pertanian												
	IKSK1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	%	70	75	80	85	90					
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan petani melalui												
	IKSK2	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	%	18	19	20	21	22					
Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian								181.703	154.268	58.823	308.959	370.751	Pusat Pelatihan Pertanian



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pelatihan													
	IKSK1	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat	%	60	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pelatihan pertanian													
	IKSK2	Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Skala Likert (1-4)	3,90	3,91	3,92	3,93	3,94						
Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian									321.861	351.305	396.690	774.720	929.664	Pusat Pendidikan Pertanian
SK1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan vokasi pertanian													
	IKSK1	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang	%	65	75	80	85	90						
SK2	Meningkatnya kualitas kelembagaan Pendidikan pertanian													
	IKSK2	Persentase lembaga pendidikan vokasi	%	80	80	80	90	100						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan													
	IKSK3	Tingkat kepuasan peserta didik terhadap penyelenggaraan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	BPPSDMP
SP1	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima													
	IKSP1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
SP2	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas													
	IKSP2	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP									64.675	301.255	292.432	321.675	353.842	Sekretariat BPPSDMP
SK1	Terwujudnya Birokrasi BPPSDMP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan													
	IKSK1	Nilai PMPRB BPPSDMP	Nilai	33,25	33,50	33,75	34,00	34,25						
	IKSK2	Nilai AKIP BPPSDMP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal	Nilai	85	86	87	88	89						
	IKSK3	Level maturitas penyelenggaraan	Level	-	3	3	3	4						
	IKSK4	Persentase rekomendasi BPK atas laporan keuangan kementerian pertanian terkait BPPSDMP yang	%	70	75	80	85	90						
	IKSK5	Persentase rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti BPPSDMP terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan	%	75	80	85	90	90						



B P P S D M P
KEMENTERIAN PERTANIAN

SK2	Meningkatnya tata kelola anggaran BPPSDMP													
	IKSK6	Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP	Nilai	90,00	90,20	90,40	90,60	90,80						
SK3	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat BPPSDMP													
	IKSK7	Tingkat kepuasan unit kerja eselon II terhadap layanan sekretariat	Skala Likert (1-4)	3,82	3,83	3,84	3,85	3,86						

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja BPPSDMP merupakan dokumen penugasan dari Menteri Pertanian kepada Kepala BPPSDMP. Sasaran program, Indikator kinerja dan target yang ditetapkan tahun 2023 adalah :

Tabel 7. Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1 Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	85%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2 Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	85%
		3 Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian (%)	85%
3	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4 Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	21%
4	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	5 Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	34 Nilai
5	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	6 Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,60 Nilai

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Keragaan kinerja BPPSDMP dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditentukan di awal tahun. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja tahun 2023, maka digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian menjadi empat kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil (capaian 80 - 100%), (3) cukup berhasil (capaian 60 - <80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

B. Capaian Kinerja BPPSDMP

Capaian kinerja BPPSDMP diukur dengan membandingkan target dan realisasi capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis pada PK BPPSDMP tahun 2023. Rincian hasil capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 8.

Capaian indikator kinerja BPPSDMP tahun 2023 menunjukkan bahwa semua target indikator kinerja tercapai dan semua kategori masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian yang paling tinggi adalah Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya dengan capaian 104,69%, sedangkan capaian terkecil pada indikator Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan capaian 100,26%.



Tabel 8. Capaian Kinerja BPPSDMP Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REAL	Capaian %	KATEGORI
1.	Termanfaatnya teknologi pertanian	A Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	85	85,22	100,26	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	B Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	85	88,98	104,68	Sangat Berhasil
		C Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	85	88,55	104,18	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	D Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya(%)	21	21,06	100,28	Sangat Berhasil
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	E Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	34,00	34,95	102,79	Sangat Berhasil
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	F Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	90,60	90,72	100,13	Sangat Berhasil

Sumber data Pusat dan Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan PPSDMP Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP masing-masing Indikator Kinerja BPPSDMP tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Inovasi dan teknologi pertanian berperan penting dalam peningkatan produksi dan produktivitas usahatani sehingga berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang salah satunya dindikasikan dari meningkatnya ketahanan pangan rumah tangga petani. Hasil penelitian/pengkajian teknologi pertanian akan memberikan manfaat bagi petani apabila komponen teknologi yang dihasilkan diterapkan petani dalam pengelolaan usahatannya. Penerapan inovasi dan teknologi pertanian pada hakikatnya adalah proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan



(*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatannya guna meningkatkan produksi dan produktivitas dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan teknologi pertanian adalah pentingnya peran diseminasi teknologi pertanian kepada petani melalui berbagai saluran/media (media elektronik, media cetak, dan media interpersonal) dan metode penyuluhan pertanian yang tepat. Diseminasi inovasi dan teknologi pertanian merupakan kegiatan penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian spesifik lokasi. Diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan pengkajian melalui berbagai kegiatan komunikasi, promosi, dan komersialisasi serta penyebaran paket teknologi unggul yang dibutuhkan.

Proses penyebarluasan inovasi dan teknologi hasil pengkajian yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru atau cara baru yang berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusahatani untuk peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan perbaikan kesejahteraan petani yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sebagai jembatan dalam penyebarluasan/ diseminasi inovasi dan teknologi hasil penelitian dan kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian yang berkedudukan di pusat maupun daerah atau sumber lainnya kepada petani.

Penyuluh Pertanian berperan penting dalam memperkenalkan dan mendiseminasikan inovasi serta teknologi pertanian kepada petani agar mereka mau dan mampu mengadopsi teknologi pertanian sehingga mampu meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani agar mampu secara mandiri dalam menjalankan usahanya. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian salah satunya diindikasikan dengan adanya perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani serta



adopsi inovasi dan teknologi pertanian sehingga terjadinya peningkatan kapasitas petani dan kelembagaannya dalam berusaha tani.

Berkenaan dengan hal itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Penyuluhan Pertanian Tahun 2023 adalah Persentase Petani yang menerapkan teknologi dengan target 85% dari total jumlah petani secara nasional yang tergabung dalam kelompok tani dan terekam dalam **Aplikasi Simluhtan**, yaitu sebanyak **22.957.352 petani**. Berdasarkan hasil perhitungan, realisasi petani yang menerapkan teknologi pertanian tahun 2023 secara kumulatif sebanyak **19.563.537 petani (85,22%)**. Adapun pengukuran capaian kinerja persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian dihitung dengan formula:

$$= (\Sigma \text{ Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian}) / \Sigma \text{ total petani di wilayah kerja penyuluh pertanian) } 100\%$$

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan teknologi Tahun 2023, sebagai berikut:

$$= (19.563.537 / 22.957.352) \times 100\%$$

$$= 85,22\%$$

Nilai persentase capaian kinerja Januari –Desember 2023 yaitu

$$= (85,22/85) \times 100\%$$

$$= 100,26\% \text{ (sangat berhasil)}$$

Pencapaian keberhasilan penerapan teknologi pertanian oleh **19.563.537 petani (85,22%)** sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan penyuluhan pertanian melalui kegiatan pengawalan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh penyuluh pertanian yang difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP), kegiatan Percontohan Penerapan Teknologi Pertanian melalui Metode



Sekolah Lapang Tematik Pertanian Organik, serta Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) di lokasi SIMURP, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengawasan dan pendampingan serta diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian

Penyuluh Pertanian memiliki kewajiban untuk menyampaikan/mendiseminasikan inovasi teknologi pertanian guna mempengaruhi petani dalam mengadopsi/menerapkan teknologi melalui metode serta teknik-teknik tertentu agar petani memiliki kesadaran dan kemampuannya sendiri untuk menerapkan teknologi pertanian yang disampaikan. Dalam mendukung operasional kegiatan penyuluhan pertanian, maka penyuluh pertanian difasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) setiap bulannya selama 12 bulan. Output dari kegiatan diseminasi teknologi pertanian oleh Penyuluh Pertanian yang difasilitasi BOP hingga pada Desember 2023 adalah penerapan teknologi pertanian oleh **1.114.295 petani** (Lampiran 1) dalam budidaya usahatannya.

2) Sekolah Lapang Tematik Genta Organik

Gerakan Tani Pro-Organik (Genta Organik) merupakan suatu gerakan yang diinisiasi oleh Pusat Penyuluhan Pertanian yang bertujuan untuk menggalakkan pemanfaatan pupuk organik/pupuk hayati/pembenah tanah/pestisida alami sebagai solusi terhadap masalah pupuk mahal. Gerakan ini mendorong petani untuk memproduksi pupuk organik/pupuk hayati/pembenah tanah/pestisida alami secara mandiri. Genta Organik ditargetkan akan membangun 1.020 titik demplot terkait organik serta implementasinya, dimana juga sekaligus meningkatkan peran dan fungsi BPP dalam melaksanakan program penyuluhan pertanian. Genta Organik dijalankan oleh 33 Provinsi, dimana hingga Bulan



Desember 2023 telah terdapat **11.729 petani** yang mengimplementasikan pertanian organik.

Pada umumnya jenis teknologi pertanian yang diterapkan oleh petani berdasarkan hasil diseminasi teknologi melalui pengawalan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian di 34 provinsi dan Sekolah Lapang (SL) Genta Organik di 33 Provinsi, antara lain:

- a. Sistem Tanam Jajar Legowo (Super, 4;1, 2:1)
- b. Pemupukan berimbang
- c. Pembuatan dan penggunaan pupuk organik/kompos/hayati dan pestisida nabati
- d. Pupuk organik padat
- e. Pupuk Organik Cair (POC)
- f. Pembuatan pupuk hayati dengan menggunakan mikroorganisme lokal (MOL)
- g. Pemanfaatan pembenah tanah Biochar dengan memanfaatkan sekam padi
- h. Pembuatan pestisida alami
- i. Teknik budidaya organik

3) Sekolah Lapang (SL) Penerapan Teknologi Climate Smart Agriculture (CSA) di lokasi SIMURP

Kegiatan SL penerapan teknologi CSA menghasilkan 71.632 petani yang menerapkan teknologi yang didukung melalui 3 (tiga) jenis kegiatan antara lain:

- a) CSA Inti: 66.075 petani, dengan jenis teknologi yang diterapkan antara lain PUTS, pemupukan organik (pembuatan kompos), pengelolaan air (AWD), pengolahan tanah, varietas unggul, persemaian dan penanaman (jarwo), csa (GRK), pemupukan, organisme pengganggu tanaman (OPT), pestisida nabati, panen dan pasca panen



- b) Scaliing Up SIMURP: 2.631 petani
- c) CSA Genta Organik: 2.925 petani, dengan jenis teknologi yang diterapkan antara lain:
 - Tanam jajar legowo dengan 2-3 bibit/lubang pada kondisi macak-macak;
 - Pupuk organik;
 - Penggunaan bibit unggul;
 - Penggunaan bibit usia muda;
 - Kalender tanam;
 - Penggunaan perangkat uji tanah sawah;
 - Penertapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - Teknologi irigasi intermitten;
 - Alternate Wetting and Drying (AWD).

b. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

Perkembangan pasar global Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut persaingan kualitas dan profesionalisme tenaga kerja yang kompeten pada bidang-bidang tertentu. Konsekuensi logis dari kondisi ini, menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor pertanian dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan. Sumberdaya manusia pertanian yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya di lapangan sehingga berkorelasi dengan peningkatan produksi dan kesejahteraannya. Disamping itu juga diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mendorong kemajuan pertanian.

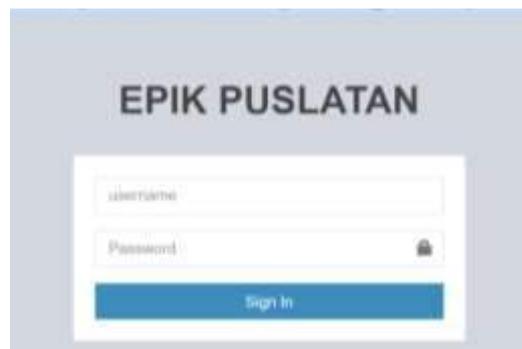


Pengukuran indikator kinerja persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dilakukan melalui data peserta pelatihan yang sudah menerapkan materi pelatihan. Cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Nilai rata-rata dari :

**(Nilai((Σ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) :
(Σ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) \times 100%)**

Dalam mengumpulkan data SDM yang mengikuti Pelatihan dan SDM Pertanian yang menerapkan Materi Pelatihan digunakan aplikasi Elektronik Pemantauan Indikator Kinerja (EPIK) yang bisa diakses oleh peserta pelatihan yang telah memiliki akun pada link <https://new-epik.puslatan.id/> yang mempunyai tampilan beranda sebagai berikut :



Gambar 1. Screen shot Aplikasi EPIK.

Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dimaksudkan adalah realisasi fisik peserta yang mengikuti pelatihan.

Mengacu pada formula perhitungan capaian kinerja tersebut, maka diperoleh data capaian realisasi persentase jumlah petani yang menerapkan materi pelatihan, sebagai berikut:



Tabel 9. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sampai Tahun 2023

NO	SATKER	Σ SDM yang mengikuti pelatihan	ΣSDM yang menerapkan Materi pelatihan	%
1	BBPMKP CIAWI	919	896	97,50
2	BBPKH CINAGARA	1189	1083	91,08
3	BBPP LEMBANG	694	646	93,08
4	BBPP KETINDAN	741	741	100,00
5	BBPP BATU	916	845	92,25
6	BBPP BATANGKALUKU	8078	7014	86,83
7	BBPP BINUANG	790	718	90,89
8	BBPP KUPANG	703	607	86,34
9	BPP JAMBI	510	479	93,92
10	BPP LAMPUNG	2357	2006	84,68
TOTAL		16.897	15.035	88,98

Berdasarkan Tabel 9 diperoleh data jumlah SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan sebanyak 15.035 orang, sedangkan jumlah SDM yang mengikuti pelatihan pertanian sebanyak 16.897 orang. Berdasarkan data tersebut, maka capaian realisasi persentase SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan pada tahun 2022 adalah :

$$\begin{aligned} &= (15.035 / 16.897) \times 100\% \\ &= 88,98\% \end{aligned}$$

Presentase capaian kinerja dihitung dari:

$$\begin{aligned} &= (88,98 / 85) \times 100 \\ &= 104,68\% \text{ (sangat berhasil)} \end{aligned}$$

Target persentase SDM yang menerapkan materi pelatihan tahun 2023 adalah 85% dengan realisasi 88,98%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja SDM yang menerapkan materi pelatihan adalah 104,69% (**sangat berhasil**).



c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian dihitung dari jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dan/atau berwirausaha dan/atau melanjutkan studi pendidikan di bidang pertanian. Lulusan pendidikan vokasi pertanian dimaksud adalah lulusan pendidikan vokasi pertanian dari institusi pendidikan di bawah BPPSDMP (Politeknik dan SMK-PP) pada tahun kelulusan yang dihitung dari Agustus n-1 sampai dengan Agustus tahun berjalan. Realisasi persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian pada Tahun 2023 sudah 88,55% dari target 85%. Rekapitulasi Persentase Lulusan Pendidikan Pertanian yang Bekerja di bidang Pertanian di UPT pada tabel 10.

Tabel 10. Rekapitulasi Jumlah Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang Bekerja di bidang Pertanian

No	Nama UPT	Jml Lulusan TA 2022	Jml Lulusan bekerja di pertanian	%
1.	Polbangtan Medan	197	168	85,28
2.	Polbangtan Bogor	217	187	86,18
3.	Polbangtan Yoma(Yogyakarta)	177	155	87,57
4.	Polbangtan Yoma(Magelang)	139	123	88,49
5.	Polbangtan Malang	244	223	91,39
6.	Polbangtan Gowa	307	262	85,34
7.	Polbangtan Manokwari	103	95	92,23
8.	PEPI	70	63	90,00
9.	SMK-PP Sembawa	118	109	92,37
10.	SMK-PP Banjarbaru	81	71	87,65
11.	SMK-PP Kupang	77	76	98,70
	Total	1.730	1532	88,55

Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian adalah sebagai berikut:



Jumlah Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan (Agustus 2022 s.d Agustus 2023) sebagai pembilang. Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan sebagai penyebut. Hasil pembagian pembilang dan penyebut dalam bentuk persen.

Adapun hasil Penghitungan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian sebagai berikut :

= (Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan) / (Jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian pada tahun kelulusan) x 100%

= 1532 / 1730 x 100%

= 88,55 %

Persentase lulusan yang bekerja dibidang pertanian adalah:

= 88,55 / 85 x 100%

= 104,18%

Data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian diambil dari sistem informasi penelusuran data alumni (Aplikasi *Treser Study*) dan Group WA alumni. Formasi kerja lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain PNS Dinas Pertanian, Wirausaha Pertanian, Perusahaan Swasta dan BUMN yang bergerak dibidang pertanian (misalnya Perkebunan Sawit) dan melanjutkan pendidikan tinggi pertanian (Universitas Negeri/Swasta dan Politeknik Pertanian).

Kendala yang dihadapi dalam pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian antara lain jumlah lulusan yang banyak dari semua Polbangtan dan SMK-PP dan tersebar diberbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni; partisipasi



dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMK-PP dengan cara menyebar link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (*Whatapps, Facebook dan media lainnya*).

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian. Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya merupakan poktan/gapoktan yang ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).

Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Secara umum, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada petani agar berkembang usahatani, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian dipedesaan.

Pembentukan KEP dalam bentuk badan hukum atau lainnya seperti koperasi, Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll, dilakukan melalui



transformasi Poktan/Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani, berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi yang dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani.

Transformasi manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas.

Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Transformasi kelembagaan petani dijelaskan secara ringkas pada gambar 2.



Gambar 2. Transformasi Kelembagaan Petani



Tujuan Pembentukan KEP, antara lain :

- 1) Membentuk organisasi petani berbasis manajemen agribisnis berkarakter perusahaan;
- 2) Peningkatan skala usahatani, daya saing produk dan menguntungkan;
- 3) Mendorong para petani untuk berkelompok besar dalam satu manajemen di level Kecamatan;
- 4) Meningkatkan posisi tawar, pendapatan dan kesejahteraan petani;
- 5) Mendorong terbentuknya usahatani skala ekonomi;
- 6) Memberikan nilai tambah kepada petani dan usahatani;
- 7) Mempermudah akses permodalan, saprodi, dan pemasaran.

Indikator kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah kelembagaan petani (gapoktan) yang menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dengan bentuk Koperasi Tani, Perseroan Terbatas (PT) atau Badan Usaha Milik Petani (BUMP). IKU Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya tahun 2023 ditargetkan mencapai 21% dari jumlah Gapoktan yang terdata dalam aplikasi SIMLUHTAN tahun 2022, yaitu sebanyak 13.557 KEP dari 64.555 gapoktan (meningkat 1% dari tahun 2022).

Berdasarkan hasil perhitungan, capaian kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya tahun 2023 secara kumulatif mencapai **13.596 KEP (21,06%)**. Adapun capaian kinerja utama "Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya" diukur dengan formula pengukuran:

$$= \frac{(\sum \text{Kelembagaan Ekonomi Petani})}{(\sum \text{Total Kelembagaan Gapoktan})} \times 100\%$$

Berdasarkan formula pengukuran IKU tersebut, capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada pada bulan Desember 2023, yaitu :



1. Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sampai dengan Bulan Desember 2023, sebagai berikut
= **$(13.596/64.555) \times 100\%$**
= **21,06%**
2. Persentase capaian kinerja untuk Bulan Desember 2023 adalah :
= **$(21,06/21) \times 100$**
= **100,28% (sangat berhasil)**

Capaian realisasi persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada Bulan Desember tahun 2023 adalah **21,06 %** dari target **21% pada Bulan Desember 2023**. Hal ini menunjukkan bahwa persentase capaian kinerja kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya adalah **100,28% (sangat berhasil)**.

Pencapaian keberhasilan persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya pada tahun 2023 (21,06%) dipengaruhi oleh dukungan kegiatan pengawalan dan pendampingan korporasi yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian.

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Reformasi Birokrasi (RB) menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, terutama di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Untuk menguji sejauh mana keberhasilan rencana aksi (renaksi) RB tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, baik secara general maupun tematik. Evaluasi



ini merupakan langkah kritis untuk menilai efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan serta efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. Reformasi birokrasi general dan tematik merupakan dua fokus dalam reformasi birokrasi yang dikenal dengan "*double track*". RB general berfokus pada perbaikan sistem dan tata Kelola internal instansi pemerintah, sedangkan RB tematik berfokus pada penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah.

Berdasarkan komponen penilaian dan metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa laporan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan Renaksi RB general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian, terutama di BPPSDMP.

Laporan evaluasi Renaksi Reformasi Birokrasi general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023 bertujuan untuk: (1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian RB di lingkup Kementerian Pertanian serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden; (2) Memonitor rencana aksi: tindak lanjut hasil evaluasi RB di lingkup Kementerian Pertanian; (3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian RB; dan (4) Menyusun profil nasional pelaksanaan RB.

Evaluasi renaksi RB general dan tematik dilakukan dengan menggunakan komponen penilaian yang terdiri dari:

a) Dimensi RB General:

- a. Capaian strategi pelaksanaan RB general;
 1. Sub komponen kualitas rencana aksi, serta
 2. Sub komponen implementasi rencana aksi



- b. Capaian implementasi kebijakan percepatan RB; dan
 - 1. 16 indikator pada Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif"
 - 2. 2 indikator pada Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional"
- c. Capaian sasaran strategis RB
 - 1. Sasaran Strategis 1 "Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif": Indeks SPBE; Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan Capaian Akuntabilitas Keuangan.
 - 2. Sasaran Strategis 2 "Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional": SPI; SKM; Indeks BerAKHLAK; dan *Employer Branding*.

b) Dimensi RB Tematik (untuk kementerian/lembaga):

- a. Capaian rencana aksi RB tematik; dan
- b. Capaian indikator dampak RB tematik
 - 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
 - 2. Peningkatan Realisasi Investasi;
 - 3. Tingkat Inflasi;
 - 4. Tingkat Penggunaan PDN; dan
 - 5. Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya.

Berdasarkan komponen penilaian dan metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa laporan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan Renaksi RB general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian, terutama di BPPSDMP.



Penilaian PMPRB menggunakan nilai tahun lalu yaitu tahun 2022 nilai 34,95 dengan capaian 102,79 karena instrumen yang digunakan pada metode penilaian PMPRB tahun 2023 masih dalam penyesuaian.

f. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi yang dilaksanakan oleh BPPSDMP diperoleh dari variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Sumber data dan pihak yang melakukan pengukuran NKA BPPSDMP adalah Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat BPPSDMP dan UPT lingkup BPPSDMP.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Pasal 39 sebagai berikut:

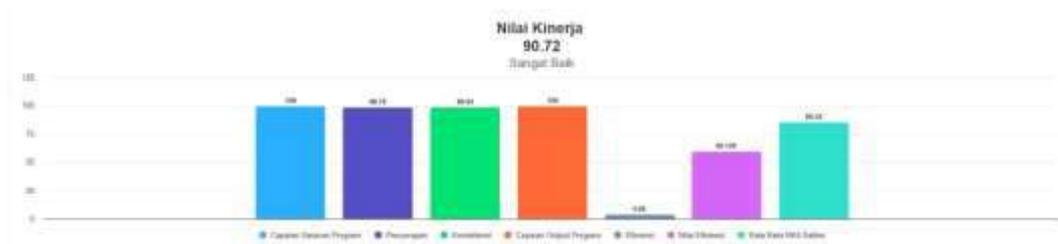
- 1) $90\% > NK \leq 100\%$ kategori Sangat Baik
- 2) $80\% > NK \leq 90\%$ kategori Baik
- 3) $60\% > NK \leq 80\%$ kategori Cukup atau Normal
- 4) $50\% > NK \leq 60\%$ kategori Kurang
- 5) $NK \leq 50\%$ kategori Sangat Kurang

Realisasi NKA BPPSDMP tahun 2023 adalah **90,72** termasuk kategori nilai kinerja (NK) **sangat baik**. Berdasarkan aplikasi SMART Tahun 2023 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2023, total penyerapan anggaran (PA) mencapai 98,78%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan



(RPD) sebesar 98,92%, efisiensi sebesar 4,05 dengan Nilai Efisiensi sebesar 60,12%, capaian output program sebesar 100%, capaian sasaran program sebesar 100%, dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker sebesar 85,35%. Berdasarkan pencapaian tersebut menghasilkan **Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPSDMP Tahun 2023 sebesar 90,72%**, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Dengan demikian, target NKA tahun 2023 sebesar 90,72% sudah tercapai, dan persentase capaian kinerja sebesar **100,13%** kategori **SANGAT BAIK**.

Pencapaian NKA BPPSDMP tahun 2023 ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Pencapaian Kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2023

Target NKA BPPSDMP tahun 2023 adalah **nilai 90,72** sehingga capaian kinerja nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2023 yaitu:

$$\begin{aligned} &= (90,72/90,60) \times 100 \\ &= 100,13\% \text{ (sangat berhasil)} \end{aligned}$$

2. Perbandingan Realisasi Kinerja BPPSDMP 4 (empat) tahun 2020– 2023

Untuk mengetahui kecenderungan Realisasi Kinerja BPPSDMP mulai dari tahun 2020 – 2023 ditampilkan pada Tabel 11.



Tabel 11. Realisasi Kinerja BPPSDMP Tahun 2020 - 2023

No	INDIKATOR KINERJA	2020		2021		2022		2023	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,00	70,19	75,00	75,51	80,00	80,83	85,00	85,22
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	60,00	99,50	75,00	79,92	80,00	90,88	85,00	88,98
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	65,00	76,62	75,00	85,94	80,00	84,46	85,00	88,55
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya (%)	18,00	18,00	19,00	19,83	20,00	20,25	21,00	21,06
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	33,25	34,56	33,50	34,57	33,75	34,95	34,00	34,95
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,00	75,85	91,00	89,87	90,40	90,63	90,60	90,72

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2023

Tabel 11 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun (2020 – 2023) target 6 indikator kinerja BPPSDMP meningkat setiap tahunnya, namun tidak demikian dengan realisasinya. Tahun 2020 dan 2021, dari 6 indikator kinerja, hanya indikator Nilai Kinerja Anggaran yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2020 sebesar 75,85 jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 90,00; sedangkan capaian tahun 2021 sebesar 89,87 lebih rendah dari target 91,00 meskipun sudah masuk dalam kategori berhasil. Namun demikian, di tahun 2022 dan 2023 capaian Nilai Kinerja Anggaran telah mencapai target yang ditetapkan. Selain itu terdapat penurunan realisasi pada indikator persentase SDM pertanian yang meningkatkan kapasitasnya di tahun 2021 namun meningkat Kembali pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan adanya



perubahan dalam perhitungan pengukuran indicator kinerja utama, yang awalnya dihitung dari peserta yang lulus mengikuti pelatihan dan peserta yang lulus uji sertifikasi profesi yang diubah menjadi peserta pelatihan yang telah menerapkan materi pelatihan.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam salah satu pointnya mewajibkan setiap Lembaga pemerintah menyampaikan laporan kinerjanya menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja). Hal ini mengharuskan dilakukan benchmarking sebagai salah satu pertimbangan tempat pelaksanaannya adalah Lembaga tersebut memiliki kesamaan atau kemiripan target output yang dicapainya.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dianggap menjadi Lembaga yang bisa dijadikan sebagai lokasi *benchmarking* tepatnya di badan penyuluhan dan pengembangan Sumberdaya Manusia (BP2SDM). Adapun Capaian Indikator Kinerja Badan P2SDM Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2022 dapat dilihat di table 12.



Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja BP2SDM KLHK tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya saing SDM LHK	Jumlah SDM LHK yang meningkat Kopetensinya (Orang)	2310	2388	103%
		Jumlah Lulusan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (Orang)	470	470	100%
		Jumlah Lembaga/Komunitas serta generasi peduli dan berbudaya Lingkungan hidup (Unit)	176	176	100%
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK/hutan diklat)	Indeks efektivitas Pengelolaan KHDTK/hutan diklat (Nilai)	68	74,86	110%
3.	Meningkatkan Daya Saing Pelaku utama dan Pelaku usaha menuju Masyarakat yang mandiri	Jumlah Kelembagaan kelompok masyarakat yang dikembangkan (Unit)	140	140	100%
		Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan (orang)	1700	1700	100%
4.	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan bidang LHK yang Angkutabel, Responsif dan berpelayanan Prima	Nilai SAKIP BP2SDM (Nilai)	76,00	71,75	94%

Jika dilihat dari capaian BP2SDM Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2022 bahwasannya secara kumulatif total capaian rata-rata 101% dimana hampir semua indikator mencapai target. Ini menunjukkan capaian dari BP2SDM KLHK kategori sangat



berhasil. Namun nilai SAKIP yang masih dibawah target yaitu realisasi 71,75 dengan capaian 94%.

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator dari Badan penyuluhan dan pengembangan Sumberdaya manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian pada tahun yang sama rata-rata capaian BPPSDMP 104,37%. Ini menunjukkan capaian BPPSDMP Kementerian pertanian lebih tinggi sebesar 2,37 %. Hal ini menjelaskan juga bahwa capaian BPPSDMP Kementerian Pertanian berkategori sangat baik.

4. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2022 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024)

Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP pada tahun 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra (2020 sd 2024) pada Tabel 13. Agar lebih mudah membandingkan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020-2022 dengan target 2023-2024, dilakukan proyeksi berdasarkan kecenderungan (trend) realisasi indikator kinerja. Perbandingan tersebut diprediksi bahwa target jangka menengah indikator kinerja akan dapat tercapai sampai dengan tahun 2024, kecuali untuk indikator kinerja anggaran. Jika mengikuti trend realisasi nilai kinerja anggaran, diprediksi target jangka menengah kemungkinan tidak tercapai. Namun, BPPSDMPP telah melakukan upaya upaya agar nilai kinerja anggaran dapat mencapai target. Hal ini terbukti dengan realisasi nilai kinerja anggaran yang mencapai target di tahun 2023.



Tabel 13. Perbandingan realisasi capaian kinerja BPPSDMP tahun 2020 - 2023 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				TARGET MENENGAH
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	70,19	75,51	80,83	85,22	90,00
2	Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	99,50	79,92	90,88	88,98	90,00
3	Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	76,62	85,94	84,46	88,55	90,00
4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	18,00	19,83	20,25	21,06	22,00
5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP	34,56	34,57	34,95	34,95	34,25
6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	75,85	89,87	90,63	90,72	90,80

Sumber Data: BPPSDMP tahun 2023

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta alternatif solusi

a. Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian

Capaian dari indikator kinerja Persentase petani yang menerapkan teknologi Tahun 2023 adalah **85,22% dari target 85%**, sehingga capaian kinerja sebesar **100.26%**.

Dalam penerapan teknologi pertanian sangat penting dalam meningkatkan produktivitas usahatani yang berpeluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan teknologi sangat dipengaruhi oleh diseminasi teknologi karena pada hakikatnya merupakan proses penerimaan inovasi dan teknologi melalui perubahan perilaku petani, baik berupa pengetahuan (*cognitive*), sikap (*affective*) dan keterampilan (*psychomotoric*) petani dalam kegiatan usahatani. Diseminasi sebagai proses penyebaran teknologi (hasil penelitian dan pengkajian) yang mengandung ilmu pengetahuan dan teknologi baru



atau cara baru sangat berkaitan dengan upaya perbaikan cara-cara bertani dan berusaha tani. Penerapan teknologi pertanian berkaitan erat dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tepatnya peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator dan inovator dalam melakukan diseminasi/penyebaran teknologi pertanian kepada petani.

Penyuluh pertanian sebagai inovator berperan dalam penyebarluasan inovasi dan teknologi kepada petani melalui berbagai media dan metode penyuluhan pertanian sehingga outputnya adanya perubahan perilaku, sikap dan keterampilan petani dalam menerima serta menerapkan teknologi pertanian. Dengan penyebarluasan teknologi pertanian yang masif dan intensif oleh penyuluh pertanian kepada petani melalui berbagai kegiatan penyuluhan pertanian maka diinformasikan bahwa pada Tahun 2023 sebanyak **19.563.637 petani** dapat menerapkan teknologi pertanian pada usahatannya.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan tercapainya realisasi persentase petani yang menerapkan teknologi sebesar 85,22%, antara lain adanya upaya dan dukungan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan Pertanian dalam penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah melalui:

- 1) Kegiatan Sekolah Lapang (SL) sebagai wadah/tempat pembelajaran dan diseminasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh poktan dengan sumber anggaran dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi serta Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) melalui proyek SIMURP.
- 2) Dukungan fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh (BOP) selama 12 bulan bagi Penyuluh Pertanian untuk mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan peran serta tugasnya sebagai:
 - a) Inovator dan edukator dalam penyebarluasan/diseminasi teknologi pertanian kepada poktan dan petani binaannya



- b) Fasilitator dalam memfasilitasi petani mengidentifikasi permasalahan usahatani serta dalam kegiatan pengawalan dan pendampingan program Kementerian Pertanian di wilayahnya
- 3) Bimbingan teknis bagi penyuluh pertanian dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluh secara daring
- 4) Diseminasi/penyebarluasan inovasi dan teknologi pertanian secara online/daring melalui:
 - a) Acara "Ngobrol Asyik" (Ngobras) yang dilaksanakan setiap hari Selasa yang sudah terselenggara sebanyak 47 episode.
 - b) Acara "Ngobrol Asyik" (Ngobras) on The Spot (OTS) yang sudah terselenggara sebanyak 10 episode.
 - c) *Ngobras On The Spot* merupakan salah satu bentuk digitalisasi penyuluhan pertanian. Guna mendukung operasional *Ngobras On The Spot*, maka diperlukan sebuah unit mobil yang dilengkapi sarana dan prasarannya. Maka dibuatlah sebuah mobil yang disebut Mobil *Ngobras On The Spot*.
- 5) Penguatan media dan materi penyuluhan pertanian yang disajikan melalui:
 - a) Website Cyber Extension yang merupakan mimbar penyuluhan pertanian untuk pelayanan data serta penyampaian materi dan informasi pertanian khususnya dalam membantu memperlancar dan mempermudah fasilitasi materi kepada penyuluh pertanian dan petani. Materi penyuluhan yang tersedia sebanyak 280 materi



- b) Media cetak : Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya dengan alokasi pembiayaan dari APBN melalui Dana Dekonsentrasi
- 6) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 7) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi melalui anggaran Proyek IPDMIP

Namun dalam upaya pencapaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian" terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

- 1) Disahkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah menyebabkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian tidak satu komando, baik dalam perencanaan hingga implementasinya di kabupaten/kota dan provinsi. Menurut UU Otonomi Daerah bahwa penyuluh pertanian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan belum semua Pemerintah Daerah memiliki perhatian besar terhadap penyuluhan pertanian, bahkan ada daerah yang menganggap pertanian bukan prioritas;
- 2) Berkurangnya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan penguatan BPP, penguatan kapasitas kelembagaan petani, Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dan kapasitas ketenagaan penyuluh pertanian serta penerapan/penguatan metode penyuluhan pertanian;
- 3) Ketersediaan peralatan dan infrastruktur pendukung kegiatan penyuluhan pertanian masih belum memadai, terutama sarana dan



prasaran di Balai Penyuluhan Pertanian sebagai pusat gerakan pembangunan pertanian di kecamatan;

- 4) Belum terintegrasinya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan sistem perencanaan dan sistem penganggaran.

Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa strategi Solusi yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, antara lain:

- 1) Mengoptimalkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah, Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dan K/L lainnya dalam upaya penguatan penyelenggaraan penyuluh pertanian.
- 2) Digitalisasi penyuluhan pertanian untuk efektivitas dan efisiensi diseminasi inovasi, informasi dan materi penyuluhan pertanian melalui fasilitasi sarana IT bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui anggaran APBN serta PHLN (SIMURP dan IPDMIP). Selanjutnya, menyelenggarakan webinar "Menteri Sapa Petani dan Penyuluh" (MSPP) dan Ngobrol Asyik Penyuluhan (NGOBRAS) secara online yang dilakukan secara rutin dan intensif sebagai upaya meningkatkan pengetahuan penyuluh pertanian dan petani terhadap program-program Kementerian Pertanian
- 3) Bimbingan teknis dan pelatihan bagi penyuluh pertanian dan petani untuk mengupayakan peningkatan kapasitas penyuluh dan petani bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Pendidikan Pertanian BPPSDMP;
- 4) Mengoptimalkan koordinasi dengan yang membidangi perencanaan serta anggaran di BPPSDMP terkait sinergitas dan keselarasan antara target Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan dukungan anggaran.



- 5) Mendorong percepatan pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) tema Genta Organik di 33 provinsi untuk meningkatkan motivasi dan perubahan sikap petani dalam menerapkan teknologi.
- 6) Mendorong penyuluh pertanian dalam diseminasi teknologi pertanian dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap output kegiatan tersebut.

b. Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

Persentase capaian dari indikator kinerja sdm pertanian yang meningkat kapasitasnya tahun 2023 adalah **104,68%**, dari target sebesar 85% dan realisasi sebesar **88,98%**.

Langkah untuk mencapai Keberhasilan persentase peningkatan SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya harus didukung oleh:

1. Identifikasi kebutuhan pelatihan;

Pelatihan yang baik akan membawa perubahan kepada pesertanya. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang baik harus dilakukan identifikasi kebutuhan pelatihan yang tepat. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan yang selanjutnya disingkat dengan IKP adalah suatu proses analisis membandingkan antara Standar Kompetensi Kerja (SKK) dengan Kompetensi Kerja Nyata (KKN) untuk mendapatkan kekurangan Kompetensi Kerja (KKK).

2. Metode dan kurikulum pelatihan yang tepat

Metodologi pelatihan ditentukan sesuai dengan sasaran peserta pelatihan yang akan dilatih. Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (*andragogy*), *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA). Pendekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk



ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktek, magang, bermain peran, dan/atau penugasan.

Penyusunan kurikulum didasarkan Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP) masing-masing mata Pelatihan. Penyusunan kurikulum berdasarkan AKP dirinci ke dalam tujuan, sasaran, mata pelatihan; dan silabus. Selain penyusunan kurikulum juga disusun silabus pelatihan. Penyusunan silabus pelatihan didasarkan pada elemen kompetensi, kriteria unjuk kerja (KUK), indikator unjuk kerja, materi pelatihan; dan perkiraan waktu pelatihan. Kurikulum dan silabus dibobot ke dalam perkiraan waktu atau jumlah jam pelajaran.

3. Profesionalisme ketenagaan pelatihan (pengelola pelatihan dan widyaiswara)

Penetapan ketenagaan pelatihan didasarkan pada kesesuaian kompetensi materi, spesialisasi, dan pengalaman yang dimiliki; penguasaan metodologi pembelajaran dan manajemen kelas; kemampuan menyusun Garis Besar Pelaksanaan Pembelajaran, Satuan Acara Pembelajaran, Rencana Proses Pembelajaran (GBPP/SAP/RPP), dan menyiapkan materi pembelajaran; kemampuan menyusun dan menggunakan bahan ajar; kemampuan menilai hasil berlatih peserta; jiwa pengabdian dan tanggung jawab; dan pengutamaan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan bagi pelatih di bidangnya.

4. Prasarana dan sarana pelatihan yang mendukung;

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan disiapkan oleh Penyelenggara Pelatihan untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan pada setiap jenis dan jenjang pelatihan.



5. Peran aktif peserta dalam mengikuti pelatihan

Peserta yang aktif dalam mengikuti pelatihan ikut berperan dalam capaian Indikator Kinerja Sasaan Kegiatan SDM yang meningkat kapasitasnya, ini ditunjukkan antara lain: peserta aktif dalam proses pelatihan baik dikelas maupun pada saat praktek, peserta mempelajari materi yang diberikan, peserta mengerjakan test dengan serius, peserta aktif diskusi dengan peserta lain dalam rangka *sharing experience*

Selain upaya, dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja ditemukan beberapa kendala dan upaya penanggulangannya sebagai berikut:

1. Masih terkendalanya aplikasi epik oleh purnawidya pelatihan baik terkait dengan system aplikasinya ataupun jaringan di lokasi purnawidya. Terkait dengan system aplikasi EPIK yang sampai saat ini belum dapat mengakomodir peserta pelatihan dengan NIK sama yang mengikuti lebih dari 1 kali jenis pelatihan sehingga Peserta dengan NIK yang sama tidak bisa menginput hasil penerapan materi pelatihan lebih dari satu pelatihan di aplikasi EPIK. Upaya yang dilakukan, bagi purnawidya pelatihan dengan NIK yang sama menyampaikan hasil penerapan materi pelatihan secara manual.
2. Identifikasi Kebutuhan pelatihan (IKP) belum dilakukan secara maksimal, ini terkendala dengan tidak adanya anggaran khusus untuk melakukan IKP secara langsung ke calon peserta pelatihan. Upaya yang dilakukan adalah bekerjasama dengan instansi pengirim untuk melakukan IKP calon peserta pelatihan.
3. Perubahan yang dinamis terhadap peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani belum sepenuhnya didukung oleh perubahan petunjuk pelaksanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani sehingga acuan pelaksanaan pelatihan masih mencau pada juklak yang sudah ada. Upaya penanggulangannya adalah dengan menyesuaikan



kearifan local pada materi pelatihan disesuaikan dengan juklak yang ada.

4. Peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihannya masih perlu ditingkatkan, ini terkendala karena tidak ada anggaran khusus untuk peningkatan profesionalisme fasilitator dan ketenagaan pelatihan lainnya. Upaya yang dilakukan, peningkatan profesionalisme dilakukan secara individu/mandiri.
5. Dukungan sarana pembelajaran belum sepenuhnya dapat menunjang pelatihan yang ada, upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana pembelajaran yang tersedia di UPT Pelatihan.

c. Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian

Persentase capaian dari indikator lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian tahun 2023 adalah **104,18%**, dari target sebesar 85% dan realisasi sebesar **88,55%**.

Hal-hal yang bisa mendukung keberhasilan capaian kinerja jumlah lulusan pendidikan vokasi pertanian tahun 2023 yang bekerja di bidang pertanian antara lain:

- 1) Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan, yaitu Politeknik Pembangunan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Vokasi Pertanian dengan tujuan untuk mencetak wirausahawan muda pertanian dan pelaku pertanian.
- 2) Proses pembelajaran yang dilaksanakan di Polbangtan dan SMK-PP menggunakan kurikulum dengan bobot 70 % praktik , 30% teori dan menggunakan model pembelajaran *teaching factory* yang mampu memberikan sesuai dengan program studi dan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI). Adanya alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMK-PP untuk



membelajaran melalui TEFA di Penyelenggaraan Pendidikan.

- 3) Pelaksanaan seminar/kuliah umum dengan mengundang narasumber berpengalaman yang mampu memotivasi dan menginspirasi siswa dan mahasiswa sehingga tumbuh semangat dan kecintaan terhadap dunia pertanian. Adanya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan seminar/kuliah di pada pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi pada Politeknik Pembangunan Pertanian.
- 4) Dukungan program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) yang sangat efektif menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswa dan mahasiswa dalam membangun mental dan semangat berwirausaha selama menjadi peserta didik dibidang pertanian sehingga ketika lulus telah memiliki pola pikir kewirausahaan dan jenis usaha dibidang pertanian yang akan dilakukan setelah lulus. Adanya alokasi anggaran untuk mendukung program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).
- 5) Dukungan kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dibidang pertanian dalam beberapa hal, diantaranya para praktisi/pakar pertanian terlibat dalam penyusunan kurikulum, menjadi dosen/pengajar pada setiap program studi sesuai dengan kompetensi, program magang bagi dosen dan mahasiswa atau siswa di industri. Adanya alokasi anggaran untuk mendukung kerjasama dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dibidang pertanian melalui PKL mahasiswa di tempat DU/DI.
- 6) Dukungan program pemagangan (*retooling*) bagi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan profesional yang dapat memberikan pemahaman dan kompetensi sesuai dengan dunia kerja. Sehingga setelah mengikuti program *retooling* tersebut mahasiswa langsung dilakukan seleksi oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bisa di rekrut sebagai karyawan/pegawai dibidang perkebunan. Adanya alokasi anggaran untuk mendukung program



retooling bagi mahasiswa bekerjasama dengan lembaga pelatihan professional.

- 7) Dukungan dari proses seleksi minat dan bakat dibidang pertanian yang dilakukan pada saat seleksi masuk Polbangtan dan SMK-PP, sehingga mahasiswa dan siswa sudah sejak dari awal masuk perkuliahan sudah memiliki jiwa cinta pertanian. Adanya alokasi anggaran untuk mendukung proses pembelajaran di Polbangtan dan SMK-PP pada Penerimaan Mahasiswa/Siswa baru melalui seleksi minat dan bakat dibidang pertanian.

Faktor yang menjadi kendala pengambilan data lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian antara lain: 1) jumlah lulusan Polbangtan dan SMKPP tersebar di berbagai daerah sehingga memerlukan koordinasi dan komunikasi untuk mendapatkan data terbaru dari masing-masing alumni, 2) Partisipasi dari alumni dalam mengisi sistem informasi penelusuran data alumni belum berjalan dengan maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dan komunikasi ke semua alumni melalui ikatan alumni Polbangtan dan SMKPP dengan cara menyebarkan link atau tautan sistem informasi penelusuran data alumni ke Group media sosial (Whatapps, Facebook dan media lainnya). Selain itu dilakukan monitoring setiap akhir bulan oleh Pusat Pendidikan Pertanian.

d. Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya

Untuk mewujudkan kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP dilakukan dengan pengawalan dan pendampingan serta bersinergi dengan pihak terkait lainnya guna mendukung terwujudnya kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya menjadi KEP.



Capaian dari indikator kinerja persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya Tahun 2023 adalah **21,06% dari target 21%**, sehingga capaian kinerja sebesar **100.28%**.

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, Pusat Penyuluhan Pertanian telah mengupayakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1) Mendorong Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan secara rutin kepada kelembagaan petani di wilayah kerjanya untuk peningkatan kapasitasnya agar dapat ditumbuhkembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:
 - b. Melakukan identifikasi poktan, gapoktan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) terhadap 7 (tujuh) kriteria umum pembentukan KEP, yaitu:
 - Telah melakukan usaha kelompok berorientasi pasar
 - Memiliki unit usaha agribisnis dalam struktur organisasinya;
 - Memiliki rencana usaha;
 - Memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - Telah membangun jejaring pengembangan usaha;
 - Telah membangun kemitraan usaha.
 - b. Merumuskan materi fasilitasi yang dibutuhkan oleh kelembagaan petani berdasarkan hasil identifikasi;
 - c. Memfasilitasi pembelajaran kepada petani calon pengurus dan anggota KEP tentang materi:
 - Pengenalan bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi petani;
 - Manfaat kelembagaan ekonomi petani;
 - Persyaratan dan proses pembentukan kelembagaan ekonomi petani;



- Struktur, tugas, tanggung jawab dan fungsi perangkat organisasi kelembagaan ekonomi petani;
 - Kewajiban dan hak setiap anggota/pemegang saham, pengelola, pengurus, pengawas/komisaris.
- 2) Penyebarluasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cyber extension dan media cetak (Tabloid Sinar Tani dan Majalah Swadaya) yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Tahun 2022;
 - 3) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/online, yaitu melalui Program Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) serta Ngobrol Asyik Penyuluhan Pertanian (NGobras) yang dilakukan secara daring oleh Pusat Penyuluhan Pertanian setiap minggu.
 - 4) Peningkatan sinergitas dengan unit kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) dalam penumbuhkembangan kelembagaan ekonomi petani.

Terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kapasitas kelembagaan petani menjadi KEP, yaitu:

- 1) Tidak tersedia anggaran untuk kegiatan penumbuhan dan pengembangan KEP yang bersumber dari APBN dan APBD;
- 2) Keterbatasan kemampuan penyuluh pertanian dan stake holder lainnya dalam pembentukan KEP;
- 3) Keterbatasan akses kelembagaan petani dan KEP terhadap sumber permodalan, pemasaran dan mitra;
- 4) Kelembagaan petani belum mampu melayani kebutuhan pengembangan agribisnis bagi anggotanya;



- 5) Kelembagaan Ekonomi Petani belum mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya karena belum mampu mengakses sumber-sumber informasi, teknologi, dan pasar.

e. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP

Persentase capaian dari indikator Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP tahun 2023 adalah 102,79%, dari target sebesar 34,00 dan realisasi sebesar 34,95. Penilaian PMPRB tahun 2023 menggunakan nilai tahun lalu yaitu tahun 2022. Karena instrumen yang digunakan pada metode penilaian PMPRB tahun 2023 masih dalam penyesuaian.

Hasil evaluasi rencana aksi RB general dan tematik BPPSDMP Tahun 2023 yang telah dilakukan yaitu:

1. Hasil Pemenuhan Capaian Reformasi Birokrasi General Lingkup BPPSDMP dapat dilihat pada table 14.

Tabel 14. Hasil Pemenuhan Capaian Reformasi Birokrasi General Lingkup BPPSDMP

No	Indikator Road MAP RB	Keterangan
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Pertanian (Kementan) dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2023, keputusan menteri pertanian nomor 278 tahun 2023, keputusan menteri pertanian nomor 279 tahun 2023 dan keputusan menteri pertanian nomor 597 tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan struktur organisasi dilingkup Kementerian pertanian
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	sistem kerja yang dilaksanakan di kementerian pertanian pada tahun 2023 sesuai dengan surat edaran nomor 365/se/kp.340/A/01/2023 tentang sistem kerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian



3	Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	pelaksanaan sistem merit dan sistem manajemen ASN yang digunakan di kementerian pertanian berdasarkan pertauran KASN Nomor 75 Tahun 2023 tentang penetapan kategori, penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan dan peraturan KASN Nomor 123 Tahun 2022 tentang penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkup Kementerian Pertanian
4	Indeks Pelayanan Publik	pelaksanaan public hearing di lingkup BPPSDMP telah diterapkan di seluruh Unit pelaksana teknis dengan jangka waktu maksimal wajib dilaksanakan 3 tahun terakhir setelah publik hearing guna menerima masukan dari pengguna layanan untuk perbaikan kualitas pelayanan yang ada di lingkup BPPSDMP
5	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Standar Pelayanan Publik dibuat sebagai bentuk kepatuhan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menetapkan SK SPP guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis jenis layanan serta informasi pelayanan yang ada di UPT lingkup BPPSDMP
6	Indeks BerAKhlak	Survei Indeks BerAKHLAK yang dilakukan ASN di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) dilaksanakan pada 5 - 7 Oktober 2023. Sebanyak 1.764 pegawai ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK terlibat menjadi responden survei budaya kerja BerAKHLAK. Sementara itu, sebanyak 34 orang dipilih sebagai responden Survei Employee Engagement yang mewakili setiap kelompok jabatan dari berbagai jenjang (JPT, JA, dan JF), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023
7	Survei Kepuasan Masyarakat	Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.080/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan.
8	Nilai SAKIP	Dari hasil penilaian mandiri AKIP BPPSDMP tahun 2022 bahwa BPPSDMP mendapatkan nilai 83,01 dimana nilai tersebut masih memiliki catatan yaitu dokumen tindak lanjut SAKIP tahun 2021 agar segera dipenuhi evidencinya dan juga terkait benchmark Kinerja BPPSDMP dengan instansi lain agar dapat segera dilakukan.



9	Capaian Prioritas Nasional	Realisasi kegiatan RO/KRO lingkup BPPSDMP pada program penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu 80,57%, penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian 77.15%, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 89,75%
10	Capaian IKU	Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2023 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar 88,96%; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar 102,76%; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu 104,51%; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya sebesar 277,66%; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 0%; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 71,03%.
11	Indeks Perencanaan Pembangunan	
12	Tingkat Digitalisasi Arsip	
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Penilaian final indeks tata kelola pengadaan tingkat Kementerian/Lembaga dengan predikat Cukup dengan komponen nilai SIRUP 8,55 , E-tendering 5,00 , E-Purchasing 0,00 , Toko daring 1,00 , Non Tendering 0,00, E - Kontrak 3,98 , Kualifikasi SDM 9,75 , Tingkat kematangan UKPBJ 35,56 , dengan total nilai 63,83
14	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks kualitas kebijakan terdapat di tiap-tiap pusat yang ada di BPPSDMP seperti pusat pendidikan terkait Rancangan Peraturan pedoman Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian, Draf Naskah Kebijakan Permentan Penjaminan Mutu. pada Pusat Pelatihan terdapat Rancangan Permentan Pedoman Pembinaan P4S 2023. Pada pusat penyuluhan terdapat Permamenten Nomor 3 Tahun 2018.
15	Indeks Reformasi Hukum	Kompilasi Peraturan Perundang- Undangan terkait indeks reformasi hukum lingkup Kementerian Pertanian
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan RO/KRO yang telah ditetapkan.
17	Indeks Pengelolaan Aset	Kompilasi data Aset lingkup BPPSDMP
18	Opini BPK	
19	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	
20	Survei Penilaian Integritas	
21	Tingkat Maturitas SPIP	Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Penyuluhan dan



		Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4,465"
22	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Usulkan unit kerja pelaksana teknis sebagai calon WBK/WBBM lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut: 1. PPMKP Ciawi; 2. Polbangan Malang; 3. Polbangan Medan; 4. BBPP Lembang; 5. BBPP Batu; dan 6. BPP Lampung.
23	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kompilasi data pelaporan lingkup BPPSDMP
24	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	Kompilasi peta rencana pelaksanaan SPBE di lingkup BPPSDMP
25	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kompilasi Metadata Statistik di Aplikasi INDAH lingkup BPPSDMP
26	Indeks SPBE	Indeks SPBE lingkup Kementerian Pertanian sebesar 3,75

2. Hasil Capaian Pemenuhan Rencana Aksi Tematik Lingkup BPPSDMP Tahun 2023 dapat dilihat pada table 15.

Tabel 15. Capaian Pemenuhan Rencana Aksi Tematik Lingkup BPPSDMP Tahun 2023.

No	Rincian Kegiatan	Target	% capaian	Kendala Pelaksanaan Renksi
1	Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	4.095 Kelompok Masyarakat	99,98	(1) Satuan target tahunan kelompok masyarakat di dalam petunjuk pelaksanaan berbentuk orang. (2) Target tidak tercapai sebanyak 4.095 orang karena ada beberapa peserta mengundurkan diri



				dan batas waktu sudah berakhir; (3) Belum terdapat pengukuran kepada 4.036 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan
2	Sekolah Lapang Climate Smart Agriculture (CSA)	2.808 Kelompok Masyarakat	62,32	(1) Adanya penyesuaian musim tanam di TW I. (2) Adanya rehab irigasi bendungan menyebabkan perubahan waktu tanam. (3) Belum terdapat pengukuran kepada 1.750 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan
3	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	2.394 Kelompok Masyarakat	72,01	(1) Target tidak tercapai disebabkan a. Menurunnya minat petani sehingga realisasi menjadi 2.373 orang dari target semula 2.394 orang. b. Terdapat 5 kabupaten (Konawe, Toli-Toli, Sanggau, Sambas dan Belu) yang tidak



				meneruskan program sehingga target turun dari 2.373 menjadi 1.724 orang. (2) Belum terdapat pengukuran kepada 1.724 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan.
4	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	33.587 Orang	56,75	(1) Adanya potensi tidak tercapainya target karena waktu yang terbatas. (2) Belum terdapat pengukuran kepada 19.060 orang yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan

f. Nilai kinerja anggaran BPPSDMP

Persentase capaian dari indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah **100,13%**, dari target sebesar 90,60% dan realisasi sebesar **90,72%**.

Kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data terkait pencapaian nilai kinerja:



- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Data capaian output integrasi dari SAS/SAKTI kadang bersifat anomali sehingga masih diperlukan koreksi terhadap data tersebut;
- 3) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% karena masih terdapat 18 satker di daerah yang nilai konsistensinya kurang dari 90%, hal ini disebabkan belum mengacunya pelaksanaan kegiatan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) dan terlambat melakukan revisi RPD pada halaman lembar III DIPA;
- 4) Masih rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO).
- 5) Mulai tahun 2023 sudah tidak ada menu koreksi capaian realisasi output (CRO) pada aplikasi SMART, sehingga apabila ada ketidaksesuaian harus melakukan koordinasi dengan petugas SAKTI yang menginput data capaian output dan harus ada verifikasi dari KPPN untuk persetujuan perbaikan, karena aplikasi SAKTI ada waktu pengisian caput, jika terlambat akan terkunci pada aplikasi SAKTInya;
- 6) Capaian Sasaran Program (CSP) dan Capaian Output Program (COP) adalah data dari capaian IKU BPPSDMP, perhitungan capaian IKU oleh unit kerja eselon II yang menjadi penanggung jawab masing-masing indikator dilakukan secara berkala triwulanan dan beberapa indikator tersebut masih akan dilaksanakan/diukur sampai dengan akhir tahun 2023;
- 7) Konsistensi tidak mencapai 100% dikarenakan masih ada satker yang melakukan revisi kegiatan tapi tidak melakukan revisi pada halaman lembar III DIPAnya;



Dari permasalahan di atas, dalam rangka perbaikan nilai kinerja pada tahun yang akan datang maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan PPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART setiap tahunnya;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD (Rencana Penarikan Dana), agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 4) Memaksimalkan capaian RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya;
- 5) Nilai Kinerja satker didorong untuk lebih ditingkatkan lagi terutama pada aspek CRO dan konsistensi.
- 6) Melakukan pemantauan secara berkala oleh petugas SMART pada CRO di aplikasi SMART, jika partisipasi satker masih kurang maka akan dikoordinasikan kepada petugas SAKTI untuk menyelesaikan caput sebelum waktu penguncian di aplikasi SAKTI;
- 7) Melaporkan capaian IKU pada aplikasi SMART tepat waktu setiap triwulan agar nilai bisa optimal pada triwulan tersebut;
- 8) Pada saat revisi DIPA dibuka, maka melakukan revisi kegiatan sekaligus juga melakukan revisi halaman III DIPAnya agar konsistensi tidak rendah.

Pada tahun 2024 akan ada perubahan mekanisme penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA). Pada tahun sebelumnya NKA Kementerian Pertanian diambil dari nilai kinerja pada aplikasi SMART, Kementerian Keuangan akan merubah NKA menjadi nilai gabungan dari Nilai Kinerja SMART dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Saat ini baru tahap disosialisasikan (tanggal 29 September 2023) Peraturan yang terbaru terkait dengan perubahan tersebut yaitu PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan



Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sementara ini NKA tahun 2023 masih menggunakan mekanisme yang sama dengan tahun 2022.

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Berdasarkan aplikasi SMART yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2023, pencapaian pelaksanaan anggaran Kinerja lingkup BPPSDMP tahun 2023 yaitu 90,72 dari target nilai 90.60.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, eselon I/program, dan satuan kerja/kegiatan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 39 sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Anggaran > 90% dikategorikan dengan Sangat Baik;
- b. Nilai Kinerja Anggaran > 80% - 90% dikategorikan dengan Baik;
- c. Nilai Kinerja Anggaran > 60% - 80% dikategorikan dengan Cukup;
- d. Nilai Kinerja Anggaran > 50% - 60% dikategorikan dengan Kurang;
- e. Nilai Kinerja Anggaran \leq 50% dikategorikan dengan Sangat Kurang.

Capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPPSDMP tahun 2023 berdasarkan aplikasi SMART termasuk dalam kategori nilai kinerja **Sangat baik (NK Anggaran >90%)**. Realisasi kinerja anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah Nilai 90,72 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Capaian Ouput Program = 100
- b. Penyerapan = 98,78
- c. Konsistensi = 98,92
- d. Efisiensi = 4,05
- e. Capaian Sasaran Program = 85,68



f. Rata-rata NKA Satker = 86,15

g. Nilai Efisiensi = 60,12

Analisis efisiensi sumberdaya anggaran berdasarkan PMK Nomor 214/2017 dilakukan penghitungan nilai efisiensi anggaran dengan menggunakan rumus penghitungan berikut :

Rumus :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan : NE = Nilai Efisiensi

E = Efisiensi

Rumus nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa nilai minimal yang dicapai K/L dalam formula efisiensi sebesar -20% dan nilai maksimalnya sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh range nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%. Persentase capaian kinerja BPPSDMP tahun 2023 dalam hal efisiensi adalah mencapai -20%, maka penghitungan nilai efisiensinya adalah :

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + \left(\frac{4,05}{20} \times 50\right) \\ &= 50 + (0,2025 \times 50) \\ &= 50 + 10,125 \\ &= 60,125\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penghitungan tersebut, koefisien nilai efisiensi sumberdaya anggaran BPPSDMP pada tahun 2023 adalah 90,72% (**sangat baik**).

C. Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2023

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah Rp. **1.101.296.884.474,-** dari pagu sebesar Rp. **1.114.893.522.000,-**. Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2023 adalah **98,78%**.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 104.360.399.532,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan



Pertanian yaitu Rp. 381.907.360.872,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 346.611.955.629,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 268.417.128.441,-. Pagu dan realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 ditampilkan di tabel 16.

Tabel 16. Pagu dan Realisasi Anggaran BPPSDMP Tahun 2023

NO	KEGIATAN	ANGGARAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	387.752.821.000	381.907.360.872	98,49
2	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	108.146.320.000	104.360.399.532	96,50
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	348.890.878.000	346.611.995.629	99,35
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	270.103.503.000	268.417.128.441	99,38
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78

Sumber data: Sekretariat BPPSDMP tahun 2023

Realisasi anggaran per output kegiatan tahun 2023 yang tertinggi adalah Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu 99,38%, sedangkan terendah adalah pada Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu 96,50%. Rincian realisasi anggaran masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 17.



Tabel 17. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Tahun 2023

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	110.083.141.000	108.126.367.022	98,22%
2	Dekonsentrasi (DK)	277.669.680.000	273.780.993.850	98,60%
Total		387.752.821.000	381.907.360.872	98,49

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

Tabel 17 menunjukkan bahwa realisasi anggaran kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian tahun 2023 terbagi atas dua kewenangan yaitu kewenangan kantor pusat dalam hal ini Pusat Penyuluhan Pertanian dan Dekonsentrasi. Tahun 2023 realisasi tertinggi anggaran kewenangan dekonstrasi yaitu 98,60% dari Pusat Penyuluhan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 98,22%.

2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 18.

Tabel 18. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian Tahun 2023

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP)	46.134.805.000	43.011.384.713	93,23
2	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	62.011.515.000	61.349.014.819	98,93
Total		108.146.320.000	104.360.399.532	96,49

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

Berdasarkan Tabel 18 terlihat bahwa UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD) mencapai realisasi lebih tinggi yaitu sebesar 98,98% dari Pusat Pelatihan Pertanian/ Kantor Pusat (KP) sebesar 93,23%.



3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian

Realisasi anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian secara rinci ditampilkan pada Tabel 19.

Tabel 19. Persentase Realisasi Anggaran Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Tahun 2023

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	60.067.447.000	59.543.516.586	99,13
2	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	288.823.431.000	287.068.479.043	99,39
	TOTAL	348.890.878.000	346.611.995.629	99,34

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

Persentase realisasi anggaran per *output* kegiatan Pendidikan Pertanian tahun 2023 di UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD) yaitu 99,39% lebih tinggi daripada realisasi anggaran di Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,13%.

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP

Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya secara rinci ditampilkan pada Tabel 20.

Tabel 20. Persentase Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP Tahun 2023

No	Kegiatan / Kewenangan	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sekretariat Badan PPSDMP/Kantor Pusat (KP)	53.625.630.000	53.229.229.676	99,26
2	Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP)	12.012.890.000	12.004.255.000	99,93
3	UPT Pelatihan/ Kantor Daerah (KD)	92.765.349.000	92.347.324.958	99,55



4	UPT Pendidikan/ Kantor Daerah (KD)	111.699.634.000	110.836.318.807	99,23
Total		270.103.503.000	268.417.128.441	99,37

Sumber data. Sekretariat BPPSDMP, tahun 2023

Persentase realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP tahun 2023 yang tertinggi adalah Pusat Pendidikan Pertanian/Kantor Pusat (KP) yaitu 99,93%, sedangkan yang terendah adalah UPT Pendidikan/ Kantor Daerah (KD) yaitu 99,23%.

C. Program BPPSDMP Mendukung Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kementerian Pertanian memiliki program terobosan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin melalui kegiatan pertanian terintegrasi.

Program kegiatan yang dilakukan oleh BPPSDMP pada tahun 2023 dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem meliputi:

1. IPDMIP (Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program)

The Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) memiliki kegiatan bernama "Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas Petani". Kegiatan tersebut telah berhasil mencapai 4.036 kelompok masyarakat dari target tahunan sebanyak 4.095 kelompok masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah



terbentuknya kelompok tani yang terfasilitasi oleh program IPDMIP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mulai bulan Januari—Desember dengan total anggaran sebesar Rp6.122.156.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp6.120.708.761 mencapai capaian sebesar 99,98%.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Pertama, satuan target tahunan kelompok masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan diukur dalam bentuk orang, yang kemungkinan mempersulit pencapaian target. Kedua, target tidak tercapai sepenuhnya karena beberapa peserta mengundurkan diri dan batas waktu pelaksanaan kegiatan sudah berakhir. Ketiga, belum ada pengukuran terhadap 4.036 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan, sehingga belum diketahui secara pasti peningkatan kesejahteraan mereka untuk membantu mengatasi kemiskinan.

Dampak dari permasalahan tersebut adalah belum dapat diketahui secara jelas dampak peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut, sehingga upaya mengatasi kemiskinan juga masih sulit diukur. Perlu adanya evaluasi mendalam dan solusi terhadap permasalahan yang muncul agar ke depannya kegiatan serupa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan.

2. SIMURP (Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project)

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, meningkatkan pengetahuan dan



keterampilan petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim, mengurangi resiko gagal panen, mengurangi efek gas rumah kaca, dan meningkatkan pendapatan petani di Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek SIMURP adalah Sekolah Lapang Climate Smart Agriculture (CSA). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim. Pertanian cerdas iklim adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Tahun 2023, target kegiatan Sekolah Lapang CSA adalah sebanyak 2.808 kelompok masyarakat. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 1.750 kelompok masyarakat, atau sekitar 62,32%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga baru mencapai Rp29,672,232,100 dari total anggaran sebesar Rp35,067,600,000.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang CSA, antara lain:

- Adanya penyesuaian musim tanam di triwulan I, sehingga kegiatan Sekolah Lapang CSA yang seharusnya dilaksanakan pada musim tanam I, harus diundur ke musim tanam II.
- Adanya rehab irigasi bendungan yang menyebabkan perubahan waktu tanam.
- Belum terdapat pengukuran kepada 1.750 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan, sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan.



3. YESS (Youth Entrepreneur and Employment Support Services)

Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Proyek ini bertujuan untuk mendorong kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek YESS adalah Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani muda dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

Tahun 2023, target kegiatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani adalah sebanyak 33.587 orang. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 19.060 orang, atau sekitar 56,75%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga mencapai Rp42,900,000,000 dari total anggaran sebesar Rp83,096,744,398.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, antara lain:

- Adanya potensi tidak tercapainya target karena waktu yang terbatas
- Belum terdapat pengukuran kepada 19.060 orang yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan.



4. READSI (Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative)

Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program READSI adalah Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan teknologi pertanian, termasuk teknologi peningkatan produksi dan teknologi pascapanen.

Tahun 2023, target kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani adalah sebanyak 2.394 kelompok masyarakat. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 1.724 kelompok masyarakat, atau sekitar 72,01%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga mencapai Rp11,906,189,000 dari total anggaran sebesar Rp15,355,357,845.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, antara lain:

- Menurunnya minat petani sehingga realisasi menjadi 2.373 orang dari target semula 2.394 orang.
- Terdapat 5 kabupaten (Konawe, Toli-Toli, Sanggau, Sambas dan Belu) yang tidak meneruskan program sehingga target turun dari 2.373 menjadi 1.724 orang.



BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja BPPSDMP Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2023. Sasaran program BPPSDMP yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja BPPSDMP Tahun 2023 adalah :

1. Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2023 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar **100,26%**; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar **104,68%**; c) Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu **104,18%**; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar **100,28%**; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu **102.79%**; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu **100,13%**.
2. Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 adalah Rp. **1.101.296.884.474,-** dari pagu sebesar Rp. **1.114.893.522.000,-** Persentase realisasi anggaran pagu Tahun 2023 adalah **98,78%**.

Realisasi anggaran BPPSDMP tahun 2023 bila dirinci menurut kegiatan adalah sebagai berikut: Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian yaitu Rp. 104.360.399.532,-; Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yaitu Rp. 378.417.128.441,-; Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian yaitu Rp. 348.611.995.629,-; dan Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya BPPSDMP yaitu Rp. 268.417.128.441,-.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan tercapainya kinerja BPPSDMP tahun 2023 meliputi :



- a. Sasaran program Persentase petani yang menerapkan teknologi. Faktor yang mempengaruhi tercapainya realisasi kinerja sudah melampaui target yaitu sebesar 85,26% dari target 85%.
- b. Sasaran program Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:
 - Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 88,98% sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%.
 - Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian. Realisasi kinerja yaitu sebesar 88,55%, sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%.
- c. Sasaran program Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya. Realisasi kinerja yaitu sebesar 21,06%, sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 21%.
- d. Sasaran program terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima dengan indikator kinerja Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) BPPSDMP tahun 2023 telah mencapai target dengan nilai 34,95 dari target nilai 34,00. Nilai realisasi yang digunakan adalah hasil penilaian tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan instrument penilaian PMP RB tahun 2023 masih dalam proses pengembangan.
- e. Sasaran program terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran realisasinya 90,72% dari target 90,60% sudah mencapai target yang ditentukan.



LANGKAH DIMASA MENDATANG YANG AKAN DILAKSANAKAN ORGANISASI UNTUK MENINGKATAN KINERJANYA

A. Program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kendala dalam melakukan diseminasi inovasi dan teknologi pertanian untuk meningkatkan persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian kedepan adalah sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) bagi Penyuluh Pertanian.
- 2) Penyediaan aplikasi yang terkoneksi dengan internet untuk ketersediaan data, informasi dan materi penyuluhan pertanian
- 3) Penyebarluasan informasi dan materi serta kebijakan penyuluhan atau program utama Kementerian Pertanian secara daring/ *online*.
- 4) Penyebar luasan informasi dan materi penyuluhan melalui media cetak (Tabloid Sinar Tani, Majalah Swadaya dan Trubus) dengan alokasi pembiayaan Dana melalui Dekonsentrasi;
- 5) Optimalisasi layanan penyuluhan di BPP Kostratani dengan meningkatkan 5 (lima) peran kostratani, yaitu sebagai: a) pusat data dan informasi; b) pusat gerakan pembangunan; c) pusat pembelajaran; d) pusat konsultasi agribisnis; dan e) pusat jejaring/kemitraan.
- 6) Bimbingan Teknis bagi Penyuluh Pertanian untuk peningkatan kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- 7) Meningkatkan sinergitas dengan eselon I lainnya maupun Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana IT di BPP Kostratani untuk optimalisasi penguatan tugas dan fungsi serta peran Kostratani sebagai Pusat Data dan Informasi



- B. Upaya dalam kegiatan pembentukan KEP yang akan dilakukan kedepan adalah: 1) Pengawasan dan pendampingan oleh penyuluh pertanian baik di pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa dalam upaya transformasi kelembagaan petani menjadi KEP; 2) Pendampingan dan pembinaan oleh penyuluh pertanian kepada KEP untuk memperluas jejaring kemitraannya sehingga dapat menjadi unit usaha petani yang mampu bersaing dan memiliki posisi yang baik dalam pengelolaan hasil pertanian di kelompoknya; 3) Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan Bimbingan Teknis Penumbuhan dan Pengembangan serta peningkatan kapasitas KEP kepada petugas pendamping dari Dinas Pertanian yang menangani urusan penyuluhan di 100 kabupaten/kota dan 27 provinsi; dan 4) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Penyuluhan Pertanian tetap membangun sinergitas dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam upaya penumbuhan dan pengembangan KEP menuju korporasi;
- C. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya adalah:
- 1) Pusat pelatihan pertanian akan membuat SOP pelaporan realisasi Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan Pertanian sehingga data yang tersaji didalam laporan kinerja akan sama antara Pusat pelatihan dan UPT Pelatihan;
 - 2) Pusat pelatihan pertanian akan menyusun manual perhitungan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2023 untuk memudahkan dan menyamakan cara menyusun capaian IKSK antar UPT;
 - 3) Pusat Pelatihan Pertanian akan mengembangkan aplikasi untuk memudahkan pelaporan capaian kinerja Pusat Pelatihan Pertanian yang diturunkan ke UPT Pelatihan.



D. Dalam rangka mencapai sasaran Pusat Pendidikan Pertanian pada tahun 2023, maka upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan adalah melakukan koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan, pelaksana kegiatan dan SDM yang kompeten serta dukungan dana yang cukup bagi terlaksananya kegiatan serta menyusun *time schedule* pelaksanaan seluruh kegiatan.

Dalam rangka peningkatan lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian upaya yang dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan secara utuh Kurikulum Berbasis Kompetensi khususnya penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan DUDI;
- 2) Menjalin kerja sama yang menguntungkan antara lembaga pendidikan dengan user (pengguna) lulusan yaitu Lembaga Pemerintah, Perusahaan BUMN, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perusahaan Swasta dan lembaga kewirausahaan. Kerja sama yang erat bisa berupa program magang, kunjungan studi, stadium general atau karya ilmiah;
- 3) Lembaga pendidikan perlu melakukan studi penelusuran terhadap lulusannya untuk memudahkan lembaga pendidikan mendeteksi keterpakaian lulusannya;
- 4) Penggunaan sosial media untuk memperlancar arus informasi antara alumni dan pihak sekolah. Sosial media ini bila perlu dikelola oleh pihak sekolah yang memiliki peran humas (Hubungan Masyarakat). Bentuk penggunaan media misalnya membuat grup Facebook yang memberi kesempatan berbagai alumni dan mahasiswa dan siswa berinteraksi dan meng-update info lowongan kerja dan tip-tip sukses di dunia kerja;
- 5) Menumbuhkan program kewirausahaan bagi mahasiswa dan siswa melalui program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP).



- E. Upaya yang akan dilakukan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian mendatang untuk meningkatkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan PPSDMP tahun 2023.
- 1) Melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis untuk peningkatan pelayanan publik dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 2) Reformulasi Tim Agen Perubahan lingkup BPPSDMP;
 - 3) Pelaksanaan Sertifikasi ISO 9001:2015 Pusat Pendidikan Pertanian.
- F. Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran BPPSDMP di tahun mendatang maka Sekretariat Badan PPSDMP akan melakukan upaya sebagai berikut :
- a. Secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya, yang didukung dengan pemantauan dan pembinaan secara intensif dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
 - b. Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
 - c. Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD yang masih dinilai tidak konsisten oleh sistem SMART, agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - d. Perlu memaksimalkan ketercapaian Rincian Output (RO) dengan adanya efisiensi biaya;
 - e. Mendorong peningkatan Nilai Kinerja satker terutama pada aspek konsistensi dan aspek efisiensi.



LAMPIRAN

**PERJANJIAN KINERJA
BPPSDMP TAHUN 2023**



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS www.bppsdp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta 27 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Dedi Nursyamsi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Sasaran Program		Indikator	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	85 %
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
		3	Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	85 %
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	2 %
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	34.00 Nilai
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	80.60 Nilai

Program	Anggaran
i. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	Rp. 645.561.613.000
1 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Rp. 373.696.458.000
2 Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 107.676.317.000
3 Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp. 363.988.838.000
ii. Program Dukungan Manajemen	Rp. 276.264.085.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 276.264.085.000
TOTAL	Rp. 1.121.825.698.000

Jakarta, 27 Oktober 2023

Menteri Pertanian,

Kepala Badan,

Andi Amran Sulaiman 

† Dedi Nursyamsi 



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815460, FAKSIMILI (021) 78039253
SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 November 2023

Pihak Kedua,

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Dedi Nursyamsi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Sasaran Program		Indikator	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	85 %
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
		3	Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	85 %
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21 %
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	34,00 Nilai
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,60 Nilai

Program	Anggaran
I. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	Rp. 844.029.956.000
1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Rp. 367.752.821.000
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 107.569.661.000
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp. 348.807.474.000
II. Program Dukungan Manajemen	Rp. 270.103.503.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 270.103.503.000
TOTAL	Rp. 1.114.133.459.000

Jakarta, 27 November 2023

Menteri Pertanian,

Kepala Badan,

Andi Amran Sulaiman 


Dedi Nursyamsi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONG RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS www.bppsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berlandaskan di bawah ini

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditolapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 4 Desember 2023

Pihak Kedua.

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama.

Dedi Nursyamsi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Sasaran Program		Indikator	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	85 %
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
		3	Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	85 %
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21 %
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	34,00 Nilai
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90,60 Nilai

Program	Anggaran
I. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	Rp. 844.686.819.000
1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Rp. 367.752.821.000
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 108.043.120.000
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp. 348.890.878.000
II. Program Dukungan Manajemen	Rp. 270.103.503.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 270.103.503.000
TOTAL	Rp. 1.114.790.322.000

Jakarta, 4 Desember 2023

Menleri Pertanian,

Kepala Badan,

Andi Amran Sulaiman 


Dadi Nursyamsi



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804386
SITUS : www.bpsdmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedi Nursyamsi
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Amran Sulaiman
Jabatan : Menteri Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Desember 2023

Pihak Kedua,

Andi Amran Sulaiman

Pihak Pertama,

Dedi Nursyamsi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Sasaran Program		Indikator	Target
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	1	Persentase petani yang menerapkan teknologi	85 %
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	2	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	85 %
		3	Persentase lulusan Pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian	85 %
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	4	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	21 %
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien dan berorientasi layanan prima	5	Nilai penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP	34.00 Nilai
5.	Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	6	Nilai kinerja anggaran BPPSDMP	90.60 Nilai

Program	Anggaran
I. Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	Rp. 844.790.019.000
1. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	Rp. 387.752.821.000
2. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	Rp. 108.146.320.000
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	Rp. 348.890.878.000
II. Program Dukungan Manajemen	Rp. 270.103.503.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Rp. 270.103.503.000
TOTAL	Rp. 1.114.893.522.000

Jakarta 14 Desember 2023

Menteri Pertanian,

Andi Amran Sulaiman



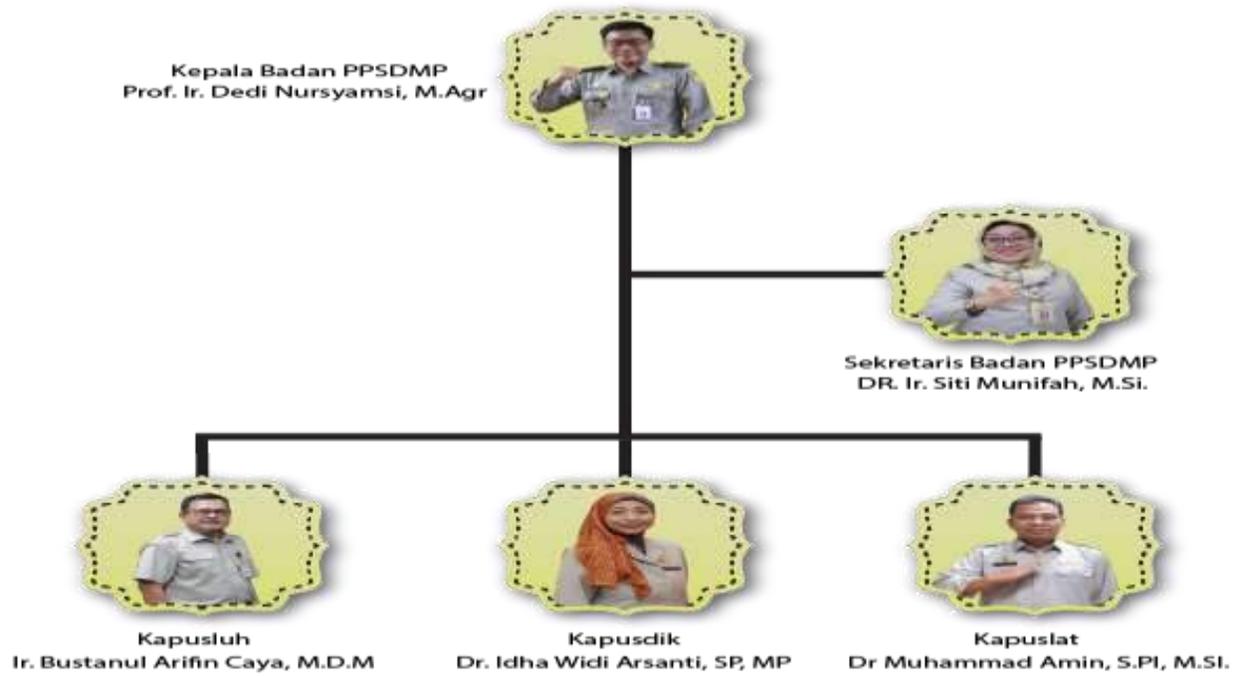
Kepala Badan,

Dedi Nursyamsi



**STRUKTUR ORGANISASI
BPPSDMP TAHUN 2023**

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN



**KEPEGAWAIAN
BPPSDMP TAHUN 2023**



DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN JENIS KELAMIN
Per Desember 2023

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Badan PPSDMP	1	0	1
2	Sekretariat Badan	52	58	110
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	30	31	61
4	Pusat Pendidikan Pertanian	13	20	33
5	Pusat Pelatihan Pertanian	16	18	34
6	Balai Besar Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	76	38	114
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	36	42	78
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	74	52	126
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	103	83	186
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	82	49	131
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	61	40	101
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	39	34	73
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	51	42	93
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	42	19	61
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	42	24	66
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	38	33	71
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	42	24	66
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	27	14	41
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	27	21	48
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	38	26	64
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	32	21	53
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	45	28	73
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	30	19	49
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	29	13	42
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	28	9	37
TOTAL PEGAWAI BPPSDMP		1,054	758	1,812

Jakarta, Desember 2023
Ketua Tim Kerja Kepegawaian/
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.
NIP. 197607142002121002



**DISTRIBUSI PEGAWAI BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
Per Desember 2023**

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan											Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	Badan PPSDMP	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat Badan	2	30	46	-	-	10	-	-	19	1	2	110
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	4	23	28	-	-	1	-	-	5	-	-	61
4	Pusat Pendidikan Pertanian	3	13	11	-	-	2	-	1	3	-	-	33
5	Pusat Pelatihan Pertanian	2	18	9	-	-	2	-	-	3	-	-	34
6	Pusat Pelatihan Manajemen Dan Kepemimpinan Pertanian	7	26	20	-	-	3	1	-	36	13	8	114
7	Politeknik Pembangunan Pertanian Medan	9	34	17	3	-	5	-	-	10	-	-	78
8	Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor	21	40	16	12	-	4	-	-	23	4	6	126
9	Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang	21	66	38	22	-	10	-	-	25	4	-	186
10	Politeknik Pembangunan Pertanian Malang	24	40	19	12	-	8	-	-	28	-	-	131
11	Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa	13	49	20	17	-	1	-	-	1	-	-	101
12	Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari	8	27	21	9	-	5	-	-	-	-	3	73
13	Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang	2	44	26	3	-	5	-	-	13	-	-	93
14	Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara	1	22	19	2	-	4	-	-	6	2	5	61
15	Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	7	29	11	7	-	3	-	-	7	1	1	66
16	Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan	4	24	22	8	-	4	-	-	7	1	1	71
17	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku	-	29	20	-	-	1	-	-	14	2	-	66
18	Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang	1	19	6	2	-	4	-	-	7	2	-	41
19	Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang	1	18	10	5	-	3	-	-	9	-	2	48
20	Balai Pelatihan Pertanian Jambi	-	24	16	7	-	1	-	-	14	1	1	64
21	Balai Pelatihan Pertanian Lampung	2	22	18	-	-	3	-	-	7	1	-	53
22	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Sembawa	1	25	24	5	-	2	-	-	15	-	1	73
23	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru	-	18	10	4	-	4	-	-	12	1	-	49
24	SMK - Pertanian Pembangunan Negeri Kupang	1	15	12	7	-	3	-	-	4	-	-	42
25	Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia	7	20	5	1	-	4	-	-	-	-	-	37
TOTAL		142	675	444	126	-	92	1	1	268	33	30	1,812

Jakarta, Desember 2023
Ketua Tim Kerja Kepegawaian/
Analisis Kepegawaian Muda

Suhanda, S.AP., M.AP.
NIP. 197607142002121002

**ANGGARAN
BPPSDMP TAHUN 2023**

**PERKEMBANGAN REALISASI ANGGARAN LINGKUP BPPSDMP
PERIODE SD 31 DESEMBER 2023**

I REALISASI KEGIATAN UTAMA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	108.146.320.000	104.360.399.532	96,50%	3.785.920.468	3,50%
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	387.752.821.000	381.907.360.872	98,49%	5.845.460.128	1,51%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	348.890.878.000	346.611.995.629	99,35%	2.278.882.371	0,65%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	270.103.503.000	268.417.128.441	99,38%	1.686.374.559	0,62%
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78%	13.596.637.526	1,22%

II REALISASI BELANJA

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI	133.286.759.000	132.521.444.353	99,43%	765.314.647	0,57%
2	BELANJA BARANG	950.468.025.000	937.847.224.116	98,67%	12.620.800.884	1,33%
3	BELANJA MODAL	31.138.738.000	30.928.216.005	99,32%	210.521.995	0,68%
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78%	13.596.637.526	1,22%

III REALISASI KEWENANGAN

NO	JENIS KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	KANTOR PUSAT	281.923.913.000	275.914.752.997	97,87%	6.009.160.003	2,13%
2	KANTOR DAERAH	555.299.929.000	551.599.137.627	99,33%	3.700.791.373	0,67%
3	DEKONSENTRASI	277.669.680.000	273.782.993.850	98,60%	3.886.686.150	1,40%
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78%	13.596.637.526	1,22%

IV REALISASI SUMBER DANA

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	RUPIAH MURNI	803.586.613.000	795.572.747.393	99,00%	8.013.865.607	1,00%
2	PINJAMAN LUAR NEGERI	291.180.148.000	286.435.156.316	98,37%	4.744.991.684	1,63%
3	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	13.280.868.000	12.475.845.754	93,94%	805.022.246	6,06%
4	HIBAH LUAR NEGERI	6.170.000.000	6.137.242.011	99,47%	32.757.989	0,53%
5	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI	675.893.000	675.893.000	100,00%	-	0,00%
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78%	13.596.637.526	1,22%

V REALISASI KEGIATAN PER KEWENANGAN

NO	KEGIATAN / KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN	387.752.821.000	381.907.360.872	98,49%	5.845.460.128	1,51%
a	Pusat Penyuluhan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	110.083.141.000	108.126.367.022	98,22%	1.956.773.978	1,78%
b	Dekonsentrasi (DK)	277.669.680.000	273.780.993.850	98,60%	3.888.686.150	1,40%
2	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN	108.146.320.000	104.360.399.532	96,50%	3.785.920.468	3,50%
a	Pusat Pelatihan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	46.134.805.000	43.011.384.713	93,23%	3.123.420.287	6,77%
b	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	62.011.515.000	61.349.014.819	98,93%	662.500.181	1,07%
3	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN	348.890.878.000	346.611.995.629	99,35%	2.278.882.371	0,65%
a	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	60.067.447.000	59.543.516.586	99,13%	523.930.414	0,87%
b	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	288.823.431.000	287.068.479.043	99,39%	1.754.951.957	0,61%
4	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP	270.103.503.000	268.417.128.441	99,38%	1.686.374.559	0,62%
a	Sekretariat Badan PPSDMP / Kantor Pusat (KP)	53.625.630.000	53.229.229.676	99,26%	396.400.324	0,74%
b	Pusat Pendidikan Pertanian / Kantor Pusat (KP)	12.012.890.000	12.004.255.000	99,93%	8.635.000	0,07%
c	UPT Pelatihan / Kantor Daerah (KD)	92.765.349.000	92.347.324.958	99,55%	418.024.042	0,45%
d	UPT Pendidikan / Kantor Daerah (KD)	111.699.634.000	110.836.318.807	99,23%	863.315.193	0,77%
	TOTAL	1.114.893.522.000	1.101.296.884.474	98,78%	13.596.637.526	1,22%

VI REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PELATIHAN PERTANIAN

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	120040 BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	10.209.237.000	10.138.657.454	99,31%	70.579.546	0,69%
2	237200 BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP)	23.745.671.000	23.714.649.597	99,87%	31.021.403	0,13%
3	239640 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	8.514.307.000	8.329.208.688	97,83%	185.098.312	2,17%
4	239654 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	13.214.385.000	13.194.611.198	99,85%	19.773.802	0,15%
5	239661 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	39.787.116.000	39.740.024.041	99,88%	47.091.959	0,12%
6	239675 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	14.305.167.000	14.291.414.229	99,90%	13.752.771	0,10%
7	239701 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	14.131.534.000	13.979.954.682	98,93%	151.579.318	1,07%
8	394771 BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	9.885.182.000	9.724.454.224	98,37%	160.727.776	1,63%
9	412075 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	12.338.016.000	12.028.974.945	97,50%	309.041.055	2,50%
10	412081 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	8.646.249.000	8.554.390.719	98,94%	91.858.281	1,06%
	TOTAL	154.776.864.000	153.696.339.777	99,30%	1.080.524.223	0,70%

VII REALISASI SATKER KANTOR DAERAH/UPT PENDIDIKAN PERTANIAN

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	237814 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	17.253.927.000	17.240.610.224	99,92%	13.316.776	0,08%
2	237924 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	34.940.786.000	34.849.009.301	99,74%	91.776.699	0,26%
3	412101 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	11.169.184.000	11.051.213.435	98,94%	117.970.565	1,06%
	TOTAL	400.523.065.000	397.904.797.850	99,35%	2.618.267.150	0,65%

VIII REALISASI SATKER KANTOR PUSAT

NO	ESELON II	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	46.134.805.000	43.011.384.713	93,23%	3.123.420.287	6,77%
2	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	110.083.141.000	108.126.367.022	98,22%	1.956.773.978	1,78%
3	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	53.625.630.000	53.229.229.676	99,26%	396.400.324	0,74%
4	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	72.080.337.000	71.547.771.586	99,26%	532.565.414	0,74%
	TOTAL	281.923.913.000	275.914.752.997	97,87%	6.009.160.003	2,13%

IX REALISASI SATKER DEKONSENTRASI

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
13	345105 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3.215.654.000	3.015.744.000	93,78%	199.910.000	6,22%
14	403450 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	4.922.384.000	4.891.386.700	99,37%	30.997.300	0,63%
15	403452 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	5.942.429.000	5.927.203.600	99,74%	15.225.400	0,26%
16	403455 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3.016.966.000	3.016.351.110	99,98%	614.890	0,02%
17	403457 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14.024.934.000	13.268.242.200	94,60%	756.691.800	5,40%
18	403458 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	4.496.771.000	4.458.971.900	99,16%	37.799.100	0,84%
19	417675 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1.285.622.000	1.255.953.176	97,69%	29.668.824	2,31%
20	417996 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9.922.537.000	9.693.216.672	97,69%	229.320.328	2,31%
21	417998 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	14.722.516.000	14.332.384.767	97,35%	390.131.233	2,65%
22	417999 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	16.575.807.000	16.389.056.284	98,87%	186.750.716	1,13%
23	418000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	6.982.303.000	6.891.107.100	98,69%	91.195.900	1,31%
24	418009 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	10.646.092.000	10.308.455.161	96,83%	337.636.839	3,17%
25	418010 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3.014.188.000	3.004.935.440	99,69%	9.252.560	0,31%
26	418011 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	33.564.534.000	33.373.161.285	99,43%	191.372.715	0,57%
27	418013 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5.686.022.000	5.651.020.739	99,38%	35.001.261	0,62%
28	418014 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6.155.246.000	6.147.129.399	99,87%	8.116.601	0,13%
29	418018 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	3.067.800.000	3.041.222.024	99,13%	26.577.976	0,87%
30	418019 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	526.782.000	526.611.548	99,97%	170.452	0,03%
31	418020 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	6.693.010.000	6.637.112.730	99,16%	55.897.270	0,84%
32	418021 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	25.512.592.000	25.179.716.100	98,70%	332.875.900	1,30%
33	418022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	7.605.308.000	7.587.038.000	99,76%	18.270.000	0,24%
34	418024 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4.516.371.000	4.426.290.000	98,01%	90.081.000	1,99%
	TOTAL	277.669.680.000	273.780.993.850	98,60%	3.888.686.150	1,40%

EVIDANCE IKU

1. Persentase Petani Yang Menerapkan Teknologi
2. Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya
3. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian Yang Bekerja Di Bidang Pertanian
4. Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatkan Kapasitasnya
5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP
6. Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

BPSDMP TAHUN 2023

**PERSENTASE PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN DARI KEGIATAN FASILITASI BOP
TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
1	ACEH	2,352	58,800	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan Penyakit tanaman terpadu 5. Teknik budidaya organic 6. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 7. Mekanisasi pertanian
2	SUMATERA UTARA	2,125	53,125	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk hayati 5. Pengairan secara efektif dan efisien, 6. Panen tepat waktu, 7. Penggunaan alat dan mesin pertanian
3	SUMATERA BARAT	1,013	25,325	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk hayati 5. Pengolahan tanah 6. Penggunaan alat dan mesin pertanian
4	RIAU	642	16,050	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan benih unggul dan bermutu 2. Penggunaan pupuk organik 3. Pemupukan berimbang, 4. Pengelolaan tanah sempurna, 5. Pengelolaan OPT terpadu 6. Pengairan secara efektif dan efisien 7. Mekanisasi pertanian
5	JAMBI	764	19,100	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2:1 2. Pengaturan sistem tanam 3. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
6	SUMATERA SELATAN	1,352	33,800	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian
7	BENGKULU	770	19,250	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian
8	LAMPUNG	1,085	27,125	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	282	7,050	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 7. Alat dan mesin pertanian
10	KEPULAUAN RIAU	48	1,200	Cabae Merah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu 2. Pemupukan berimbang, 3. Pengelolaan tanah sempurna, 4. Pengelolaan OPT Terpadu
11	DKI JAKARTA	45	1,125	Florikultura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Varietas unggul baru 2. Inovasi florikultura 3. Urban farming

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
12	JAWA BARAT	2,475	68,293	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penerapan biodekomposer 5. Penggunaan pupuk hayati 6. Pengolahan tanah 7. Pengendalian hama wereng batang coklat 8. Pengendalian hama tikus 9. Penggunaan alat dan mesin pertanian
13	JAWA TENGAH	3,252	87,718	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penerapan biodekomposer 5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang 6. Pengolahan tanah 7. Penggunaan alat dan mesin pertanian
14	DI YOGYAKARTA	382	9,550	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian
15	JAWA TIMUR	3,368	90,617	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian
16	BANTEN	316	7,900	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
17	BALI	423	10,575	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian
18	NUSA TENGGARA BARAT	1,080	27,000	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian penyakit Blas 4. Pemilahan benih menggunakan larutan ZA 5. legowo 4:1; 40 cm x (20 cm x 10 cm) = 40 rumpun 6. Penggunaan PUTS mengukur kebutuhan pupuk
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1,680	42,000	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penggunaan pupuk hayati 5. Penggunaan alat dan mesin pertanian
20	KALIMANTAN BARAT	888	22,200	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian
21	KALIMANTAN TENGAH	774	19,350	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
22	KALIMANTAN SELATAN	1,010	25,250	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
23	KALIMANTAN TIMUR	616	15,400	Padi Sawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu 2. Pemupukan berimbang, 3. Pengelolaan tanah sempurna, 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)
24	KALIMANTAN UTARA	167	4,175	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penerapan biodekomposer 5. Penggunaan pupuk hayati
25	SULAWESI UTARA	694	17,350	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian
26	SULAWESI TENGAH	1,202	30,050	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penerapan biodekomposer 5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang 6. Pengolahan tanah 7. Penggunaan alat dan mesin pertanian

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
27	SULAWESI SELATAN	2,095	52,375	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benih unggul dan bermutu, 2. Penggunaan pupuk organik, 3. Pemupukan berimbang, 4. Pengaturan populasi (jarwo/hazton/tegel), 5. Pengelolaan tanah sempurna, 6. Pengelolaan OPT terpadu, 7. Penggunaan bibit muda, 8. Panen tepat waktu,
28	SULAWESI TENGGARA	817	20,425	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo 2. Penggunaan Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 4. Penerapan biodekomposer 5. Penggunaan pupuk hayati dan pemupukan berimbang 6. Pengolahan tanah dan pangairan yang baik 7. Penggunaan alat dan mesin pertanian
29	GORONTALO	428	10,700	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
30	SULAWESI BARAT	471	11,775	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem tanam jajar legowo super 2. Varietas Unggul Baru (VUB) 3. Biodekomposer 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Alat dan mesin pertanian
31	MALUKU	520	13,000	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu 2. Pemupukan berimbang, 3. Pengelolaan tanah sempurna, 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 6. Mekanisasi pertanian

NO	PROVINSI	JUMLAH PENYULUH (PNS, PPPK, THL-TBPP)	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI	KOMODITAS	PENERAPAN TEKNOLOGI
32	MALUKU UTARA	446	11,150	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman sistem jarwo super 2. Penggunaan benih unggul dan bermutu 3. Penerapan biodekomposer 4. Pengendalian hama dan penyakit tanaman terpadu 5. Penerapan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 6. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 7. Mekanisasi pertanian
33	PAPUA BARAT	420	10,500	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Benih unggul dan bermutu spesifik lokal 2. Pemupukan berimbang, 3. Pengelolaan tanah sempurna, 4. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT)
34	PAPUA	397	9,925	Padi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanah sempurna, 2. Pengendalian Organisasi Pengganggu Tanaman (OPT) 3. Penggunaan pupuk hayati dan berimbang 4. Varietas Unggul Baru (VUB) spesifik lokal 5. Mekanisasi pertanian
TOTAL		34,399	879,228		

**PERSENTASE PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PADA KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN GENTA ORGANIK YANG BERSUMBER DARI DANA DEKONSENTRASI
TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL			
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI PER POKTAN	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL SL	PRODUKTIVITAS SEBELUM SL (TON/HA)	PRODUKTIVITAS SETELAH SL (TON/HA)
	DEKONSENTRASI	102	314	1,020	292		9,529		
1	ACEH	4	12	40	40	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	1,600	6	6
2	SUMATERA UTARA	3	15	30	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	30	5	6
3	SUMATERA BARAT	3	3	30	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	750	6.6	7
4	RIAU	3	12	30	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	90	3.8	5.6
5	JAMBI	2	2	20	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	5.5	5.5
6	SUMATERA SELATAN	6	24	60	25	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	1,500	4,5	5,4
7	BENGGULU	2	15	20	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	5	5.40

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL			
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI PER POKTAN	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL SL	PRODUKTIVITAS SEBELUM SL (TON/HA)	PRODUKTIVITAS SETELAH SL (TON/HA)
8	LAMPUNG	4	12	40	20	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	769	7	10
9	KEP. BANGKA BELITUNG	1	5	10	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	50	3	4
10	KEP. RIAU	1	1	10	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	10	3,5	4
11	JAWA BARAT	9	9	90	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	90	6	8
12	JAWA TENGAH	9	9	90	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	90	6	7
13	DI YOGYAKARTA	1	2	10	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	50	5	6
14	JAWA TIMUR	5	30	50	25	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	1,250	6	7
15	BANTEN	3	18	30	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	150	5	5.2
16	BALI	2	12	20	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	60	63	71

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL			
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI PER POKTAN	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL SL	PRODUKTIVITAS SEBELUM SL (TON/HA)	PRODUKTIVITAS SETELAH SL (TON/HA)
17	NUSA TENGGARA BARAT	3	5	30	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	90	5	8
18	NUSA TENGGARA TIMUR	3	17	30	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	90	5	6.5
19	KALIMANTAN BARAT	2	2	20	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	60	4	4
20	KALIMANTAN TENGAH	2	4	20	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	5	6
21	KALIMANTAN SELATAN	2	10	20	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	5.6	7.7
22	KALIMANTAN TIMUR	2	10	20	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	4.55	5.25
23	KALIMANTAN UTARA	1	8	10	3	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	40	5	6
24	SULAWESI UTARA	3	10	30	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	150	3	4-5
25	SULAWESI TENGAH	3	3	30	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenh Tanah dan Pestisida nabati/organik	500	5,3	8,2

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL			
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI PER POKTAN	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL SL	PRODUKTIVITAS SEBELUM SL (TON/HA)	PRODUKTIVITAS SETELAH SL (TON/HA)
26	SULAWESI SELATAN	7	8	70	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	350	6	8
27	SULAWESI TENGGARA	4	12	40	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	400	3.6	5.3
28	GORONTALO	3	10	30	4	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	120	3.5	4.1
29	SULAWESI BARAT	1	5	10	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	40	5.5	7.5
30	MALUKU	2	15	20	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	200	5	6
31	MALUKU UTARA	2	4	20	5	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	100	4	5
32	PAPUA	2	5	20	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	200	4	5
33	PAPUA BARAT	2	5	20	10	Pembuatan pupuk Padat dan organik cair, pembuatan pupuk hayati menggunakan MOL, pembuatan Pembenah Tanah dan Pestisida nabati/organik	200	4	5

**PERSENTASE PETANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PADA KEGIATAN SEKOLAH LAPANGAN YANG BERSUMBER DARI SIMURP
TAHUN 2023**

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK					HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
	PHLN SIMURP	117	864	2,808	42,840	32,751,410	
1	SUMATERA UTARA	8	76	192	1,920	368,640	Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah
2	SUMATERA SELATAN	2	17	48	480	23,040	Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL	
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
3	JAWA BARAT	37	232	888	8,880	7,885,440	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>
4	JAWA TENGAH	42	282	1,008	22,320	22,498,560	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK					HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
5	JAWA TIMUR	4	18	96	960	92,160	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>
6	KALIMANTAN TENGAH	1	6	24	240	5,760	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK					HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
7	SULAWESI SELATAN	14	120	336	4,800	1,612,800	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK				HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL	
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
8	SULAWESI TENGGARA	2	17	48	1,200	57,600	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>
9	NUSA TENGGARA BARAT	6	83	144	1,440	207,360	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>

NO	PROVINSI	REALISASI FISIK					HASIL PENERAPAN TEKNOLOGI SL
		JML BPP	JML PENYULUH PENDAMPING	JML POKTAN	JML PETANI YG MENERAPKAN TEKNOLOGI HASIL	JML PETANI SL	JENIS TEKNOLOGI/ MATERI PEMBELAJARAN
10	NUSA TENGGARA TIMUR	1	13	24	600	50	<p>Optimalisasi dan Tata Kelola Lahan dan Air di Daerah Rawa, Penerapan CSA dalam Agribisnis High Value</p> <p>Crops, Teknologi Irigasi Intermittent dan AWD di Lahan Padi Sawah iklim, Penggunaan varietas unggul baru yang adaptif terhadap perubahan iklim, Penentuan Waktu Tanam Berdasarkan Kalender</p> <p>Tanam, Teknologi Jajar Legowo (penggunaan bibit unggul, penggunaan bibit usia muda dengan 2 – 3 bibit/lubang, penggunaan sistem lorong 2:1, 4:1 atau disesuaikan kondisi lapangan/spesifik lokasi dan social budaya, Pembuatan dan Penggunaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah pertanian yang berada disekitar lahan (pembuatan dan penggunaan kompos, pupuk organik insitu, Mikro Organisme Lokal/MOL), Penggunaan pupuk berimbang melalui penggunaan PUTS/PUTR/PUTK, Pengendalian OPT mengutamakan penggunaan pestisida nabati, agensi hayati, pemanfaatan burung hantu, Pengukuran GRK Lahan Sawah</p>

CAPAIAN KINERJA TERKAIT IKSK
Tahun anggaran 2023

Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya 2023
 Bulan Desember 2023

NO	SATKER	∑ Total SDM yang mengikuti pelatihan	∑ SDM Pertanian yang menerapkan materi pelatihan	persentase
1	PPMKP CIAWI	919	896	97,50
2	BBPKH CINAGARA	1189	1083	91,08
3	BBPP LEMBANG	694	646	93,08
4	BBPP KETINDAN	741	741	100,00
5	BBPP BATU	916	845	92,25
6	BBPP BATANGKALUKU	8078	7014	86,83
7	BBPP BINUANG	790	718	90,89
8	BBPP KUPANG	703	607	86,34
9	BPP JAMBI	510	479	93,92
10	BPP LAMPUNG	2357	2006	85,11
TOTAL		16.897	15.035	88,98

Formula/Cara menghitung Capaian IKSK

Nilai ((∑ SDM pertanian yang menerapkan materi pelatihan) / (∑ total SDM yang mengikuti pelatihan pertanian) X 100%)

= (15028 / 16890) x 100% = 88,98%

Jadi Capaian IKSK Pusat Pelatihan Pertanian bulan Desember 2023 adalah 88,98%

**JUMLAH KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI
S.D BULAN DESEMBER 2023**

NO	PROVINSI	JUMLAH KEP		DELTA (PENAMBAHAN DI TAHUN 2023)
		2022	2023	
1	ACEH	604	603	
2	BALI	65	68	3
3	BANTEN	140	144	4
4	BENGKULU	108	112	4
5	DI YOGYAKARTA	448	466	18
6	DKI JAKARTA	6	6	
7	GORONTALO	40	43	3
8	JAMBI	313	326	13
9	JAWA BARAT	1,387	1,455	45
10	JAWA TENGAH	2,482	2,581	61
11	JAWA TIMUR	1,407	1,457	50
12	KALIMANTAN BARAT	200	183	
13	KALIMANTAN SELATAN	305	325	20
14	KALIMANTAN TENGAH	143	144	1
15	KALIMANTAN TIMUR	78	80	2
16	KALIMANTAN UTARA	53	54	1
17	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	31	31	
18	KEPULAUAN RIAU	19	20	1
19	LAMPUNG	227	235	8
20	MALUKU	28	97	50
21	MALUKU UTARA	17	16	
22	NUSA TENGGARA BARAT	586	614	28
23	NUSA TENGGARA TIMUR	427	444	17
24	PAPUA	38	38	
25	PAPUA BARAT	22	22	
26	RIAU	173	180	7
27	SULAWESI BARAT	712	740	28
28	SULAWESI SELATAN	763	797	34
29	SULAWESI TENGAH	188	202	14
30	SULAWESI TENGGARA	465	440	
31	SULAWESI UTARA	63	67	4
32	SUMATERA BARAT	309	322	13
33	SUMATERA SELATAN	682	721	39
34	SUMATERA UTARA	541	563	22
TOTAL		13,070	13,596	490

CAPAIAN IKU BPPSDMP - PENDIDIKAN 2022/2023

No	Instansi	Jumlah Lulusan	Mendapat					Total Lulusan Yang Dibantu di Sektor Pertanian	Persentase Lulusan Yang Dibantu di Sektor Pertanian	Tingkat-tingkat / Keterampilan / Keterampilan	Alokasi Luas (hektar)	Tingkat Kejuruan Peserta didik yang terdapat Peningkatan Pengetahuan Mula Lulusan 4			
			Berkas di Penitilahan (PNS/TH/ATI)	Berkas di Sektor Pertanian Swasta	Emasifikasi Pertanian	Membuat Studi	Berkas di luar Sektor Pertanian					Berkas di luar Sektor Pertanian	Tingkat (PK)	Kategori Semester 1	Kategori Semester 2
1	Padaangan Medan	387	2	97	63	6	23	8	168	60,28%	Tercapai	0	3,4	3,53	3,5
2	Padaangan Bogor	217	22	123	48	4	17	13	167	66,28%	Tercapai	0	3,4	3,5	3,6
3	Padaangan Yora (Pegunungan)	317	58	60	21	5	16	8	155	67,57%	Tercapai	0	3,4	3,51	3,6
4	Padaangan Yora (Megalang)	130	32	40	40	2	7	9	129	88,45%	Tercapai	0	3,4	3,51	3,6
5	Padaangan Malang	264	19	187	14	3	13	8	223	81,29%	Tercapai	0	3,4	3,49	3,6
6	Padaangan Gowa	307	0	7	216	29	0	45	262	85,28%	Tercapai	0	3,4	3,52	3,4
7	Padaangan Meruwari	202	7	7	80	1	7	1	99	60,29%	Tercapai	0	3,4	3,43	3,4
8	PTN	70	36	23	20	4	5	2	63	50,00%	Tercapai	0	3,4	3,54	3,6
9	Sektor Sarawak	118	3	61	11	24	3	6	109	92,37%	Tercapai	0	3,4	3,72	3,7
10	Sektor Darqabaru	81		15	23	33	9	1	71	87,65%	Tercapai	0	3,4	3,61	3,6
11	Sektor Kumpang	77			34	42	1		78	80,70%	Tercapai	0	3,4	3,6	3,6
		1.738	150	628	590	173	97	101	1332	80,59%			3,4	3,53	3,6

Jakarta, 23 Januari 2024

Mengucapkan,

Ketua Kelompok Program dan Kerjasama Pendidikan



Sapertha S. TP., M.Si
Nip. 197712232003122001



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



LAPORAN EVALUASI RENAKSI REFORMASI BIROKRASI GENERAL DAN TEMATIK

LINGKUP BPPSDMP TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang berdampak kepada masyarakat dan pembangunan nasional, menciptakan reformasi birokrasi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta bisa menggambarkan sebab akibat pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian Pertanian telah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024.

Sebagai instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi terdiri atas evaluasi internal dan evaluasi eksternal, yaitu:

1. Evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal pada tahap Perencanaan reformasi birokrasi (*ex-ante*) dan evaluasi pada tahap pelaksanaan reformasi birokrasi (*on-going*); dan
2. Evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional (*ex-post*), yang meliputi:
 - a. Reformasi General meliputi capaian strategi pelaksanaan dan capaian implementasi kebijakan RB General, serta capaian sasaran strategis reformasi birokrasi; dan
 - b. Reformasi Birokrasi Tematik meliputi strategi pelaksanaan dan capaian dampak RB Tematik.

Laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP merupakan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik lingkup BPPSDMP tahun 2023 dengan berbagai pemenuhan indikator yang sudah ditentukan.

Reformasi Birokrasi General meliputi Penyederhanaan Birokrasi, Tingkat Capaian Sistem Kerja, Indeks Sistem Merit, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Berakhlak, SKM, Nilai SAKIP, Capaian Prioritas Nasional, Capaian IKU, Indeks Perencanaan Pembangunan, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Indeks Pengelolaan Aset, Opini BPK, TL Rekomendasi BPK, SPI, Maturitas SPIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI, TL Pengaduan Masyarakat, Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Statistik Sektorial Dan Indeks SPBE.

Reformasi Birokrasi Tematik yang digunakan di BPPSDMP yaitu menggunakan tema pengentasan kemiskinan meliputi 4 PHLN yaitu IPDMIP, SIMURP, READSI dan YESS

Jakarta, 31 Desember 2023
Sekretaris Badan,

Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
I. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan	5
3. Ruang Lingkup	6
II. BPPSDMP	7
III. Reformasi Birokrasi Lingkup BPPSDMP	11
1. Hasil Pemenuhan Capaian Reformasi Birokrasi General Lingkup BPPSDMP.....	11
2. Capaian Pemenuhan Rencana Aksi Tematik Lingkup BPPSDMP..	31
IV. PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Evaluasi Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Evaluasi ini akan menjadi pelengkap dari perencanaan dan implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah yang akan mendorong proses perbaikan berkelanjutan. Untuk memastikan evaluasi terus terjaga kualitas dan efektivitasnya, evaluator perlu terus meningkatkan kapasitasnya dan secara konsisten mengikuti isu-isu bidang reformasi birokrasi yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini bertujuan agar evaluator dapat lebih memberikan kontribusi untuk perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi stakeholder utama mereka.

Reformasi Birokrasi (RB) menjadi landasan penting dalam meningkatkan kinerja Kementerian Pertanian, terutama di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP). Untuk menguji sejauh mana keberhasilan rencana aksi (renaksi) RB tersebut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, baik secara general maupun tematik. Evaluasi ini merupakan langkah kritis untuk menilai efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap peningkatan pelayanan serta efisiensi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. Reformasi birokrasi general dan tematik merupakan dua fokus dalam reformasi birokrasi yang dikenal dengan “*double track*”. RB general berfokus pada perbaikan sistem dan tata Kelola internal instansi pemerintah, sedangkan RB tematik berfokus pada penyelesaian isu nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, dan administrasi pemerintah.

Evaluasi renaksi RB general dan tematik dilakukan dengan menggunakan komponen penilaian yang terdiri dari:

A. Dimensi RB General:

- a. Capaian strategi pelaksanaan RB general;
 1. Sub komponen kualitas rencana aksi, serta
 2. Sub komponen implementasi rencana aksi
- b. Capaian implementasi kebijakan percepatan RB; dan
 1. 16 indikator pada Sasaran Strategis 1 “Terciptanya Tata Kelola

- Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”
2. 2 indikator pada Sasaran Strategis 2 “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional”
- c. Capaian sarana strategis RB
1. Sasaran Strategis 1 “Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif”: Indeks SPBE; Capaian Akuntabilitas Kinerja; dan Capaian Akuntabilitas Keuangan.
 2. Sasaran Strategis 2 “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional”: SPI; SKM; Indeks BerAKHLAK; dan *Employer Branding*.

B. Dimensi RB Tematik (untuk kementerian/lembaga):

- a. Capaian rencana aksi RB tematik; dan
- b. Capaian indikator dampak RB tematik
 1. Penurunan Tingkat Kemiskinan;
 2. Peningkatan Realisasi Investasi;
 3. Tingkat Inflasi;
 4. Tingkat Penggunaan PDN; dan
 5. Menyesuaikan dengan fokus RB Tematik Digitalisasi Pemerintahan setiap tahunnya.

Berdasarkan komponen penilaian dan metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa laporan evaluasi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian, tantangan, dan rekomendasi perbaikan Renaksi RB general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian, terutama di BPPSDMP.

2. Tujuan

Laporan evaluasi Renaksi Reformasi Birokrasi general dan tematik di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023 bertujuan untuk:

- A. **Memperoleh informasi** tentang pelaksanaan dan pencapaian RB di lingkup Kementerian Pertanian serta dampaknya terhadap permasalahan strategis di masyarakat dan prioritas aktual Presiden;
- B. **Memonitor rencana aksi:** tindak lanjut hasil evaluasi RB di lingkup

Kementerian Pertanian;

- C. **Memberikan saran perbaikan** untuk meningkatkan pencapaian RB; dan
- D. **Menyusun profil nasional** pelaksanaan RB.

3. Ruang Lingkup

Seluruh ASN lingkup Kementerian Pertanian melaksanakan pemenuhan data terkait pelaksana Reformasi Birokrasi.

BAB II

BPPSDMP

Indikator Kinerja dalam 2020-2024 (PERPRES nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024) dan Indikator Kinerja Menteri Pertanian yang didelegasikan oleh Kementerian Pertanian kepada BPPSDMP meliputi:

1. Persentase petani yang menerapkan teknologi (persen)
2. Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (persen) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya (orang)

Untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan, maka BPPSDMP menetapkan tujuan:

1. Penguatan dan pengembangan penyuluhan serta korporasi petani untuk peningkatan penerapan teknologi oleh petani, dengan indikator tujuan :
 - a) Persentase petani yang menerapkan teknologi dengan target 70 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
 - b) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya dengan target 18 % (th. 2020) sampai dengan 22 % (th. 2024).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia pertanian, dengan indikator Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya dengan target 60 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (th. 2024).
3. Penyelenggaraan pendidikan, penumbuhan dan pengembangan wirausaha muda pertanian untuk peningkatan kualitas lulusan pendidikan vokasi pertanian, dengan indikator Persentase lulusan Pendidikan Vokasi pertanian yang bekerja dibidang pertanian dengan target 65 % (th. 2020) sampai dengan 90 % (tahun 2024).
4. Peningkatan Reformasi Birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien, dengan indikator Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPPSDMP dengan target nilai 33,25 (th 2020) sampai dengan nilai 34,25 (th. 2024).
5. Pengelolaan Anggaran BPPSDMP yang akuntabel dan berkualitas, dengan indikator Nilai kinerja anggaran BPPSDMP dengan target nilai 90 (th. 2020) sampai dengan 90,80 (th. 2024).

Sasaran

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memperhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai dalam periode Tahun 2020-2024 adalah:

SS1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a) Peningkatan Ketersediaan Pangan Strategis dalam Negeri
- b) Peningkatan Akses Pangan
- c) Peningkatan Konsumsi Pangan Berkualitas
- d) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan Pangan
- e) Persentase Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Dampak Perubahan Iklim yang Ditangani Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis
- f) Persentase Tindak Lanjut Terhadap Temuan OPTK, HPHK dan Keamanan Hayati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang Ditetapkan
- g) Persentase Kasus Pelanggaran Perkarantinaan yang Diselesaikan
- h) Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian
- i) Tingkat Kemanfaatan Sarana Produksi Pertanian

SS2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian

- j) Tingkat Kemanfaatan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- k) Pertumbuhan Nilai Ekspor untuk Produk Pertanian Nasional

SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

- l) Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dimanfaatkan
- m) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi

SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional

- n) Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya
- o) Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya

SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel

p) Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian

q) Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Kementerian Pertanian 2020 – 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan PPSDMP, sebagai berikut:

SS3. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Persentase Petani yang Menerapkan Teknologi.

SS4. Meningkatnya Kualitas SDM dan Kelembagaan Pertanian Nasional, dengan IKSS Persentase SDM Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya dan Persentase Kelembagaan Petani yang Meningkatkan Kapasitasnya

SS5. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif dan Efisien, serta Anggaran yang Akuntabel, dengan IKSS Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dan Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Pertanian

Berdasarkan IKU Kementerian Pertanian yang didelegasikan kepada BPPSDMP dan tugas fungsi BPPSDMP, maka Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) yang ingin dicapai BPPSDMP dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

SP1. Termanfaatkannya teknologi pertanian dengan indikator kinerja: Persentase petani yang menerapkan teknologi

SP2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkatkan kapasitasnya, dan Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di sektor pertanian

SP3. Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja Persentase kelembagaan petani yang meningkatkan kapasitasnya

SP4. Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan indikator kinerja: Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPPSDMP

SP5. Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas, dengan indikator kinerja: Nilai Kinerja Anggaran BPPSDMP

Indikator Kinerja Sasaran Program di atas merupakan alat ukur yang mengindikasikan pencapaian sasaran program BPPSDMP dengan target. 2020-2024. Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai rumusan dari sasaran pembangunan SDM pertanian yang ada di dalam Renstra BPPSDMP sesuai dengan tugas dan fungsi BPPSDMP diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Secara lengkap ditampilkan di dalam lampiran Renstra BPPSDMP. Untuk mencapai sasaran BPPSDMP jangka menengah 2020-2024, ditetapkan 3 (tiga) Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, yaitu:

- a) Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani),
- b) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Penumbuhan Pengusaha Pertanian Milenial, dan
- c) Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendukung Program Utama Kementerian Pertanian.

Program Utama Kementerian Pertanian yang didukung oleh Program Aksi BPPSDMP tahun 2020-2024, adalah:

- a) Pengembangan Kostratani dan pembangunan SDM pertanian melalui pendidikan dan pelatihan vokasi;
- b) Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan;
- c) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Berbasis Korporasi;
- d) Pengembangan Kawasan Hortikultura Berdaya Saing;
- e) Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan;
- f) Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas;
- g) Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit;
- h) Pengentasan daerah rentan rawan pangan (family farming, Pertanian Masuk Sekolah, diversifikasi pangan) serta distribusi dan pengendalian harga pangan pokok; serta
- i) Penguatan layanan perkarantinaaan dan akselerasi ekspor melalui program Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor.

BAB III

REFORMASI BIROKRASI LINGKUP BPPSDMP

1. Hasil Pemenuhan Capaian Reformasi Birokrasi General Lingkup BPPSDMP

Data Pemenuhan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General				
No	Indikator dalam Road Map RB	PENANGGUNG JAWAB	Bitly	Keterangan
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	https://bit.ly/PersentasePenyederhanaanStrukturOrganisasi	Penyederhanaan struktur organisasi Kementerian Pertanian (Kementan) dilakukan pada tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2023, keputusan menteri pertanian nomor 278 tahun 2023, keputusan menteri pertanian nomor 279 tahun 2023 dan keputusan menteri pertanian nomor 597 tahun 2023 sebagai dasar pelaksanaan struktur

				organisasi dilingkup Kementerian pertanian
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	bit.ly/TingkatCapaianSistemKerjauntukPenyederhanaanBirokrasi	sistem kerja yang dilaksanakan di kementerian pertanian pada tahun 2023 sesuai dengan surat edaran nomor 365/se/kp.340/A/01/2023 tentang sistem kerja pegawai lingkup Kementerian Pertanian
3	Indeks Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN	Tim Kerja Kepegawaian	https://bit.ly/47dJrWW	pelaksanaan sistem merit dan sistem manajemen ASN yang digunakan di menterian pertanian berdasarkan pertauran KASN Nomor 75 Tahun 2023 tentang penetapan kategori, penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan dan peraturan KASN Nomor 123 Tahun 2022 tentang

				penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkup Kementerian Pertanian
4	Indeks Pelayanan Publik	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	https://bit.ly/IndeksPelayananPublik-GoogleDrive	pelaksanaan public hearing di lingkup BPPSDMP telah diterapkan di seluruh Unit pelaksana teknis dengan jangka waktu maksimal wajib dilaksanakan 3 tahun terakhir setelah publik hearing guna menerima masukan dari pengguna layanan untuk perbaiki kualitas pelayanan yang ada di lingkup BPPSDMP
5	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	https://bit.ly/TingkatKepatuhanStandarPelayananPublik	Standar Pelayanan Publik dibuat sebagai bentuk kepatuhan unit kerja untuk memberikan pelayanan yang maksimal berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menetapkan SK SPP guna memberikan informasi kepada masyarakat terkait jenis jenis layanan

				serta informasi pelayanan yang ada di UPT lingkup BPPSDMP
6	Indeks BerAkhlak	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksanai	https://bit.ly/IndeksBerAkhlak	Survei Indeks BerAKHLAK yang dilakukan ASN di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) dilaksanakan pada 5 - 7 Oktober 2023. Sebanyak 1.764 pegawai ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK terlibat menjadi responden survei budaya kerja BerAKHLAK. Sementara itu, sebanyak 34 orang dipilih sebagai responden Survei Employee Engagement yang mewakili setiap kelompok jabatan dari berbagai jenjang (JPT, JA, dan JF), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023

7	Survei Kepuasan Masyarakat	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	https://bit.ly/3RudkfJ	Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDM) adalah dengan melakukan pengukuran kepuasan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.080/4/2018 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan.
8	Nilai SAKIP	Kelompok Subtansi	https://bit.ly/3TtOY8J	Dari hasil penilaian mandiri AKIP BPPSDMP tahun 2022 bahwa BPPSDMP mendapatkan nilai

		Evaluasi dan Pelaporan		83,01 dimana nilai tersebut masih memiliki catatan yaitu dokumen tindak lanjut SAKIP tahun 2021 agar segera dipenuhi evidencenya dan juga terkait benchmark Kinerja BPPSDMP dengan intansi lain agar dapat segera dilakukan.
9	Capaian Prioritas Nasional	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/CapaianPrioritasNasional	Realisasi kegiatan RO/KRO lingkup BPPSDMP pada program penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yaitu 80,57%, penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian 77.15%, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian 89,75%
10	Capaian IKU	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/48st1uH	Persentase capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BPPSDMP Tahun 2023 adalah: a) Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian sebesar 88,96%; b) Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya sebesar 102,76%; c) Persentase lulusan

				pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian yaitu 104,51%; d) Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya sebesar 277,66%; e) Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP yaitu 0%; dan f) Nilai kinerja anggaran BPPSDMP yaitu 71,03%.
11	Indeks Perencanaan Pembangunan	Kelompok Subtansi Perencanaan	Lingkup Kementerian Pertanian	
12	Tingkat Digitalisasi Arsip	Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga	Lingkup Kementerian Pertanian	
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Tim Kerja Barang Milik Negara	https://bit.ly/IndeksTataKelolaPengadaan	Penilaian final indeks tata kelola pengadaan tingkat Kementerian/Lembaga dengan predikat Cukup dengan komponen nilai SIRUP 8,55 , E-tendering 5,00 , E-Purchasing 0,00 , Toko daring 1,00 , Non Tendering 0,00, E - Kontrak 3,98 , Kualifikasi SDM

				9,75 , Tingkat kematangan UKPBJ 35,56 , dengan total nilai 63,83
14	Indeks Kualitas Kebijakan	Tim Kerja Hukum	https://bit.ly/IndeksKualitasKEBIJAKAN	Indeks kualitas kebijakan terdapat di tiap-tiap pusat yang ada di BPPSDMP seperti pusat pendidikan terkait Rancangan Peraturan pedoman Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian, Draf Naskah Kebijakan Permentan Penjaminan Mutu. pada Pusat Pelatihan terdapat Rancangan Permentan Pedoman Pembinaan P4S 2023. Pada pusat penyuluhan terdapat Permanten Nomor 3 Tahun 2018.
15	Indeks Reformasi Hukum	Tim Kerja Hukum	https://bit.ly/IndeksReformasiHukum	Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan terkait indeks reformasi hukum lingkup Kementerian Pertanian
16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Tim Kerja Anggaran	https://bit.ly/IndikatorKinerjaPelaksanaanAnggaran	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran sesuai dengan RO/KRO yang telah ditetapkan.
17	Indeks Pengelolaan Aset	Tim Kerja Barang Milik Negara	https://bit.ly/IndeksPengelolaanASET	Kompilasi data Aset lingkup BPPSDMP

18	Opini BPK	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	Lingkup Kementerian Pertanian	
19	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	Lingkup Kementerian Pertanian	
20	Survei Penilaian Integritas	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	Lingkup Kementerian Pertanian	
21	Tingkat Maturitas SPIP	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/TingkatMaturitasSPIP	Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian

				menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,465”
22	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana	https://bit.ly/TingkatKeberhasilanPembangunanZI	Usulkan unit kerja pelaksana teknis sebagai calon WBK/WBBM lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebagai berikut: 1. PPMKP Ciawi; 2. Polbangtan Malang; 3. Polbangtan Medan; 4. BBPP Lembang; 5. BBPP Batu; dan 6. BPP Lampung.
23	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/TingkattindaklanjutpengaduanmasyarakatatLAPORyangsudahdiselesaikan	Kompilasi data pelaporan lingkup BPPSDMP
24	Tingkat Implementasi	Kelompok Subtansi	https://bit.ly/TingkatImplementasiKebijakanArsitekturSPBE	Kompilasi peta rencana pelaksanaan SPBE di linngkup BPPSDMP

	Kebijakan Arsitektur SPBE	Evaluasi dan Pelaporan		
25	Tingkat Kematangan Penyelenggar aan Statistik Sektoral	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/TingkatKematanganPenyelenggaraanStatistikSektoral	Kompilasi Metadata Statistik di Aplikasi INDAH lingkup BPPSDMP
26	Indeks SPBE	Kelompok Subtansi Evaluasi dan Pelaporan	https://bit.ly/IndeksSPBEKementan	Indeks SPBE lingkup Kementerian Pertanian sebesar 3,75

Pelaksanaan Pemenuhan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi General .

A. Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan indeks kepuasan masyarakat yang telah dilaksanakan di laksanakan di Unit Pelaksana Teknis Lingkup BPPSDMP telah mencapai nilai dari hasil pelaksanaan survei dari Semester 1 dan Semester 2 sebagai berikut:

No	Nama UPT	IKM Semester 1			IKM Semester 2			IKM Tahun 2023
		Nilai Indeks	Unsur Tertinggi	Unsur Terendah	Nilai Indeks	Unsur Tertinggi	Unsur Terendah	
1	PPMKP Ciawi	3,88	U4 (Biaya/tarif)	U2 (Prosedur)	3,81	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U9 (Sarana dan Prasarana)	3,85
2	Polbangtan Malang	3,49	U7 (Perilaku Pelaksana)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,64	U7 (Perilaku Pelaksana)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,56
3	Polbangtan Bogor	3,5	U4 (Biaya/tarif)	U9 (Sarana dan Prasarana)	3,63	U7 (Perilaku Pelaksana)	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	3,56
4	Polbangtan Medan	3,53	U4 (Biaya/tarif)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,56	U4 (Biaya/tarif)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,55
5	Polbangtan Manokwari	3,43	U9 (Sarana dan Prasarana)	U1 (Persyaratan)	3,40	U4 (Biaya/tarif)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,41
6	Polbangtan Gowa	3,32	U9 (Sarana dan Prasarana)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,02	U4 (Biaya/tarif)	U9 (Sarana dan Prasarana)	3,17

7	Polbangtan Yoma	3,47	U9 (Sarana dan Prasarana)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,60	U4 (Biaya/tarif)	U1 (Persyaratan)	3,54
8	BBPP Lembang	3,93	U7 (Perilaku Pelaksana)	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	3,06	U9 (Sarana dan Prasarana)	U4 (Biaya/tarif)	3,49
9	BBPP Batangkaluku	3,62	U4 (Biaya/tarif)	U9 (Sarana dan Prasarana)	3,60	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,61
10	BBPP Batu	3,53	U4 (Biaya/tarif)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,92	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,73
11	BBPP Ketindan	3,86	U9 (Sarana dan Prasarana)	U1 (Persyaratan)	3,86	U9 (Sarana dan Prasarana)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,86
12	BBPKH Cinagara	3,57	U9 (Sarana dan Prasarana)	U4 (Biaya/tarif)	3,69	U9 (Sarana dan Prasarana)	U4 (Biaya/tarif)	3,63
13	BBPP Kupang	3,38	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,93	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U5 (Produk layanan)	3,66

14	BBPP Binuang	3,93	U9 (Sarana dan Prasarana)	U5 (Produk layanan)	3,93	U4 (Biaya/tarif)	U5 (Produk layanan)	3,93
15	Bapeltan Jambi	3,94	U1 (Persyaratan)	U5 (Produk layanan)	3,95	U2 (Prosedur)	U5 (Produk layanan)	3,95
16	Bapeltan Lampung	3,8	U6 (Kompetensi pelaksana)	U4 (Biaya/tarif)	3,89	U3 (Waktu Pelayanan)	U4 (Biaya/tarif)	3,84
17	SMK-PP Sembawa	3,72	U2 (Prosedur)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,69	U2 (Prosedur)	U9 (Sarana dan Prasarana)	3,71
18	SMK-PP Banjarbaru	3,61	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,67	U8 (Penanganan Pengaduan, Saran, dan Keluhan)	U3 (Waktu Pelayanan)	3,64
19	SMK-PP Kupang	3,6	U9 (Sarana dan Prasarana)	U1 (Persyaratan)	3,61	U9 (Sarana dan Prasarana)	U2 (Prosedur)	3,60
20	PEPI	3,54	U9 (Sarana dan Prasarana)	U2 (Prosedur)	3,65	U4 (Biaya/tarif)	U2 (Prosedur)	3,60

B. Indeks BerAKHALK

Survei Indeks BerAKHLAK yang dilakukan ASN di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDMP) dilaksanakan pada 5—7 Oktober 2023. Sebanyak 1.764 pegawai ASN, yang terdiri atas PNS dan PPPK terlibat menjadi responden survei budaya kerja BerAKHLAK. Sementara itu, sebanyak 34 orang dipilih sebagai responden Survei *Employee Engagement* yang mewakili setiap kelompok jabatan dari berbagai jenjang (JPT, JA, dan JF), yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023. Adapun jumlah responden yang mengisi Survei Indeks BerAKHLAK sebagai berikut:

No	Unit Pelaksana Teknis	Jumlah Pegawai
1	Employee Engagement	34
2	Sekretariat Badan	104
3	Pusat Penyuluhan Pertanian	53
4	Pusat Pendidikan Pertanian	33
5	Pusat Pelatihan Pertanian	33
6	BBPMKP Ciawi	113
7	Polbangtan Medan	76
8	Polbangtan Bogor	123
9	Polbangtan Yogyakarta- Magelang	182
10	Polbangtan Malang	130
11	Polbangtan Gowa	98
12	Polbangtan Manokwari	67
13	BBPP Lembang	91
14	BBPKH Cinagara	58
15	BBPP Batu	66
16	BBPP Ketindan	72
17	BBPP Batangkaluku	63
18	BBPP Binnuang	40
19	BBPP Kupang	49
20	Bapeltan Jambi	64
21	Bapeltan Lampung	51
22	SMK-PPN Sembawa	73
23	SMK-PPN Banjarbaru	48
24	SMK-PPN Kupang	42
25	PEPI	35
TOTAL		1.764

Sementara, sebanyak 34 responden yang dipilih sebagai responden Survei *Employee Engagement* sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1	Dr.Ir. Siti Munifah, M.Si.	Sekretaris Badan	Sekretariat Badan PPSDMP
2	Dr. Ir. Muhammad Amin, S.Pi., M.Si	Kepala Pusat	Pusat Pelatihan Pertanian
3	Purnadi, SP., MP	Kepala Bagian Umum (Pusat)	Sekretariat Badan PPSDMP
4	Yovita Rina Irianingrum, SE	Kepala Bagian Umum (UPT)	Polbangtan Manokwari
5	Sjaifurahman, S.E.	Kepala Bagian Umum (UPT)	BBPP Batu
6	Farulian Purba, S.ST.,M.Pd., M.P.	Kepala Subbagian (UPT)	SMK PPN Sembawa
7	Johan Pujiyanto, SE	Kepala Subbagian (UPT)	SMK PPN Banjarbaru
8	Sitti Kamalia Kamal, S.Pt, M.Si	Kepala Subbagian (UPT0)	SMK PPN Kupang
9	Ngasiran, S.Pt., M.Kom.	Kepala Subbagian (UPT)	Bapeltan Jambi
10	Leli Hartini, S.TP	Kepala Subbagian (UPT)	Bapeltan Lampung
11	Yoceu Hadi Novianti S.P., M.M.	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian Pusat Penyuluh Pertanian Muda	Pusat Penyuluhan Pertanian
12	Mugi Lestari, SP, M.SI	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian Pusat Penyuluh Pertanian Madya	Pusat Penyuluhan Pertanian
13	Ir. Saptioningsih, M.P.	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian UPT Widyaiswara Utama	BBPP LEMBANG
14	Herlistin Mooy, SP, M.Pd, M.P	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian UPT Guru Muda	SMK PPN KUPANG
15	Dr. drh. Budi Purwo Widiarso, M.P.	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian UPT Lektor Kepala	POLBANGTAN YOMA
16	Nurliana Harahap, S.P., M.Si.	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian UPT Lektor Kepala	POLBANGTAN MEDAN
17	Dr. Diana Triswaningsih S.P., M.P.	Jabatan Fungsional Bidang Pertanian UPT Widyaiswara Madya	BBPP KETINDAN
18	Eko Budi Haryono, S.Sos., M.Si	Jabatan Fungsional di Pusat Analisis Kepegawaian Madya	Sekretariat Badan PPSDMP
19	Dra. Dewi Darmayanti, M.SI	Jabatan Fungsional di Pusat Perencana Madya	Sekretariat Badan PPSDMP

20	Monika Savitri S.Pd.	Jabatan Fungsional Umum di UPT Penyiap Bahan Ketatausahaan	POLBANGTAN MALANG
21	Karjiyono	Jabatan Fungsional Umum di UPT Petugas Sarana dan Prasarana	BBPKH CINAGARA
22	Lili Sunarya, S.ST., M.P.	Jabatan Fungsional Umum di UPT Penyiap Bahan Ketatausahaan	POLBANGTAN BOGOR
23	Zukiyah, SE.	Jabatan Fungsional Umum di UPT Penghimpun dan Pengolah Data	Bapeltan Jambi
24	Leni Sofiani S.Sos	Jabatan Fungsional Umum di UPT Penyiap Bahan Ketatausahaan	BBPMKP Ciawi
25	Muh. Yunus. S.ST.	Pelaksana Petugas Ternak	POLBANGTAN GOWA
26	Muhammad Yasir	Pelaksana Penyiap Ketatausahaan	BBPP BINUANG
27	Johan Wahyudi, S.T	Pelaksana Penyiap Bahan Perencanaan dan Pelaporan Program Kegiatan	Bapeltan Lampung
28	Honorius Ude	Pelaksana Petugas Sarana dan Prasarana	BBPP Kupang
29	Suherna	Pelaksana Pengadministrasi Penyaji Data	Pusat Penyuluhan
30	Sri Pudji Astuti, S.E., M.Si.	Pelaksana Penyusun Bahan Kerjasama	Pusat Pelatihan Pertanian
31	Sujatmiko, S.AP	Pelaksana Penyusun Bimbingan Teknis	Pusat Pendidikan Pertanian
32	Ira Novi Megasari, S.P	Pelaksana Penyusun Laporan	Sekretariat Badan PPSDMP

IMPLEMENTASI SURVEI INDEKS BERAKHLAK

Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2023 merupakan survei kedua yang telah dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. Jumlah pegawai ASN Kementerian Pertanian yang berpartisipasi dalam Survei Indeks BerAKHLAK Tahun 2023 adalah sebanyak 10.027 responden, sedangkan pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 13.714 responden. Hasil dari evaluasi indeks implementasi BerAKHLAK di Kementerian Pertanian tahun 2023 mencapai angka 63,9 persen dengan kategori B atau cukup sehat yang menunjukkan pegawai sudah mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Persentase ini menunjukkan peningkatan dari hasil survei tahun 2022 yang mencapai 60,2 persen. Adapun perbandingan persentase implementasi per nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

No	Nilai BerAKHLAK	Persentase Implementasi Per Nilai	
		Tahun 2022	Tahun 2023
1	Berorientasi Pelayanan	60,5% (Cukup Sehat)	62,9% (Cukup Sehat)
2	Akuntabel	71,8% (Cukup Sehat)	73,4% (Cukup Sehat)
3	Kompeten	62,3% (Cukup Sehat)	63,3% (Cukup Sehat)
4	Harmonis	48,4% (Tidak Sehat)	57,8% (Cukup Sehat)
5	Loyal	65,3% (Cukup Sehat)	67,4% (Cukup Sehat)
6	Adaptif	46,5% (Tidak Sehat)	52,3% (Cukup Sehat)
7	Kolaboratif	66,5% (Cukup Sehat)	70,3% (Cukup Sehat)

C. SAKIP

Evaluasi AKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya. Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Isu penting yang perlu diungkap melalui AKIP ini, antara lain :

- a) Kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

Komponen-komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sesuai dengan kriteria masing-masing komponen. Variabel-variabel tersebut, yaitu :

- a) Komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- b) Sub-komponen dibagi dengan gradasi Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan pada setiap komponen.
- c) Kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Dari hasil penilaian mandiri AKIP BPPSDMP tahun 2022 bahwa BPPSDMP mendapatkan

nilai 83,01 dimana nilai tersebut masih memiliki catatan yaitu dokumen tindak lanjut SAKIP tahun 2021 agar segera dipenuhi evidencenya dan juga terkait benchmark Kinerja BPPSDMP dengan intansi lain agar dapat segera dilakukan.

D. Maturitas SPIP

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terkelola dan terukur” atau tingkat 4 (empat) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “4,465” Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	2	2,000
2.	Struktur dan Proses	1	0,965
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1	1,500
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4	4,465
	-MRI	4	4,075
	-IEPK	3	3,238

Dengan tingkat maturitas “terkelola dan terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sehingga Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah berada pada level 4 (terkelola dan terukur).

E. Capaian IKU BPPSDMP

Capaian IKU BPPSDMP tahun 2023 sampai triwulan ke III sebagai berikut:

CAPAIAN IKU BPPSDMP s.d. TRIWULAN III TAHUN 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALI SASI	CAPAIAN %
1.	Termanfaatkannya teknologi pertanian	A Persentase petani yang menerapkan teknologi (%)	85	66,97	78,78
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian nasional	B Persentase SDM Pertanian Yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	85	87,35	102,76
		C Persentase lulusan pendidikan vokasi pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	85	88,65	104,17
3.	Meningkatnya kualitas kelembagaan pertanian nasional	D Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya(%)	21	20,58	95
4.	Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	E Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi BPPSDMP (Nilai)	34,00	0	0
5.	Terwujudnya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	F Nilai kinerja anggaran BPPSDMP (Nilai)	80,60	64,36	71,03

PROFESIONAL | DAYA SAING |

2. Capaian Pemenuhan Rencana Aksi Tematik Lingkup BPPSDMP

Kegiatan Utama	Rencana Aksi	Target					Jumlah Anggaran	Realisasi/Capaian					% Capaian	Realisasi Anggaran
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		TW I	TW II	TW III	TW IV	Total		
IPDMIP	Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu (IPDMIP) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	4.095				4.095	Rp34.000.000.000	4.036				4.036	99,98%	Rp33.619.236.334
SIMURP	Sekolah Lapang Climate Smart Agriculture (CSA)	842	562	562	842	2.808	Rp79.338.650.000	750	500	500	1.058	2.808	100%	Rp77.352.218.448
READSI	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani	630	90	1.344	330	2.394	Rp30.145.177.000	1.724	-	-	-	1.724	72,01%	Rp25.460.734.735
YESS	Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani	10.000	5.000	5.000	13.587	33.587	Rp42.900.000.000	408	2.634	18.479	28.606	50.127	149,25%	Rp83.096.744.398

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema Pengentasan kemiskinan sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui oleh beberapa pihak dengan menggunakan proyek yang dilaksanakan BPPSDMP meliputi :

A. IPDMIP

The Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) memiliki kegiatan bernama “Fasilitasi Pengembangan dan Manajemen Irigasi Partisipatif Terpadu untuk Peningkatan Kapasitas Petani”. Kegiatan tersebut telah berhasil mencapai 4.036 kelompok masyarakat dari target tahunan sebanyak 4.095 kelompok masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah terbentuknya kelompok tani yang terfasilitasi oleh program IPDMIP. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan mulai bulan Januari—Desember dengan total anggaran sebesar Rp6.122.156.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp6.120.708.761 mencapai capaian sebesar 99,98%.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Pertama, satuan target tahunan kelompok masyarakat dalam petunjuk pelaksanaan diukur dalam bentuk orang, yang kemungkinan mempersulit pencapaian target. Kedua, target tidak tercapai sepenuhnya karena beberapa peserta mengundurkan diri dan batas waktu pelaksanaan kegiatan sudah berakhir. Ketiga, belum ada pengukuran terhadap 4.036 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan, sehingga belum diketahui secara pasti peningkatan kesejahteraan mereka untuk membantu mengatasi kemiskinan.

Dampak dari permasalahan tersebut adalah belum dapat diketahui secara jelas dampak peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut, sehingga upaya mengatasi kemiskinan juga masih sulit diukur. Perlu adanya evaluasi mendalam dan solusi terhadap permasalahan yang muncul agar ke depannya kegiatan serupa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih signifikan.

B. SIMURP

Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan pertanian cerdas iklim, mengurangi resiko gagal panen, mengurangi efek gas rumah kaca, dan meningkatkan pendapatan petani di Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Rawa (DR).

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek SIMURP adalah Sekolah Lapang

Climate Smart Agriculture (CSA). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim. Pertanian cerdas iklim adalah pendekatan pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Tahun 2023, target kegiatan Sekolah Lapang CSA adalah sebanyak 2.808 kelompok masyarakat. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 1.750 kelompok masyarakat, atau sekitar 62,32%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga baru mencapai Rp29,672,232,100 dari total anggaran sebesar Rp35,067,600,000.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Lapang CSA, antara lain:

- Adanya penyesuaian musim tanam di triwulan I, sehingga kegiatan Sekolah Lapang CSA yang seharusnya dilaksanakan pada musim tanam I, harus diundur ke musim tanam II.
- Adanya rehab irigasi bendungan yang menyebabkan perubahan waktu tanam.
- Belum terdapat pengukuran kepada 1.750 kelompok masyarakat yang mendapatkan kegiatan, sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan.

C. YESS

Youth Entrepreneurship And Employment Support Services (YESS) merupakan proyek kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Proyek ini bertujuan untuk mendorong kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda di sektor pertanian.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek YESS adalah Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani muda dalam berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

Tahun 2023, target kegiatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani adalah sebanyak 33.587 orang. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 19.060 orang, atau sekitar 56,75%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga mencapai Rp83,096,744,398 dari total anggaran sebesar Rp42,900,000,000.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda di Sektor Pertanian (YESS) untuk Peningkatan Kapasitas Petani, antara lain:

- Adanya potensi tidak tercapainya target karena waktu yang terbatas
- Belum terdapat pengukuran kepada 19.060 orang yang mendapatkan kegiatan sehingga belum dapat diketahui peningkatan kesejahteraan untuk membantu mengatasi kemiskinan

D. READSI

Program Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI) merupakan program kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan International Fund for Agricultural Development (IFAD). Program ini bertujuan untuk memberdayakan petani dan meningkatkan produksi pertanian di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program READSI adalah Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas petani dalam menerapkan teknologi pertanian, termasuk teknologi peningkatan produksi dan teknologi pascapanen.

Tahun 2023, target kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani adalah sebanyak 2.394 kelompok masyarakat. Namun, realisasi targetnya baru mencapai 1.724 kelompok masyarakat, atau sekitar 72,01%. Realisasi anggaran kegiatan ini juga mencapai Rp15,355,357,845 dari total anggaran sebesar Rp11,906,189,000.

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Perdesaan (READSI) untuk peningkatan kapasitas petani, antara lain:

- Menurunnya minat petani sehingga realisasi menjadi 2.373 orang dari target semula 2.394 orang.
- Terdapat 5 kabupaten (Konawe, Toli-Toli, Sanggau, Sambas dan Belu) yang tidak meneruskan program sehingga target turun dari 2.373 menjadi 1.724 orang.

BAB IV

PENUTUP

Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional, mandiri, berdaya saing dan berjiwa wirausaha adalah salah satu kunci untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam lima tahun ke depan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan Badan PPSDMP difokuskan pada optimalisasi peran, fungsi dan tugas Balai Penyuluhan Pertanian, penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan vokasi pertanian serta penguatan sistem sertifikasi kompetensi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Badan BPPSDMP meliputi 2 yaitu RB general yang terdiri dari 26 aspek pemenuhan dimana setiap aspek tersebut menjadi tuisi kegiatan tahunan dilingku BPPSDMP dan untuk RB Tematik BPPSDMP mengambil tema pengentasan kemiskinan dengan melaksanakn 4 project/PHLN seperti IPDMIP, SIMURP, READSI dan YESS dalam pelaksanaannya terealisasi hampir 90% dengan berbagai program kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan dampak langsung terhadap petani dengan memberikan fasilitas pengembangan sumber daya untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian.

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI NILAI KINERJA ANGGARAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN

TAHUN 2023



Kementerian Pertanian
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan karunia-Nya jualah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Tahun Anggaran 2023 telah diselesaikan dengan baik.

Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran merupakan salah satu instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas disampaikan melalui laporan ini bertujuan untuk memberikan pertanggungjawaban secara profesional kepada pemangku kepentingan terhadap pengelolaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dilakukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2023 dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan untuk tahun tahun mendatang.

Hasil evaluasi kinerja anggaran ini selanjutnya akan digunakan sebagai dasar penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; penyusunan rewi angka dasar; penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenaan; serta pemberian *reward and punishment*.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2024
Kepala Badan,

Prof (R) Dr. Ir. Dedi Nursyamsi, M.Agr
NIP. 19640623 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Output	2
D. Alokasi Anggaran	2
E. Target Klasifikasi Rincian Ouput (KRO)	4
F. Realisasi Anggaran	6
1. Kegiatan Utama	6
2. Jenis Belanja	7
3. Kewenangan	8
4. Satuan Kerja	8
5. Klasifikasi Rincian Output (KRO)	11
G. Analisis	13
H. Kendala	17
I. Rekomendasi	18

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan tanggal 29 November 2006 yang mengharuskan setiap instansi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program. Kementerian Keuangan juga telah menerbitkan peraturan baru sebagai tindak lanjut penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian selama ini telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian serta dilakukan secara kontinyu dan berkelanjutan setiap tahun. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ruang lingkup evaluasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian mencakup arah dan kebijakan pembangunan SDM Pertanian, yaitu: (1) penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian; (2) penyelenggaraan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian; (3) penyelenggaraan penyuluhan pertanian; dan (4) penyelenggaraan reformasi birokrasi BPPSDMP yang efektif dan efisien.

Kegiatan evaluasi secara berkelanjutan ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja (satker) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sesuai dengan Rencana Strategis. Melalui kegiatan ini, kinerja yang mencakup capaian keberhasilan dan permasalahan yang terjadi dapat diketahui sehingga dapat dirumuskan rekomendasi penyempurnaan program pada periode berikutnya.

B. TUJUAN

Tujuan mengukur dan mengetahui adalah untuk efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L tahun 2023 sehingga dapat memberikan informasi dan gambaran hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP Tahun Anggaran 2023.

C. OUTPUT

Output yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pemantuan, Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Program/Kegiatan BPPSDMP Tahun Anggaran 2023.

D. ALOKASI ANGGARAN

Untuk pelaksanaan **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** yang terdiri dari kegiatan : 1) Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 2) Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, 3) Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta **Program Dukungan Manajemen** yang terdiri dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP, dialokasikan anggaran dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) BPPSDMP tahun 2023 sebesar Rp.1.114.893.522.000,- (Revisi Desember), semula pagu per November 2023 sebesar Rp.1.114.133.459.000,- namun bertambah karena ada penambahan pagu anggaran untuk sumber dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) di UPT Pelatihan dan Pendidikan (BBPMKP Ciawi, BBPP Batangkaluku, BBPP Lembang, Polbangtan Medan, Polbangtan Yoma-Kampus Magelang, Polbangtan Yoma-Kampus Yogyakarta dan SMKPP Sembawa).

Dari total anggaran teralokasikan untuk kegiatan penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian sebesar Rp.387.752.821.000,- kegiatan penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian sebesar Rp.108.146.320.000,- kegiatan penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian sebesar Rp.348.890.878.000,- dan untuk kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp.270.103.503.000,-.

Secara rinci alokasi anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian per kegiatan utama, belanja dan jenis kewenangan, dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 di bawah ini.

Tabel 1. Alokasi Anggaran Kegiatan Utama

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		JANUARI	MARET	APRIL
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	110.495.735.000	111.378.652.000	100.378.652.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	293.463.008.000	293.463.008.000	293.463.008.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	257.806.612.000	257.806.612.000	257.806.612.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	284.277.769.000	284.277.769.000	284.277.769.000
	TOTAL	946.043.124.000	946.926.041.000	935.926.041.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		MEI	JULI	SEPTEMBER
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	103.596.779.000	106.626.817.000	107.876.317.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	368.801.658.000	368.801.658.000	373.696.458.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	378.959.983.000	379.610.289.000	374.715.489.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	284.277.769.000	279.966.491.000	279.966.491.000
	TOTAL	1.135.636.189.000	1.135.005.255.000	1.136.254.755.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	107.876.317.000	107.669.661.000	108.146.320.000
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	376.496.458.000	387.752.821.000	387.752.821.000
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	363.988.838.000	348.607.474.000	348.890.878.000
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	273.464.085.000	270.103.503.000	270.103.503.000
	TOTAL	1.121.825.698.000	1.114.133.459.000	1.114.893.522.000

Tabel 2. Alokasi Anggaran Belanja

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		JANUARI	MARET	APRIL
1	BELANJA PEGAWAI	141.416.455.000	141.416.455.000	141.416.455.000
2	BELANJA BARANG	785.270.381.000	786.251.915.000	775.251.915.000
3	BELANJA MODAL	19.356.288.000	19.257.671.000	19.257.671.000
	TOTAL	946.043.124.000	946.926.041.000	935.926.041.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		MEI	JULI	SEPTEMBER
1	BELANJA PEGAWAI	141.416.455.000	137.105.177.000	137.105.177.000
2	BELANJA BARANG	964.430.171.000	967.639.288.000	969.007.146.000
3	BELANJA MODAL	29.789.563.000	30.260.790.000	30.142.432.000
	TOTAL	1.135.636.189.000	1.135.005.255.000	1.136.254.755.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	BELANJA PEGAWAI	133.522.777.000	133.276.487.000	133.286.759.000
2	BELANJA BARANG	957.239.392.000	950.301.948.000	950.468.025.000
3	BELANJA MODAL	31.063.529.000	30.555.024.000	31.138.738.000
	TOTAL	1.121.825.698.000	1.114.133.459.000	1.114.893.522.000

Tabel 3. Alokasi Anggaran Kewenangan

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		JANUARI	MARET	APRIL
1	KANTOR PUSAT (KP)	197.439.042.000	197.439.042.000	191.439.042.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	518.313.054.000	519.195.971.000	514.195.971.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	230.291.028.000	230.291.028.000	230.291.028.000
	TOTAL	946.043.124.000	946.926.041.000	935.926.041.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		MEI	JULI	SEPTEMBER
1	KANTOR PUSAT (KP)	255.634.651.000	257.210.436.000	258.048.073.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	596.824.282.000	598.079.941.000	593.597.004.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	283.177.256.000	279.714.878.000	284.609.678.000
	TOTAL	1.135.636.189.000	1.135.005.255.000	1.136.254.755.000

NO.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		
		OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	KANTOR PUSAT (KP)	257.280.060.000	281.923.913.000	281.923.913.000
2	KANTOR DAERAH (KD)	583.531.921.000	554.539.866.000	555.299.929.000
3	DEKONSENTRASI (DK)	281.013.717.000	277.669.680.000	277.669.680.000
	TOTAL	1.121.825.698.000	1.114.133.459.000	1.114.893.522.000

E. TARGET KLASIFIKASI RINCIAN OUPUT (KRO)

Untuk pelaksanaan kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian terdiri dari 8 (delapan) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan), kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terdiri dari 4 (empat) KRO yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Satker Dekonsentrasi, kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Pertanian terdiri dari 8 (delapan) KRO yang dilaksanakan di Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah Pertanian), serta kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya terdiri dari 4 (empat) KRO yang dilaksanakan di Kantor Pusat dan Kantor Daerah (UPT Pelatihan dan UPT Pendidikan).

Tabel 4. Target Klasifikasi Rincian Output

N O	PROGRAM/KEGIATAN / OUTPUT	SATUAN	JAN	MAR	APR	MEI	JUL	SEP	OKT	NOV	DES
I PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI											
A. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian											
1	Koordinasi	Kegiatan	62	62	62	62	62	62	62	62	62
2	Norma. Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (PN)	Lembaga	100	100	100	100	100	100	100	99	99
4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelomp. Masy.	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394	2.394
5	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	-	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Sertifikasi Profesi dan SDM (PN)	Orang	1.000	1.033	1.033	1.033	1.063	1.093	1.093	1.030	1.030
7	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	28.774	29.119	21.454	15.139	15.895	16.324	16.324	19.139	19.139
B. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian											
1	Koordinasi	Kegiatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	34	34	34	34	34	34	34	34	34
3	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434	39.434
4	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelomp. Masy.	6.918	7.976	7.976	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975	7.975
C. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian											
1	Koordinasi	Kegiatan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	Koordinasi (YESS)	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Norma. Standard, Prosedur dan Kinerja	NSPK	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	10.000	10.000	10.000	33.587	33.587	33.587	33.587	33.587	33.587
5	Bantuan Pendidikan Dasar Menengah	Orang	26.479	26.479	26.013	26.013	26.013	18.641	13.115	13.111	13.111
6	Sarana Bidang Pendidikan	Paket	11	11	11	11	11	11	11	11	11
7	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelomp. Masy.	430	430	430	430	430	430	285	285	285
8	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	10.129	10.129	10.129	10.129	10.129	10.129	8.160	8.086	8.086
II PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN											
A. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP											
1	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	9	9	9	9	9	9	9	9	9

NO	PROGRAM/KEGIATAN / OUTPUT	SATUAN	JAN	MAR	APR	MEI	JUL	SEP	OKT	NOV	DES
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	27	27	27	27	27	27	27	27	27
3	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	375	375	375	375	375	375	325	325	325
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	-	-	-	29	29	29	29	29	29

F. REALISASI ANGGARAN

Serapan total anggaran BPPSDMP sampai dengan periode 31 Desember 2023 sebesar Rp.1.101.296.884.474,- (98,78%). Realisasi ini lebih rendah dibandingkan realisasi pada bulan Desember tahun 2022 yang mencapai 98,81%. Secara rinci serapan anggaran per Kegiatan Utama, Jenis Belanja, Kewenangan, Satker dan Output dapat dilihat pada tabel 5 – 13 di bawah ini.

1. KEGIATAN UTAMA

Ada 4 (empat) kegiatan utama yang dilaksanakan oleh BPPSDMP pada tahun 2023 yaitu Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Utama

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	108,146,320,000	104,360,399,532	96.50%	3,785,920,468	3.50%
2	Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	387,752,821,000	381,907,360,872	98.49%	5,845,460,128	1.51%
3	Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	348,890,878,000	346,611,995,629	99.35%	2,278,882,371	0.65%
4	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	270,103,503,000	268,417,128,441	99.38%	1,686,374,559	0.62%
	TOTAL	1,114,893,522,000	1,101,296,884,474	98.78%	13,596,637,526	1.22%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Dari Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa realisasi serapan anggaran per kegiatan utama mencapai 98,78%, realisasi tertinggi dicapai oleh kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya BPPSDMP sebesar 99,38%, dan yang terendah oleh kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian sebesar 96,50%, ada penambahan pagu PNBPN di bulan Desember 2023, namun target pendapatannya tidak tercapai.

2. JENIS BELANJA

Jenis Belanja yang dilaksanakan ada 3 (tiga) yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja Pegawai dilaksanakan di Sekretariat Badan PPSDMP (Kantor Pusat) dan di Satker Kantor Daerah (UPT Pelatihan dan UPT Pendidikan), sedangkan Belanja Barang dilaksanakan di seluruh Satker lingkup BPPSDMP baik Pusat, UPT maupun Dekonsentrasi. Belanja Modal dilaksanakan di 18 Satker lingkup BPPSDMP yaitu BPPSDMP Pusat (Sekretariat, READSI, YESS), BBPMKP Ciawi, BBPP Lembang, BBPP Batu, BBPP Ketindan, BBPP Batangkaluku, BBPP Binuang, BBPP Kupang, Bapeltan Jambi, Bapeltan Lampung, Polbangtan Bogor, Polbangtan Magelang, Polbangtan Malang, Polbangtan Medan, Polbangtan Gowa, SMKPP Banjarbaru, SMKPP Sembawa, dan PEPI. Satker yang sudah ada realisasi sebanyak 18 satker yaitu di BPPSDMP Pusat (Sekretariat, READSI dan YESS) sebesar 96,97%, BBPMKP Ciawi 99,61%, BBPP Binuang 93,60%, BBPP Ketindan 99,59%, BBPP Batangkaluku 99,86%, BBPP Batu 100,00%, BBPP Lembang 99,62%, BBPP Kupang 100,00% Bapeltan Jambi 68,27% (penerimaan PNPB tidak tercapai), Bapeltan Lampung 100%, PEPI 86,00%, Polbangtan Bogor 99,98%, Polbangtan Magelang 98,84%, Polbangtan Malang 99,79%, Polbangtan Medan 99,95%, Polbangtan Gowa 99,24%, SMKPP Sembawa 100%, dan SMKPP Banjarbaru 100,00%.

Tabel 6. Realisasi Belanja

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	BELANJA PEGAWAI	133,286,759,000	132,521,444,353	99.43%	765,314,647	0.57%
2	BELANJA BARANG	950,468,025,000	937,847,224,116	98.67%	12,620,800,884	1.33%
3	BELANJA MODAL	31,138,738,000	30,928,216,005	99.32%	210,521,995	0.68%
	TOTAL	1,114,893,522,000	1,101,296,884,474	98.78%	13,596,637,526	1.22%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi serapan anggaran per jenis belanja yang tertinggi adalah Belanja Pegawai sebesar 99,43%, selanjutnya Belanja Modal sebesar 99,32% dan yang terendah adalah realisasi Belanja Barang mencapai 98,67%. Penyerapan tidak terserap 100% karena ada sisa anggaran gaji dan sisa uang makan, terdapat sisa negosiasi dari kontrak dan proses lelang, ada sisa langganan listrik, telepon, pembayaran honor narasumber dan lain-lain serta jumlah penyuluh yang berkurang karena dalam perjalanannya ada yang pensiun, meninggal dunia ataupun beralih jabatan ke struktural.

3. KEWENANGAN

Pada Tahun 2023 anggaran terbagi dalam 3 (tiga) jenis kewenangan, Dekonsentrasi (DK) di 34 satker provinsi, Kantor Daerah (KD) di 10 satker UPT Pelatihan dan 11 satker UPT Pendidikan, serta Kantor Pusat (KP) di 1 satker BPPSDMP.

Tabel 7. Realisasi Kewenangan

NO	JENIS KEWENANGAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	KANTOR PUSAT	281,923,913,000	275,914,752,997	97.87%	6,009,160,003	2.13%
2	KANTOR DAERAH	555,299,929,000	551,599,137,627	99.33%	3,700,791,373	0.67%
3	DEKONSENTRASI	277,669,680,000	273,782,993,850	98.60%	3,886,686,150	1.40%
	TOTAL	1,114,893,522,000	1,101,296,884,474	98.78%	13,596,637,526	1.22%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Jika dilihat pada Tabel 7 realisasi serapan anggaran per kewenangan yang masih dibawah capaian BPPSDMP adalah Kantor Pusat (KP) sebesar 97,87% dan satker Dekonsentrasi (DK) mencapai 98,60%. Capaian kewenangan yang tertinggi adalah Kantor Daerah (KD) sebesar 99,33%.

4. SATUAN KERJA (SATKER)

Satuan Kerja lingkup BPPSDMP sebanyak 56 Satuan Kerja (Satker), dengan 34 satker dekonsentrasi di provinsi, 10 satker UPT Pelatihan, 8 satker UPT Pendidikan Tinggi, 3 satker UPT Pendidikan Menengah, dan 1 satker di Pusat.

Tabel 8. Realisasi Satker Kantor Pusat

NO	ESELON II	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	PUSAT PELATIHAN PERTANIAN	46,134,805,000	43,011,384,713	93.23%	3,123,420,287	6.77%
2	PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN	110,083,141,000	108,126,367,022	98.22%	1,956,773,978	1.78%
3	SEKRETARIAT BADAN PPSDMP	53,625,630,000	53,229,229,676	99.26%	396,400,324	0.74%
4	PUSAT PENDIDIKAN PERTANIAN	72,080,337,000	71,547,771,586	99.26%	532,565,414	0.74%
	TOTAL	281,923,913,000	275,914,752,997	97.87%	6,009,160,003	2.13%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 8 realisasi satker Kantor Pusat sebesar 97,87%, masih dibawah capaian BPPSDMP. Eselon II Pusat yang serapan anggarannya tertinggi adalah Sekretariat Badan PPSDMP dan Pusat Pendidikan Pertanian sebesar masing-masing sebesar 99,26%. Selanjutnya Pusat Penyuluhan Pertanian sebesar 98,22%, sedangkan realisasi yang terendah adalah Pusat Pelatihan Pertanian sebesar 93,23%.

Tabel 9. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pelatihan)

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	120040 BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	10,209,237,000	10,138,657,454	99.31%	70,579,546	0.69%
2	237200 BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP)	23,745,671,000	23,714,649,597	99.87%	31,021,403	0.13%
3	239640 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG KALSEL	8,514,307,000	8,329,208,688	97.83%	185,098,312	2.17%
4	239654 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	13,214,385,000	13,194,611,198	99.85%	19,773,802	0.15%
5	239661 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU SULAWESI SELATAN	39,787,116,000	39,740,024,041	99.88%	47,091,959	0.12%
6	239675 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU MALANG JAWA TIMUR	14,305,167,000	14,291,414,229	99.90%	13,752,771	0.10%
7	239701 BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	14,131,534,000	13,979,954,682	98.93%	151,579,318	1.07%
8	394771 BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	9,885,182,000	9,724,454,224	98.37%	160,727,776	1.63%
9	412075 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	12,338,016,000	12,028,974,945	97.50%	309,041,055	2.50%
10	412081 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG NTT	8,646,249,000	8,554,390,719	98.94%	91,858,281	1.06%
	TOTAL	154,776,864,000	153,696,339,777	99.30%	1,080,524,223	0.70%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 9 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pelatihan) mencapai sebesar 99,30%, masih diatas capaian realisasi BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Satker BBPP Batu mencapai 99,90% dan yang terendah adalah BBPKH Cinagara sebesar 97,50% karena ada revisi anggaran pada DPA 2023 di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat untuk pelatihan dasar fungsional medik veteriner yang bersumber dari PNPB, ditunda kerjasamanya untuk dilaksanakan di tahun 2024.

Tabel 10. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi)

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	412005 POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	14,481,000,000	14,381,415,500	99.31%	99,584,500	0.69%
2	417402 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	72,389,084,000	72,127,538,961	99.64%	261,545,039	0.36%
3	417405 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	25,425,774,000	25,279,915,448	99.43%	145,858,552	0.57%
4	417407 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	27,602,356,000	27,357,758,074	99.11%	244,597,926	0.89%
5	417409 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	74,903,720,000	74,062,566,441	98.88%	841,153,559	1.12%
6	417411 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	30,956,564,000	30,865,380,543	99.71%	91,183,457	0.29%
7	417413 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	69,450,127,000	68,921,146,398	99.24%	528,980,602	0.76%
8	417428 POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	21,950,543,000	21,768,243,525	99.17%	182,299,475	0.83%
	TOTAL	337,159,168,000	334,763,964,890	99.29%	2,395,203,110	0.71%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Selanjutnya, pada Tabel 10 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Tinggi) mencapai sebesar 99,29% diatas capaian realisasi BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Polbangtan Medan mencapai sebesar 99,71%, sedangkan yang terendah adalah Polbangtan Malang baru sebesar 98,88%.

Tabel 11. Realisasi Satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Menengah)

NO	SATUAN KERJA	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	237814 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	17,253,927,000	17,240,610,224	99.92%	13,316,776	0.08%
2	237924 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU KALSEL	34,940,786,000	34,849,009,301	99.74%	91,776,699	0.26%
3	412101 SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG NTT	11,169,184,000	11,051,213,435	98.94%	117,970,565	1.06%
	TOTAL	63,363,897,000	63,140,832,960	99.65%	223,064,040	0.35%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 11 realisasi satker Kantor Daerah (UPT Pendidikan Menengah) mencapai sebesar 99,65% diatas capaian BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah SMK-PP Sembawa mencapai sebesar 99,92%, selanjutnya SMK-PP Banjarbaru mencapai sebesar 99,74% dan yang terendah adalah SMK-PP Kupang mencapai sebesar 98,94%.

Tabel 12. Realisasi Satker Dekonsentrasi

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	019071 DINAS KETAHANAN PANGAN KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	547,952,000	540,179,797	98.58%	7,772,203	1.42%
2	029175 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	28,449,081,000	28,150,987,419	98.95%	298,093,581	1.05%
3	049062 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	1,915,480,000	1,912,108,087	99.82%	3,371,913	0.18%
4	050040 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	19,032,874,000	18,968,264,715	99.66%	64,609,285	0.34%
5	099436 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	3,596,039,000	3,574,854,509	99.41%	21,184,491	0.59%
6	140042 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	5,406,378,000	5,325,094,128	98.50%	81,283,872	1.50%
7	169065 DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	3,869,698,000	3,854,744,528	99.61%	14,953,472	0.39%
8	229030 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	3,016,728,000	2,995,177,441	99.29%	21,550,559	0.71%
9	239224 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	11,583,048,000	11,322,330,291	97.75%	260,717,709	2.25%
10	280031 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	3,283,034,000	3,244,053,000	98.81%	38,981,000	1.19%
11	305143 DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1,413,390,000	1,410,780,000	99.82%	2,610,000	0.18%
12	339059 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	3,460,110,000	3,460,110,000	100.00%	0	0.00%
13	345105 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT	3,215,654,000	3,015,744,000	93.78%	199,910,000	6.22%
14	403450 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	4,922,384,000	4,891,386,700	99.37%	30,997,300	0.63%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)				
		PAGU	REALISASI	%	SISA	%
15	403452 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	5,942,429,000	5,927,203,600	99.74%	15,225,400	0.26%
16	403455 DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	3,016,966,000	3,016,351,110	99.98%	614,890	0.02%
17	403457 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	14,024,934,000	13,268,242,200	94.60%	756,691,800	5.40%
18	403458 DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	4,496,771,000	4,458,971,900	99.16%	37,799,100	0.84%
19	417675 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,285,622,000	1,255,953,176	97.69%	29,668,824	2.31%
20	417996 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	9,922,537,000	9,693,216,672	97.69%	229,320,328	2.31%
21	417998 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	14,722,516,000	14,332,384,767	97.35%	390,131,233	2.65%
22	417999 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	16,575,807,000	16,389,056,284	98.87%	186,750,716	1.13%
23	418000 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	6,982,303,000	6,891,107,100	98.69%	91,195,900	1.31%
24	418009 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	10,646,092,000	10,308,455,161	96.83%	337,636,839	3.17%
25	418010 DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	3,014,188,000	3,004,935,440	99.69%	9,252,560	0.31%
26	418011 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	33,564,534,000	33,373,161,285	99.43%	191,372,715	0.57%
27	418013 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	5,686,022,000	5,651,020,739	99.38%	35,001,261	0.62%
28	418014 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	6,155,246,000	6,147,129,399	99.87%	8,116,601	0.13%
29	418018 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	3,067,800,000	3,041,222,024	99.13%	26,577,976	0.87%
30	418019 DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	526,782,000	526,611,548	99.97%	170,452	0.03%
31	418020 DINAS KETAHANAN PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	6,693,010,000	6,637,112,730	99.16%	55,897,270	0.84%
32	418021 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	25,512,592,000	25,179,716,100	98.70%	332,875,900	1.30%
33	418022 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	7,605,308,000	7,587,038,000	99.76%	18,270,000	0.24%
34	418024 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4,516,371,000	4,426,290,000	98.01%	90,081,000	1.99%
	TOTAL	277,669,680,000	273,780,993,850	98.60%	3,888,686,150	1.40%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 12 realisasi satker Dekonsentrasi mencapai 98,60%, masih dibawah capaian BPPSDMP. Realisasi yang tertinggi adalah Provinsi Papua Barat mencapai sebesar 100,00% sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat mencapai sebesar 93,78%, Silpa pembayaran BOP dan bantuan pulsa sebab kabupaten tidak berani memberikan surat rekomendasi karena penyuluh pertanian yang tidak membuat laporan.

5. KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)

KRO masing-masing per kegiatan adalah sebanyak 8 (delapan) output untuk kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian, 4 (empat) output untuk kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, 8 (delapan) output untuk

kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian, serta 4 (empat) output untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP.

Tabel 13. Realisasi KRO

PROGRAM / AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET VOL.	REALISASI VOL.	%	PAGU	REALISASI SP2D	% REALISASI
018.10.DL. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI								
1810. Penguatan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	62	62	100.00%	6,476,495,000	6,447,129,573	99.55%
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100.00%	10,508,568,000	10,493,189,902	99.85%
	QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (PN)	Lembaga	99	107	108.08%	3,432,786,000	3,431,045,325	99.95%
	QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	2,394	2,373	99.12%	30,145,177,000	27,656,474,111	91.74%
	CAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	10	10	100.00%	6,617,340,000	6,463,826,421	97.68%
	CBK Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Unit	1	1	100.00%	13,159,893,000	13,142,146,460	99.87%
	PDI Sertifikasi Profesi dan SDM (PN)	Orang	1,030	1,030	100.00%	2,825,997,000	2,800,556,426	99.10%
	SCC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	19,139	20,024	104.62%	34,980,064,000	33,926,031,314	96.99%
Subtotal						108,146,320,000	104,360,399,532	96.50%
1812. Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	6	6	100.00%	12,934,382,000	12,835,897,228	99.24%
	FBA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah	Daerah	34	34	100.00%	15,400,000,000	15,309,116,862	99.41%
	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	39,434	39,393	99.90%	247,503,729,000	243,043,942,018	98.20%
	QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	7,975	7,975	100.00%	111,914,710,000	110,718,404,764	98.93%
Subtotal						387,752,821,000	381,907,360,872	98.49%
5892. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Pertanian	AEA Koordinasi	Kegiatan	12	12	100.00%	15,154,219,000	15,071,055,116	99.45%
	PEA Koordinasi (YESS) (PN)	Kegiatan	1	1	100.00%	37,601,400,000	37,232,162,993	99.02%
	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK	6	6	100.00%	10,800,057,000	10,720,395,800	99.26%
	QDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat (PN)	Orang	33,587	34,634	103.12%	116,264,921,000	115,563,403,375	99.40%
	BEK Bantuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Orang	13,111	13,120	100.07%	2,913,653,000	2,909,253,217	99.85%
	CAA Sarana Bidang Pendidikan	Paket	11	11	100.00%	3,503,242,000	3,396,240,151	96.95%
	QDD Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (PN)	Kelompok Masy.	285	285	100.00%	8,115,806,000	8,086,860,982	99.64%
SAC Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan (PN)	Orang	8,086	8,136	100.62%	154,537,580,000	153,632,623,995	99.41%	
Subtotal						348,890,878,000	346,611,995,629	99.35%
018.10.WA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								
1813. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	Dokumen	9	9	100.00%	19,549,876,000	19,498,735,655	99.74%
	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit	29	29	100.00%	640,120,000	580,703,913	38.49%
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	27	27	100.00%	235,571,178,000	234,004,995,825	99.34%
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	325	343	105.54%	14,342,329,000	14,332,693,048	99.93%
Subtotal						270,103,503,000	268,417,128,441	99.38%
TOTAL						1,114,893,522,000	1,101,296,884,474	98.78%

Sumber: data diolah dari SMART, OMSPAN dan Laporan Satker

Pada Tabel 13 realisasi berdasarkan klasifikasi rincian output sudah optimal, rata-rata sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Namun demikian masih ada beberapa yang belum mencapai target yaitu kegiatan Penguatan Penyelenggaraan pelatihan Pertanian pada klasifikasi rincian output yang masih rendah adalah Fasilitas

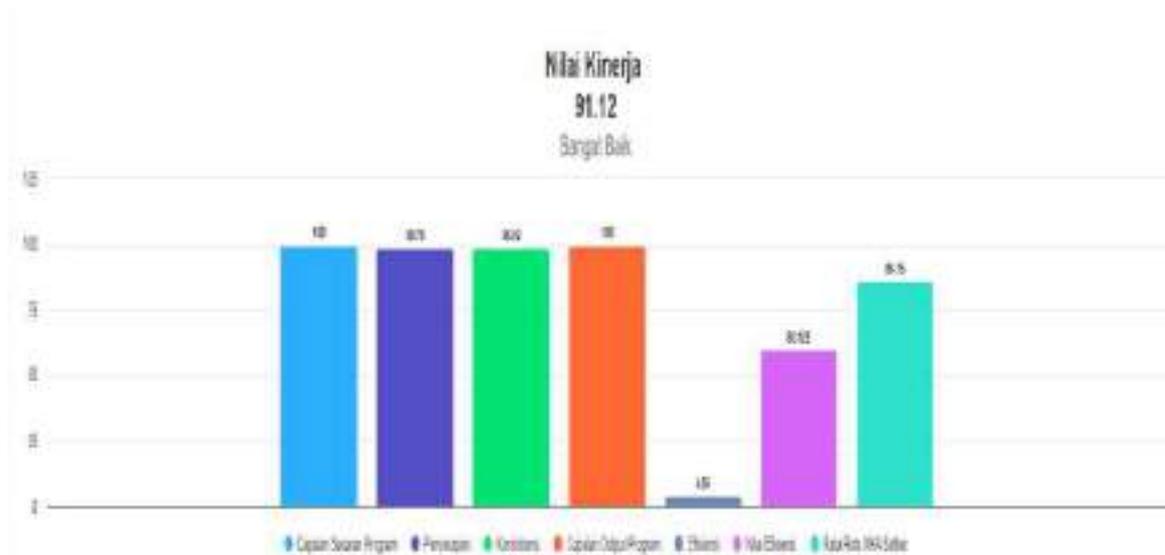
dan Pembinaan Kelompok Masyarakat pada Program READSI terealisasi 2.373 kelompok masyarakat, target awal 2.394 kelompok masyarakat berdasarkan hasil hitung perencanaan awal program yaitu 342 desa x 7 poktan, namun didalam pelaksanaannya tidak semua desa memiliki jumlah poktannya sebanyak 7 poktan, dikarenakan terbatasnya jumlah petani di desa tersebut, sehingga hanya terbentuk 6 poktan saja di beberapa desa lokasi Program READSI.

Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (insentif kinerja bagi penyuluh) dari target 38.922 orang tercapai 39.393 orang. Hal ini dikarenakan dari sejumlah target tersebut selama pelaksanaan tahun anggaran ada penyuluh memasuki masa pensiun, beralih jabatan ataupun meninggal dunia, dan penyuluh THLTB PP yang diangkat menjadi CPNS dan meninggal dunia.

G. ANALISIS

Berdasarkan PMK Nomor 22 tahun 2021, bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan secara berkala minimal 2 kali dalam setahun. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler meliputi: Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi; Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat; dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek implementasi yang dilaksanakan oleh BPPSDMP diperoleh dari variabel capaian output, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Capaian output terdiri atas capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Efisiensi terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I; dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.



Gambar 1. Nilai Kinerja Anggaran

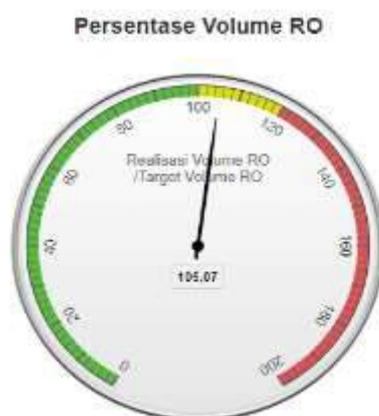
Berdasarkan aplikasi SMART Tahun 2023 yang telah diimplementasikan di seluruh satker lingkup BPPSDMP pada tahun 2023, total penyerapan anggaran (PA) mencapai 98,78%, rata-rata konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (RPD) sebesar 98,92%, efisiensi sebesar 4,05 dengan Nilai Efisiensi sebesar 60,12%, capaian output program sebesar 100%, capaian sasaran program sebesar 100%, dan rata-rata Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker sebesar 86,15%. Berdasarkan pencapaian aspek-aspek tersebut menghasilkan **Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPSDMP Tahun 2023 sebesar 91,12%**, termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Dengan demikian, target NKA tahun 2023 sebesar 90,60% sudah tercapai, dan persentase capaian kinerja sebesar **100,56%** dengan kategori pencapaian kinerja **SANGAT BERHASIL**.

NKA diperoleh dari aspek implementasi, aspek manfaat dan Nilai Rata-rata Kinerja Satker, nilai pembobotan seperti pada Tabel 14.

Tabel 14. Bobot Penilaian NKA Unit Eselon I

Perhitungan NK Unit Eselon I				
Indikator		Bobot		
Aspek Implementasi	Capaian Output Program	43,5%	33,33%	50%
	Efisiensi	28,6%		
	Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%		
	Penyerapan Anggaran	9,7%		
Aspek Manfaat	Capaian Sasaran Program	66,67%		
Nilai Kinerja Satker Rata-rata				50%

Berdasarkan Tabel 14, Pencapaian Kinerja pada semua aspek sudah tercapai secara optimal, walaupun Nilai Efisiensi hanya tercapai 60,12%. Hal ini disebabkan capaian kegiatan fisik rata-rata sebesar 100%, beriringan dengan capaian anggaran yang juga maksimal, sehingga efisiensi biaya yang dicapai hanya sedikit tetapi tetap bernilai positif (efisien).



Gambar 2. Realisasi Volume Rincian Output (RVRO)

Dari data serapan anggaran dan realisasi fisik/RVRO satker lingkup BPPSDMP Tahun 2023 menunjukkan bahwa serapan anggaran sudah cukup optimal yaitu **terserap sebesar 98,78%** dengan **capaian fisik/RVRO 105,07%**, dan capaian RVRO masing-masing per satker juga sudah optimal rata-rata 100%.

Adapun Pencapaian Kinerja masing-masing satuan kerja lingkup BPPSDMP dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Nilai Kinerja Anggaran Satker Lingkup BPPSDMP

No.	Satuan Kerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kinerja	Kategori
1	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI UTARA	98,01	99,74	100,00	20,00	100,00	99,76	SANGAT BAIK
2	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG	99,16	99,54	100,00	19,34	98,35	99,36	SANGAT BAIK
3	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI KUPANG, NTT	98,94	96,35	100,00	20,00	100,00	99,23	SANGAT BAIK
4	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI BANJARBARU, KALSEL	99,74	99,93	100,00	14,26	85,65	95,86	SANGAT BAIK
5	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	99,38	99,67	100,00	7,47	68,67	90,92	SANGAT BAIK
6	BALAI PELATIHAN PERTANIAN LAMPUNG	99,31	92,12	100,00	6,71	66,79	89,00	BAIK
7	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	94,60	98,99	100,00	5,40	63,49	88,85	BAIK
8	BALAI BESAR PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (BBPMKP)	99,87	99,96	100,00	4,37	60,91	88,80	BAIK
9	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU UTARA	98,81	99,85	100,00	3,12	57,81	87,79	BAIK
10	DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA SELATAN	96,83	98,78	100,00	3,17	57,93	87,44	BAIK
11	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI ACEH	97,35	99,03	100,00	2,65	56,62	87,16	BAIK
12	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI JAWA BARAT	98,95	99,73	100,00	2,20	55,51	87,12	BAIK
13	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	97,69	99,77	100,00	2,31	55,77	87,08	BAIK
14	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BATANG KALUKU, SULAWESI SELATAN	99,88	97,60	100,00	2,44	56,11	87,00	BAIK
15	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	97,87	99,68	100,00	2,13	55,33	86,96	BAIK

No.	Satuan Kerja	Penyerapan	Konsistensi	CRO	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kinerja	Kategori
16	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	97,75	98,29	100,00	2,25	55,63	86,78	BAIK
17	BALAI PELATIHAN PERTANIAN JAMBI	98,37	99,86	100,00	1,63	54,06	86,68	BAIK
18	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG, KALSEL	97,83	96,97	100,00	2,17	55,43	86,49	BAIK
19	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) GOWA	99,24	97,15	100,00	1,93	54,83	86,49	BAIK
20	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN, DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA	98,58	99,46	100,00	1,42	53,55	86,48	BAIK
21	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	98,70	99,67	100,00	1,30	53,26	86,45	BAIK
22	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU	99,41	99,86	100,00	1,15	52,86	86,44	BAIK
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	98,87	99,59	100,00	1,13	52,82	86,32	BAIK
24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	99,66	99,78	100,00	0,81	52,03	86,21	BAIK
25	DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	99,16	99,60	100,00	0,84	52,10	86,15	BAIK
26	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	99,29	99,91	100,00	0,71	51,79	86,13	BAIK
27	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN PROVINSI JAMBI	98,69	99,50	99,88	0,96	52,40	86,12	BAIK
28	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MALANG	98,88	98,07	100,00	1,12	52,81	86,04	BAIK
29	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS MAGELANG	99,43	99,54	100,00	0,57	51,43	85,97	BAIK
30	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MANOKWARI	99,17	98,65	100,00	0,83	52,08	85,97	BAIK
31	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) BOGOR	99,64	98,19	100,00	0,83	52,07	85,93	BAIK
32	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT	99,37	99,07	100,00	0,63	51,57	85,92	BAIK
33	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	99,61	99,74	100,00	0,39	50,97	85,89	BAIK
34	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	99,43	99,03	100,00	0,57	51,43	85,88	BAIK
35	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU	99,74	99,94	100,00	0,26	50,64	85,85	BAIK
36	POLITEKNIK ENJINIRING PERTANIAN INDONESIA (PEPI)	99,31	98,26	100,00	0,69	51,72	85,81	BAIK
37	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	99,76	99,80	100,00	0,24	50,60	85,81	BAIK
38	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN MALANG - JATIM	99,85	99,97	100,00	0,15	50,37	85,79	BAIK
39	DINAS PERTANIAN PROVINSI BANTEN	99,69	99,27	100,00	0,31	50,77	85,76	BAIK
40	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT	98,94	96,68	100,00	1,06	52,66	85,75	BAIK
41	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	99,82	99,59	100,00	0,18	50,44	85,73	BAIK
42	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	99,87	99,64	100,00	0,13	50,33	85,72	BAIK
43	BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG - JABAR	98,93	98,29	99,40	0,83	52,08	85,62	BAIK
44	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	99,82	99,85	99,93	0,00	49,99	85,62	BAIK
45	DINAS PERTANIAN PROVINSI GORONTALO	99,98	99,18	100,00	0,02	50,05	85,56	BAIK
46	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN BATU, MALANG JAWA TIMUR	99,90	98,87	100,00	0,10	50,24	85,55	BAIK
47	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	100,00	99,18	100,00	0,00	50,00	85,55	BAIK
48	DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	97,69	90,89	100,00	2,31	55,78	85,47	BAIK
49	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN	99,71	97,54	100,00	0,29	50,74	85,44	BAIK
50	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	99,97	98,03	100,00	0,03	50,08	85,36	BAIK
51	POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) YOGYAKARTA - MAGELANG KAMPUS YOGYAKARTA	99,11	94,49	100,00	0,89	52,22	85,25	BAIK
52	SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN NEGERI SEMBAWA/PALEMBANG	99,92	94,81	100,00	0,08	50,19	84,80	BAIK
53	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN CINAGARA-BOGOR JABAR	97,50	92,81	98,76	1,36	53,41	84,58	BAIK
54	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	98,50	85,70	100,00	1,50	53,76	84,03	BAIK
55	DINAS PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT	93,78	99,48	97,65	-0,24	49,39	83,81	BAIK
56	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA	99,13	99,69	6,69	-20,00	0,00	30,67	SANGAT KURANG

Sumber: data diolah dari aplikasi SMART

Dari Tabel 15 di atas dapat dilihat bahwa dari 56 satker lingkup BPPSDMP yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dengan kategori SANGAT BAIK sebanyak 5

satker, Kategori BAIK sebanyak 50 satker dan kategori SANGAT KURANG sebanyak 1 satker. NKA tertinggi diperoleh oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 99,76 (SANGAT BAIK), sedangkan NKA terendah adalah Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua sebesar 30,67 (SANGAT KURANG), terdapat keterlambatan perbaikan data pada realisasi volume capaian output SAKTI, progress caput sudah dientry 100% tetapi volume output belum terisi, dan perbaikan data pada SAKTI membutuhkan jeda waktu 2 – 3 hari untuk terintegrasi secara otomatis kedalam aplikasi SMART. Konsistensi dengan nilai tertinggi diperoleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan sebesar 99,97%, sedangkan Konsistensi terendah sebesar 85,70% di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Satker dengan Nilai Efisiensi tertinggi diperoleh 2 satker sebesar 100% yaitu Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara dan SMKPP Negeri Kupang, sedangkan yang terendah di Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua (0%). Serapan anggaran tertinggi di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat sebesar 100% dan terendah di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat sebesar 93,78%. Capaian Rincian Output (CRO) yang tidak optimal atau kurang dari 100% tetapi masih >90% ada 6 satker (Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat, BBPP Lembang, dan BBPKH Cinagara). Pada satker dekonsentrasi karena ada Silpa pembayaran BOP dan bantuan pulsa, pada UPT pelatihan karena penerimaan PNBP yang tidak mencapai target karena ada penundaan dari pihak ke-2.

H. KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengumpulan data terkait pencapaian nilai kinerja, antara lain:

- 1) Sering bergantinya admin/petugas entri data pada aplikasi SMART atau SAKTI terutama pada satker Dekonsentrasi dan kadang tidak ada *transfer knowledge* dari petugas yang lama;
- 2) Kurangnya SDM di daerah sehingga Admin ada yang merangkap sebagai Penyuluh, PPK, menangani bidang keuangan, menangani bidang program/ perencanaan, bahkan sekaligus sebagai admin satker lainnya selain satker 10 (BPPSDMP);

- 3) Data capaian output (caput) integrasi dari SAKTI kadang masing anomali dan ada pula admin SAKTI yang hanya mengisi persentase capaian progress bukan capaian volume output sehingga masih diperlukan koreksi terhadap data tersebut karena persentase progress tidak masuk dalam penilaian nilai kinerja di sistem SMART. Pengisian caput pada SAKTI juga ada batas waktunya karena harus ada konfirmasi KPPN untuk caput yang telah diisi dan integrasi data dari SAKTI ke sistem SMART ada jeda waktu sekitar 2 – 3 hari;
- 4) Nilai konsistensi tidak mencapai nilai maksimal 100% hal ini disebabkan belum mengacunya pelaksanaan kegiatan terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD);
- 5) Nilai Efisiensi satker lingkup BPPSDMP rata-rata masih dibawah 80% karena rata-rata capaian Rincian Output (CRO) sudah tercapai sesuai dengan anggaran yang dialokasikan sehingga hanya sedikit saja efisiensi biayanya.

I. REKOMENDASI

Dari beberapa kendala yang dihadapi di atas, dalam rangka perbaikan nilai kinerja pada tahun yang akan datang maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekretariat Badan PPSDMP secara rutin menyelenggarakan Bimtek SMART per semester setiap tahunnya (tahun 2023 hanya terselenggara 1 kali karena pemotongan anggaran), namun masih diperlukan pemantauan dan pembinaan secara intensif juga dari masing-masing Unit Kerja Eselon II Pusat sebagai penanggung jawab di satker Dekon dan UPT Pusat;
- 2) Mengoptimalkan SDM yang ada, dan admin satker proaktif melakukan koordinasi ke pusat melalui media sosial/ WAGrup;
- 3) Perlu koordinasi yang baik antara admin monev SMART dengan admin SAKTI;
- 4) Perlu koordinasi secara rutin dengan bidang yang menangani perencanaan terkait RPD (Rencana Penarikan Dana), agar dapat dilakukan revisi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 5) Rendahnya efisiensi dipengaruhi oleh ketercapaian Rincian Output (RO) dan realisasi anggaran masing-masing RO, oleh karena itu perlu dimaksimalkan capaian RO diikuti dengan adanya efisiensi biaya.